



Kemenkes
BBKK Tanjung Priok

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BBKK TANJUNG PRIOK TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BBKK Tanjung Priok.

Dengan semangat, kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program dan kegiatan pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target serta capaian Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan.

Diharapkan, Laporan ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja BBKK Tanjung Priok. Meskipun secara umum kinerja BBKK Tanjung Priok telah mencapai target, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu, dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja BBKK Tanjung Priok menjadi lebih di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim pengelola LAKIP dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Priok, 19 Januari 2025

Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Tanjung Priok,



Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 196905041992031009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis yang memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan Kepala Balai BBKK Tanjung Priok kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja ini secara umum berisi informasi mengenai rencana dan capaian kinerja selama Tahun 2024. Rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 yang telah disarikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa BBKK Tanjung Priok telah memenuhi sasaran yang ditargetkan dengan peningkatan capaian kinerja yang signifikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjabarkan capaian kinerja terhadap 8 (Delapan) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan rata-rata capaian sebesar 107.08% Berikut adalah rincian capaian kinerja:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN yaitu 0,96 dari target 0,92, sehingga capaian kinerjanya 104,35%
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu 100% dari target 98,5%, sehingga capaian kinerjanya 101,52%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN yaitu 1 dari target 1 sehingga capaian kinerjanya 100%
4. Nilai kinerja anggaran yaitu 95,95 dari target 85, sehingga capaian kinerjanya 112,88%;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran yaitu 99,32 dari target 93,5, sehingga capaian kinerjanya 106,22%;
6. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 89,86 dari target 82,5 sehingga capaian kinerjanya 108,92%;
7. Persentase AN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 100% dari target 82,5% sehingga capaian kinerjanya 121,21%.
8. Persentase Realisasi Anggaran yaitu 97,46% dari target 96% sehingga

capaian kinerja 101,52%

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2024 mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp34.393,359.000 dengan Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp33.520.385.189 atau 97,46%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
GAMBAR GRAFIK	ix
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	3
C. Visi dan Misi	9
D. Tugas Pokok dan Fungsi	10
E. Struktur Organisasi	12
BAB II	18
A. Perencanaan Kinerja	18
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	152
BAB IV	161
PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Tindak Lanjut	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	12
Gambar 3. 2.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	16
Tabel 1. 2	17
Tabel2. 1.....	19
Tabel 2. 2	21
Tabel 3. 1.....	26
Tabel 3. 2	32
Tabel 3. 3	33
Tabel 3. 4	34
Tabel 3. 5	40
Tabel 3. 6	42
Tabel 3. 7	58
Tabel 3. 8	74
Tabel 3. 9	75
Tabel 3.10.....	81
Tabel 3.11.....	83
Tabel 3. 12.....	85
Tabel 3. 13.....	87
Tabel 3. 14.....	98
Tabel 3. 15.....	99
Tabel 3. 16.....	100
Tabel 3. 17.....	100
Tabel 3. 18.....	101
Tabel 3. 19.....	113
Tabel 3. 20.....	114
Tabel 3. 21.....	115
Tabel 3. 22.....	116
Tabel 3. 23.....	117
Tabel 3. 24.....	121
Tabel 3. 25.....	122

Tabel 3. 26.....	124
Tabel 3. 27.....	132
Tabel 3. 28.....	147
Tabel 3. 29.....	153
Tabel 3. 30.....	153
Tabel 3. 31.....	154
Tabel 3. 32.....	154
Tabel 3. 33.....	155
Tabel 3. 34.....	155
Tabel 3. 35.....	156
Tabel 3. 36.....	156

GAMBAR GRAFIK

Grafik 3. 1.....	41
Grafik 3. 3.....	47
Grafik 3. 4.....	58
Grafik 3. 5.....	62
Grafik 3. 6.....	64
Grafik 3. 8.....	65
Grafik 3. 9.....	66
Grafik 3. 10.....	76
Grafik 3. 11.....	77
Grafik 3. 12.....	78
Grafik 3. 13.....	79
Grafik 3. 14.....	80
Grafik 3. 15.....	80
Grafik 3. 16.....	87
Grafik 3. 17.....	89
Grafik 3. 18.....	90
Grafik 3. 19.....	96
Grafik 3. 20.....	98
Grafik 3. 21.....	99
Grafik 3. 22.....	103
Grafik 3. 24.....	104
Grafik 3. 25.....	105
Grafik 3. 26.....	112
Grafik 3. 27.....	124
Grafik 3. 29.....	125
Grafik 3. 30.....	126
Grafik 3. 31.....	131
Grafik 3. 32.....	133
Grafik 3. 34.....	134
Grafik 3. 35.....	138
Grafik 3. 36.....	139
Grafik 3. 38.....	141

Grafik 3. 39	146
Grafik 3. 40	148
Grafik 3. 42	149
Grafik 3. 43	152

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1	13
Diagram 1. 3	Error! Bookmark not defined.
Diagram 1. 4	14
Diagram 1. 5	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	146
Lampiran 2.....	151
Lampiran 3.....	155
Lampiran 4.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, termasuk di lingkungan BBKK Tanjung Priok. LAKIP adalah bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Tanjung Priok dalam menjalankan tugas pengawasan kesehatan di pelabuhan, bandara, dan pintu masuk lainnya. LAKIP juga berfungsi untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam tahapan perencanaan BBKK Tanjung Priok periode 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun ini merupakan kelanjutan dari pencapaian target pembangunan kesehatan jangka menengah pada tahun 2020-2024. Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 adalah langkah strategis untuk memantau pencapaian kinerja yang berakhir pada tahun 2024. Laporan ini harus mampu mengidentifikasi indikator kinerja yang diproyeksikan akan mengalami kesulitan dalam mencapai target serta memberikan rekomendasi teknis yang dapat dilaksanakan guna mendorong pencapaian kinerja pada tahun 2024.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan poros maritim, BBKK Tanjung Priok memiliki peran penting dalam deteksi dan respons terhadap *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Peran ini harus dilaksanakan secara optimal tanpa menghambat arus lalu lintas orang, barang, dan alat angkut, serta tidak mengganggu arus perekonomian dan perdagangan. Fungsi cegah tangkal yang dilaksanakan di pintu masuk negara menjadi sangat krusial untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

Dalam konteks kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada 2023-2024, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia melalui enam pilar utama: Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Ketahanan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan. Implementasi pilar-pilar ini, termasuk di wilayah BBKK Tanjung Priok, sangat memerlukan perencanaan yang matang dan advokasi yang tepat agar mampu menanggapi tantangan kesehatan global dan lokal. Pemetaan potensi

daerah dan pemahaman karakter masyarakat pengguna layanan kesehatan akan menjadi dasar untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kebutuhan, sehingga dapat memperkuat upaya BBKK Tanjung Priok dalam menghadapi ancaman kesehatan yang bersifat internasional.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, BBKK Tanjung Priok berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Laporan Kinerja ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Bagi BBKK Tanjung Priok, tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk:

1. Menyampaikan informasi mengenai kinerja BBKK Tanjung Priok selama tahun 2024 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis instansi.
3. Sebagai sarana untuk perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja BBKK Tanjung Priok.
4. Sebagai langkah mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang merupakan bagian dari agenda reformasi pemerintah.
5. Menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja BBKK Tanjung Priok di masa mendatang.

B. Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada 2023–2024 menjadi landasan penting. Transformasi ini mengusung enam pilar utama yang mencakup: (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Ketahanan Kesehatan, (4) Pembiayaan Kesehatan, (5) Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Teknologi Kesehatan. Penerapan pilar-pilar ini memiliki relevansi yang sangat besar dengan tugas dan peran Balai Besar Kesehatan Karantina (BBKK), yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyakit serta melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan kesehatan di pintu masuk negara.

BBKK Tanjung Priok mendukung pilar pertama, Transformasi Layanan Primer, sejalan dengan peran BBKK dalam menyediakan layanan kesehatan preventif di pelabuhan, bandara, dan pintu masuk lainnya. Transformasi ini memperkuat sistem deteksi dan respons terhadap penyakit menular yang berisiko tinggi di pintu masuk negara, yang langsung berhubungan dengan upaya BBKK untuk mendeteksi dan mencegah masuknya penyakit dari luar negeri. Layanan primer yang lebih kuat di daerah akan mendukung BBKK dalam menjalankan fungsi cegah tangkal dengan lebih efektif.

Pilar kedua, Transformasi Layanan Rujukan, menghubungkan BBKK dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Sebagai bagian dari penguatan sistem rujukan kesehatan, BBKK memiliki peran dalam merujuk kasus-kasus kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, baik terkait dengan penyakit menular maupun kesehatan masyarakat lainnya. Peningkatan kualitas layanan rujukan ini penting untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus penyakit berisiko tinggi di pintu masuk negara.

Pilar ketiga, Ketahanan Kesehatan, berfokus pada kesiapsiagaan dan kemampuan sistem kesehatan dalam merespons ancaman kesehatan global seperti epidemi dan pandemi. BBKK Tanjung Priok, yang berperan dalam pengawasan kesehatan di pintu masuk negara, sangat berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan dengan mencegah penyebaran penyakit dari luar negeri ke dalam negeri. Meningkatkan kapasitas pengawasan kesehatan pada titik-titik kritis ini menjadi isu strategis yang harus diperhatikan dalam upaya mencapai ketahanan kesehatan yang lebih baik.

Pilar keempat, Pembiayaan Kesehatan, sangat berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang efisien di BBKK. Sebagai lembaga yang mengelola kegiatan pengawasan kesehatan, BBKK memerlukan pembiayaan yang cukup dan tepat guna untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.

Pilar kelima, Sumber Daya Manusia Kesehatan, menjadi isu strategis yang juga terkait erat dengan kapasitas SDM di BBKK. Penyediaan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas kesehatan yang bekerja di lapangan sangat penting untuk memperkuat kinerja BBKK dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penguatan kapasitas SDM ini juga sejalan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang kesehatan, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

Pilar keenam, Teknologi Kesehatan, terkait dengan penerapan teknologi dalam sistem pengawasan kesehatan. Di BBKK, teknologi sangat berperan dalam pengelolaan data kesehatan, pemantauan kesehatan di pintu masuk, serta dalam deteksi dini penyakit melalui sistem informasi yang terintegrasi. Teknologi kesehatan yang canggih dapat meningkatkan efektivitas dalam memonitor dan merespons potensi ancaman penyakit, serta mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan.

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antarnegara semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat, dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respons dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu, setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia. Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap IHR 2005.

Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuk barang, orang, alat angkut sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan

masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Adapun isu strategis yaitu sebagai berikut:

Pelabuhan Tanjung Priok memiliki aktivitas tinggi akan pergerakan alat angkut, muatan, maupun orang. Tingginya mobilitas ini menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat. Pada tanggal 4 Agustus 2023, Indonesia telah menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Total kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan 21 Desember 2024 sebanyak 6.830.358 kasus konfirmasi dan 162.066 kematian yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Empat provinsi yang melaporkan kasus konfirmasi terbanyak pada minggu ke-51 tahun 2024 di antaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Pada 14 Agustus 2024, WHO kembali menetapkan Mpox sebagai PHEIC setelah dinyatakan berakhir pada 11 Mei 2023. Penetapan PHEIC ini merupakan yang kedua kalinya. Total kasus Mpox yang dilaporkan hingga 30 November 2024 ialah 118.863 kasus konfirmasi dengan 263 kematian (CFR: 0,22%). Negara yang sudah melaporkan temuan clade Ib ialah RD Kongo, Burundi, Uganda, Rwanda, Kenya, Swedia, Thailand, India, Jerman, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Zambia, Zimbabwe, dan Belgia. Indonesia sendiri telah melaporkan 88 kasus terkonfirmasi dan dinyatakan sembuh sampai dengan Desember 2024 yang tersebar di provinsi di Indonesia namun tidak dilaporkan adanya kasus kematian. Berdasarkan perkembangan kasus yang ada sampai dengan tahun 2024, maka penyakit infeksi emerging penting mendapat perhatian, khususnya mekanisme deteksi dini pada pintu masuk negara oleh karena juga merupakan isu masyarakat global.

Kementerian Kesehatan melakukan upaya penanggulangan untuk kasus Mpox ini. Terdapat tiga upaya yang akan dilakukan, di antaranya adalah upaya surveilans, terapeutik, dan vaksinasi. Upaya surveilans dilakukan dengan penyelidikan epidemiologi dan penyiapan laboratorium pemeriksa. Terapeutik dengan memberikan terapi simptomatis, pemenuhan logistik antivirus khusus Mpox, serta pemantauan kondisi pasien. Vaksinasi Monkeypox akan dilaksanakan terutama pada populasi yang paling berisiko. Kriteria penerima vaksin Monkeypox adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual

berisiko dengan sesama jenis dengan atau tanpa status ODHIV. Untuk kasus ini, Direktur Jenderal P2P menerbitkan Keputusan Nomor HK.02.02/C/505/2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tanggal 1 Januari 2023. Dengan bertambahnya kasus Mpox pada tahun 2023 sehingga Direktur Jenderal P2P menerbitkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/C/4408/2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Mpox (Monkeypox).

Pada minggu ke-51 terdapat temuan positif A(H5N1) pada burung dan unggas di Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Korea. Indonesia pernah melaporkan kasus A(H5N1) pada tahun 2005–2017 sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian (CFR: 84%). Sejak tahun 2018 belum ada pelaporan kasus baru pada manusia. Pada minggu ke-34 tahun 2023, dilaporkan dua kasus suspek A(H5N1) di Kabupaten Solok, Sumatra Barat dengan hasil pemeriksaan laboratorium negatif.

Peningkatan lalu lintas pelaku perjalanan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini juga dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya transmisi penyakit menular antarnegara. Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh pemerintah dari regulasi yang diterapkan pada pintu masuk, peningkatan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit penyakit infeksi emerging (Monkeypox, Nipah, dll.), kegiatan surveilans.

Leptospirosis sering terjadi dengan tibanya musim penghujan yang berasal dari urine dan kotoran tikus yang terinfeksi bakteri *Leptospira*. Leptospirosis tersebar di seluruh dunia, dengan perkiraan kejadian tahunan mencapai 1,03 juta kasus dengan 58.900 kematian. Insiden tertinggi banyak ditemukan di negara-negara kepulauan dengan curah hujan dan potensi banjir yang tinggi, salah satunya Indonesia. Leptospirosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia berkaitan dengan keberadaan faktor risiko yaitu tingginya populasi tikus sebagai reservoir leptospirosis, buruknya sanitasi lingkungan, dan meluasnya daerah banjir. Hingga pertengahan 2024, kasus leptospirosis di Indonesia mencapai 367 kasus dengan 42 kematian. Jumlah kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 198 kasus. Leptospirosis merupakan penyakit menular yang berbahaya karena apabila terlambat ditangani dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian.

Di Indonesia banyak kasus yang tidak dilaporkan karena sulitnya diagnosis klinis dan lemahnya surveilans. Dalam upaya kewaspadaan dini terhadap penyakit

leptospirosis, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang antisipasi peningkatan kasus kewaspadaan kejadian luar biasa (KLB) Leptospirosis dalam menghadapi musim penghujan. Untuk mengurangi jumlah Leptospirosis dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini meliputi mencuci tangan dengan sabun, menggunakan sarung tangan dan sepatu bot saat bekerja di area basah atau berlumpur, menghindari berjalan tanpa alas kaki di genangan air terutama saat banjir, dan mengonsumsi makanan sehat. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan terutama di daerah rawan banjir. Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan penyebaran dengan menggerakkan masyarakat dalam pemberantasan tikus sebagai sumber penyakit keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terus-menerus baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan cetak. Kelima, memberikan respons cepat terhadap laporan kasus serta melakukan deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan gejala dan riwayat pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan selama kurun waktu 1-2 minggu terakhir.

Cakupan vaksinasi kembali menurun pada akhir tahun 2022 di bulan Desember karena dikeluarkannya Surat Edaran HK.02.02/C.I/9325/2022 yang menyebutkan bahwa vaksin meningitis merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan tidak menjadi keharusan bagi mereka yang datang menggunakan visa umrah. Dengan dibukanya kembali pelayanan vaksinasi. Pada tahun 2024 ini, Surat Edaran tersebut dicabut dan tidak berlaku. Karena berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 20 Mei 2024 melalui Kementerian Luar Negeri nomor 211-4239 telah disampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas terkaitnya (Kementerian Kesehatan Arab Saudi) telah memperbarui ketentuan kesehatan pada jamaah melalui *Umrah Health Requirements and Recommendations for Travelers to Saudi Arabia for Umrah – 1445H (2024)*. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, jumlah jamaah umrah yang membutuhkan vaksinasi meningitis meningkat, sehingga BBKK Tanjung Priok harus mengelola lonjakan permintaan secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Peningkatan lalu lintas pelaku perjalanan tentunya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penggunaan fasilitas dan tempat-tempat umum yang ada di pelabuhan dan bandara. Oleh karena itu, upaya inspeksi kesehatan lingkungan terhadap alat angkut dan tempat-tempat umum juga perlu ditingkatkan. Perbaikan kondisi dari segi ekonomi juga terlihat dengan kembali beroperasinya Tempat-

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang ada di pelabuhan. Sebagian di antaranya adalah TPP yang pernah beroperasi sebelumnya namun tutup karena terdampak pandemi Covid-19, dan sebagian lainnya adalah TPP baru yang mencoba beroperasi di pelabuhan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok dalam hal pengawasan kualitas makanan dan minuman di pelabuhan. Kondisi sanitasi senantiasa bersinggungan dengan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit. Sehingga semua faktor tersebut menjadi tantangan bagi petugas BBKK Tanjung Priok sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko.

Dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, BBKK Tanjung Priok telah berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Namun, pelaksanaan ZI di BBKK Tanjung Priok menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu ditangani untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Terjadi peningkatan standar pelayanan, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 menunjukkan nilai 84,5 (kategori baik), tetapi masih ada keluhan terkait waktu tunggu dan aksesibilitas layanan tertentu. Sehingga diperlukan digitalisasi dan optimalisasi teknologi dengan mengembangkan dan memperbaiki sistem pelayanan publik.

Adanya penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan, mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan BBKK. Uraian tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam Unsur Utama dan Unsur Penunjang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan selaras dengan indikator kinerja BBKK Tanjung Priok. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, serta Surat Edaran Sekjen Kemenkes Nomor HK.02.02/A/47641/2023 tentang Penerapan Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024 nomenklatur KKP resmi berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut perlu adanya sosialisasi kepada seluruh mitra kerja terutama penguatan core business, yaitu pengawasan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara. Dengan adanya penguatan tugas dan fungsi tersebut, perlu didukung oleh sumber daya yang memadai.

C. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit, dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, BBKK menjabarkan visi BBKK yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan sembilan misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan tepercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan tepercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respons Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

BBKK telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya Visi BBKK Tanjung Priok yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respons penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKK Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi.

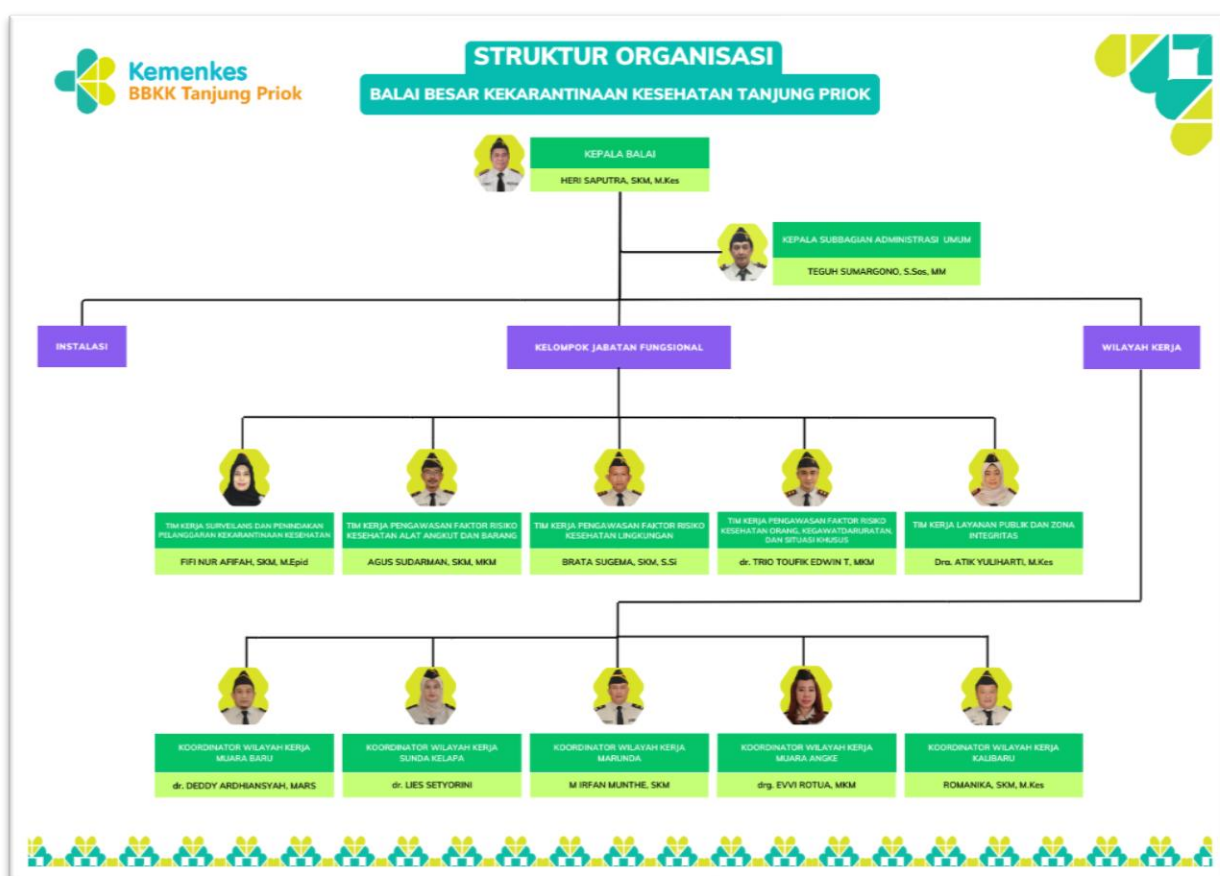
1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit, dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Sebelas fungsi di atas terdapat dalam indikator kinerja BBKK Tanjung Priok yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut meliputi meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara sebesar 100%. Selain itu, ditargetkan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sehingga dapat mencapai tujuan BBKK Tanjung Priok, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

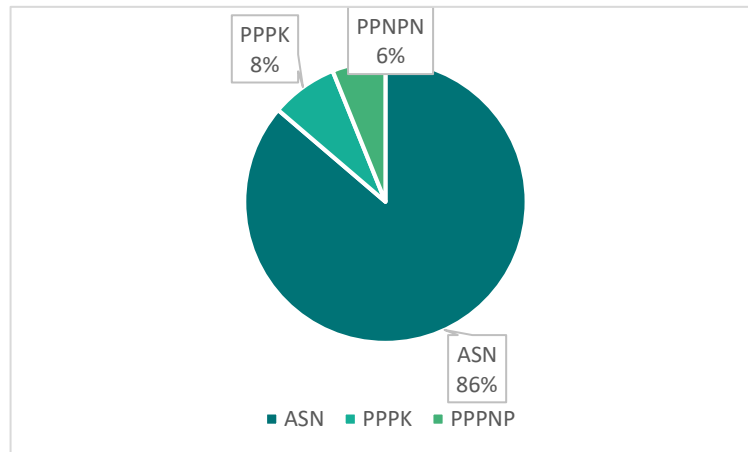
E. Struktur Organisasi

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



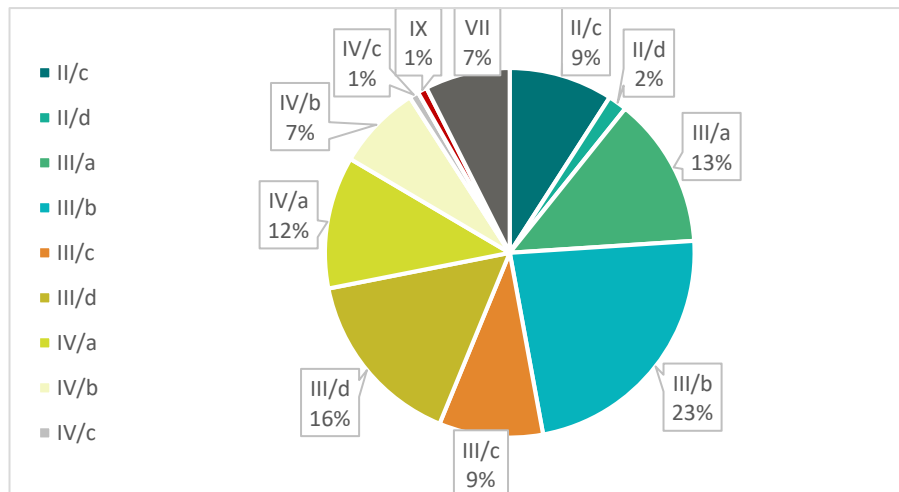
Distribusi pegawai BBKK Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 113 orang ASN, 10 orang PPPK, dan 8 orang PPNPN.

Diagram 1. 1
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Status Pegawai Tahun 2024



Jumlah pegawai BBKK Tanjung Priok tahun 2024 sebanyak 131 orang dan diagram 1.1 diketahui bahwa 86% atau 113 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 8% atau 10 orang berstatus PPPK dan 6% atau 8 orang PPNP.

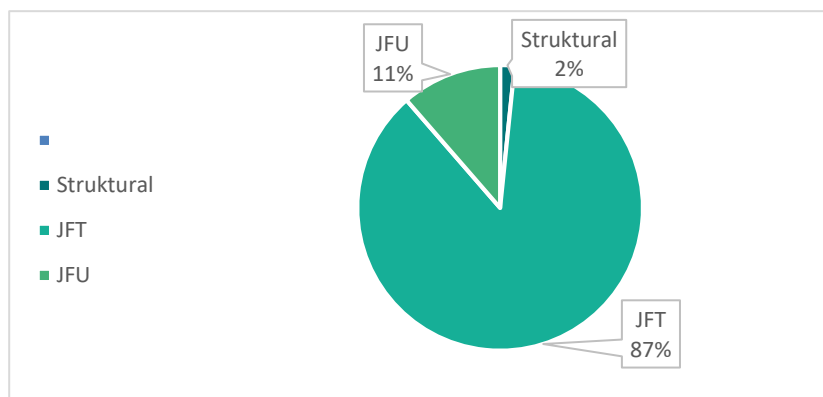
Diagram 1. 2
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Golongan Tahun 2024



Berdasarkan Diagram 1.2 diketahui bahwa dari 113 orang Aparatur Sipil Negara, sebagian besar pegawai, yaitu 74 orang (61%), memiliki golongan pangkat III; 13 orang (11%) memiliki golongan pangkat II; 24 orang (20%) memiliki golongan pangkat IV; dan PPPK pangkat X sebanyak 1 orang serta VII sebanyak

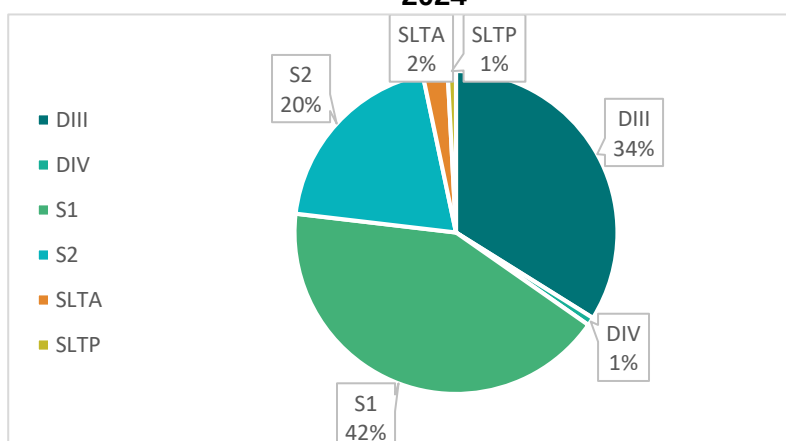
9 orang.

Diagram 1. 3
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Jabatan Tahun 2024



Berdasarkan diagram 1.3 diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 2 orang (2%), Jabatan fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 107 orang (87%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 14 orang (11%).

Diagram 1. 4
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Berdasarkan Diagram 1.4 diketahui bahwa dari 113 orang Aparatur Sipil Negara dan 10 orang PPPK di BBKK Tanjung Priok, 24 orang (20%) berpendidikan

S2, 51 orang (42%) berpendidikan S1, 1 (1%) orang berpendidikan Diploma IV, 41 orang (34%) berpendidikan Diploma III, 3 orang (2%) berpendidikan SLTA, dan 1 orang (1%) berpendidikan SLTP.

Tabel 1. 1
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional
Tertentu Tahun 2024

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah	Persentase
Administrator Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1	1%
Analisis Anggaran Ahli Pertama (JFT)	1	1%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1	1%
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (JFT)	1	1%
Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1	1%
Arsiparis Terampil (JFT)	2	2%
Dokter Ahli Madya (JFT)	4	4%
Dokter Ahli Muda (JFT)	8	7%
Dokter Ahli Pertama (JFT)	2	2%
Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	1	1%
Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	2	2%
Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	4	4%
Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	1	1%
Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	4	4%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7	7%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8	7%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	7	7%
Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2	2%
Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1	1%
Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	4	4%
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya (JFT)	1	1%
Perawat Mahir (JFT)	8	7%
Perawat Penyelia (JFT)	3	3%
Perawat Terampil (JFT)	6	6%
Perencana Ahli Pertama (JFT)	1	1%
Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1	1%
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1	1%
Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1	1%
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	1	1%
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1	1%
Sanitarian Ahli Madya (JFT)	3	3%
Sanitarian Ahli Muda (JFT)	4	4%
Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	7	7%
Sanitarian Mahir (JFT)	5	5%
Sanitarian Penyelia (JFT)	1	1%
Sanitarian Terampil (JFT)	1	1%
Total	107	100%

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa dari 107 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, persentase terbanyak adalah Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Perawat Mahir dan Dokter Ahli Muda sebanyak 8 orang (7%). Sedangkan gambaran pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 1. 2
Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2024

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah	Persentase
Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	1	7%
Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian (JFU)	2	14%
Asisten Perawat (JFU)	1	7%
Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	1	7%
Pengelola Instalasi Air dan Listrik (JFU)	1	7%
Pengemudi (JFU)	1	7%
Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	3	21%
Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	2	14%
Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1	7%
Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1	7%
Total	14	100%

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa dari 14 orang pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum. Dari data distribusi pegawai di atas menunjukkan kekuatan BBKK Tanjung Priok. dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi BBKK Tanjung Priok.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Direktorat Jenderal P2P telah menyusun Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020–2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan RPJMN Tahun 2020–2024. Selanjutnya, BBKK Tanjung Priok telah menyusun rencana aksi kegiatan tahun 2020–2024 yang mengacu pada Rencana Aksi Program.

Selaras dengan sasaran program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P 2020–2024, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BBKK Tanjung Priok adalah *"Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100%."* Sasaran strategis ini ditandai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yakni:

- a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 0,92 pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 98,5% pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 1 pada akhir tahun 2024;
- d. Nilai kinerja anggaran yaitu 85 pada akhir tahun 2024;
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu 93,5 pada akhir tahun 2024;
- f. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 82,5 pada akhir tahun 2024;
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 82,5% pada akhir tahun 2024.
- h. Persentase Realisasi Anggaran yaitu 96% pada akhir tahun 2024.

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Rencana Aksi Kegiatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%						
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	401.453	692.609			
	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN			0,90	0,91	0,92
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	98,5%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	85%	90%			
	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN			0,99	0,99	1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100%						
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	81				
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	90	93	93,5
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	78	80	82	82,5
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	75%			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	82%	82,5%
8	Persentase Realisasi Anggaran				95%	96%

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditinjaulanjuti				92,5%	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekejarantinaaan Kesehatan Tanjung Priok

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 30 November 2024

Pihak Pertama

Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Pelayanan Kekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0.92 Indeks
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98.5 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	86 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan	Nilai kinerja anggaran	85 Nilai

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
	Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93.5 Nilai
		Kinerja implementasi WBK satker	80.5 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80.5 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan wilayah	30,002,414,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4,390,945,000.00
TOTAL			34,393,359,000.00

Pihak Kedua



dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 30 November 2024

Pihak Pertama



Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.

Pada Perjanjian Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp34.393.359.000. Di akhir tahun anggaran, berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 tentang penyampaian rincian target penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, dan Surat Plt. Direktur Jenderal P2P Nomor PR.04.02/C/2855/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Distribusi Pagu Penghematan Dinas melalui *Self Blocking* Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P TA 2024, BBKK Tanjung Priok melakukan efisiensi akun perjalanan dinas sebesar Rp44.537.000.

Pada awal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BBKK Tanjung Priok didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA BBKK Tanjung Priok sesuai Keputusan Menteri Keuangan dengan alokasi sebesar Rp33.608.830.000. Pada bulan Mei, terdapat penambahan alokasi anggaran di BBKK Tanjung Priok, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Kewenangan DJA Tahap-3 P2P TA 2024. Penambahan alokasi anggaran ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program kebutuhan prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan sehingga pagu alokasi tambahan menjadi Rp34.393.359.000. Penambahan alokasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang diperlukan oleh BBKK Tanjung Priok.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BBKK Tanjung Priok selama periode Januari hingga Desember 2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Tanjung Priok Tahun 2020–2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator. Hasil pengukuran ini memberikan informasi terkait setiap indikator kinerja, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun rencana kegiatan di masa mendatang agar lebih efektif dan efisien.

Manfaat pengukuran capaian kinerja antara lain:

1. Memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran organisasi merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh BBKK Tanjung Priok, dengan rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024, terdapat delapan indikator kinerja utama dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0,92	0,96	104,35%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98,5%	100%	101,52%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	1	100%
4	Nilai kinerja anggaran	85	95,95	112,88%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,5	99,32	106,22%
6	Kinerja implementasi WBK satker	82,5	89,86	108,92%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82,5%	100%	121,21%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	97,46%	101,52%
Rata-Rata				107,08%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah disajikan pada Tabel 3.1, BBKK Tanjung Priok telah berhasil mencapai target delapan indikator tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 107,08%, di mana kedelapan indikator tersebut memiliki capaian kinerja lebih dari 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 106,73%, capaian realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35%.

Indikator kesatu

Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

1. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan melakukan fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan. Indeks dihitung dari 4 parameter antara lain:

a. Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai standar

1) Pengawasan Penumpang Datang Dalam Negeri dan Penumpang Berangkat Dalam Negeri

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan thermal scanner serta pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan lima Wilayah Kerja. Penumpang yang diawasi adalah penumpang yang datang maupun yang berangkat, baik penumpang dalam negeri maupun penumpang luar negeri.

Selain itu, menindaklanjuti penerbitan Surat Edaran Sekjen Kemenkes Nomor HK.02.02/C-1/9325/2022 tentang Pelayanan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah, yang menyebutkan bahwa jemaah umrah tidak diwajibkan melakukan vaksinasi Meningitis, namun vaksinasi Meningitis tetap dihimbau kepada masyarakat yang akan melakukan ibadah umrah ke Arab Saudi, khususnya pada kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko tinggi. Pada tahun 2024, Surat Edaran tersebut dicabut dan tidak berlaku. Berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 20 Mei 2024 melalui Kementerian Luar Negeri nomor 211-4239, telah disampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas terkait (Kementerian Kesehatan Arab Saudi) telah memperbarui ketentuan

kesehatan pada jamaah melalui "Umrah Health Requirements and Recommendations for Travelers to Saudi Arabia for Umrah – 1445H (2024)". Dengan berlakunya ketentuan tersebut, jumlah jamaah umrah yang membutuhkan vaksinasi meningitis meningkat, sehingga BBKK Tanjung Priok harus mengelola lonjakan permintaan secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

2) Pemeriksaan ABK Dalam Negeri

Kegiatan pemeriksaan personel yang dilakukan sama halnya seperti pada pengawasan penumpang yang datang dan berangkat, baik luar negeri maupun dalam negeri, yaitu terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan thermal gun serta pemeriksaan dokumen kesehatan.

2) Kunjungan Poliklinik (Non Penumpang)

BBKK Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan terbatas, rujukan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan di poliklinik BBKK pada setiap terminal tidak hanya diberikan kepada penumpang, tetapi juga kepada para pekerja di sekitar pelabuhan, pengunjung atau pengantar, dan masyarakat pelabuhan lainnya.

3) Skrining Penyakit menular

Skrining untuk pengendalian penyakit menular langsung, seperti TB dan HIV/AIDS, adalah pemeriksaan orang-orang asimtomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit. Dengan adanya kegiatan skrining, masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu apakah mereka terkena suatu penyakit atau tidak melalui beberapa proses. Sehingga masyarakat dengan mudah melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit tersebut

4) Pemeriksaan ICV Awak Kapal

Pemeriksaan ICV (*International Certificate of Vaccination*) untuk awak kapal merupakan proses pemeriksaan kesehatan yang melibatkan sertifikasi vaksinasi internasional bagi awak kapal. Hal ini dapat meliputi pemeriksaan hasil PCR test dari negara asal, sertifikasi vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan secara umum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa awak kapal bebas dari penyakit menular.

b. Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan kesehatan alat angkut adalah proses pengamatan fisik terhadap kondisi sanitasi, vektor penyakit, serta pemeriksaan dan/atau penerbitan dokumen karantina kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada alat angkut meliputi pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP dan PHQC. Setiap kapal yang datang atau berangkat diperiksa oleh petugas karantina untuk memastikan kapal tidak membawa faktor risiko PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) dan tidak menjadi sarana penularan penyakit.

c. Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan dan pengawasan terhadap jenazah berdasarkan dokumen kesehatan. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda yang digunakan dalam alat angkut. Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiri atas: surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah dari pelabuhan atau bandar udara (Human Remains Transport Certificate) dan sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018).

d. Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan lingkungan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat-Tempat Umum (TTU)

IKL TTU dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan serta menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

IKL TPP dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan

makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini.

3) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Air Bersih (SAB)

IKL SAB dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Pengawasan dimulai dari titik sumber air yang didistribusikan (*Water Pumping System* milik PT. Energi Pelabuhan Indonesia) sampai ke titik yang diterima oleh konsumen seperti *drinking water*, *water car*, kran-kran yang ada di tempat pengelolaan air-air kran yang berada di pelabuhan.

4) Survei Vektor

Berdasarkan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, tujuan pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara adalah untuk meniadakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan surveilans vektor secara rutin minimal sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Survei vektor terdiri dari:

a) Tikus atau pinjal

Surveilans keberadaan tikus di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara adalah untuk mengamati / memantau secara periodik pada tempat-tempat yang ditentukan yang merupakan tempat didapati adanya tanda-tanda adanya tikus. Idealnya surveilans tikus dilakukan setiap 40 hari sekali sehingga dalam satu tahun akan dilakukan 9 kali pemasangan perangkap. Pemasangan perangkap tikus yang dilakukan yakni dalam rangka memperoleh tikus hidup untuk selanjutnya dilakukan identifikasi tikus beserta ektoparasitnya. Ektoparasit yang dimaksud adalah pinjal yang merupakan vektor penyakit Pes. Identifikasi tersebut berfungsi sebagai peringatan dini bahwa kasus Pes pada manusia berpotensi muncul dan harus segera dilakukan tindakan pencegahan penularan ke manusia.

Pinjal yang ditemukan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperoleh indeks angkanya. Indeks pinjal sendiri dibagi menjadi dua yakni indeks pinjal umum dan indeks pinjal khusus. Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Adapun indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal umum (semua pinjal) dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Dalam upaya surveilans pes, maka indeks pinjal yang digunakan adalah indeks Pinjal khusus terhadap jenis pinjal *Xenopsylla cheopis* sebagai vektor penyakit pes.

b) Larva Anopheles

Survei larva Anopheles dilakukan untuk mengetahui tempat perindukan nyamuk Anopheles yang merupakan vektor penyakit malaria. Metode yang digunakan adalah Dipper Index, yaitu menciduk air dengan gayung dari lokasi yang dianggap merupakan tempat perindukan nyamuk Anopheles di wilayah bandara, seperti danau, rawa, sawah, dan genangan air, sebanyak 10 kali. Kemudian, larva nyamuk yang ditemukan diidentifikasi apakah positif Anopheles atau tidak. Data survei juga dilengkapi dengan pengukuran salinitas air, perkiraan kedalaman air, suhu air, pH air, keberadaan tumbuhan air, serta hewan air/predator larva yang ada.

c) Kecoak

Survei kecoak dilakukan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare. Hal tersebut dikarenakan kecoak merupakan vektor mekanik penyebaran penyakit diare. Keberadaan kecoak perlu dikendalikan sehingga mengurangi faktor risiko kontaminasi parasit terhadap makanan mengingat cara hidup kecoak yang senang tinggal di lingkungan yang lembab, terlindung, banyak bahan makanan dan kotor.

Kecoak termasuk serangga nokturnal (aktif malam hari), akan berkeliaran siang hari bila merasa terganggu atau berkembang dalam populasi yang besar. Indeks populasi kecoak adalah angka rata-rata populasi kecoak, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoak tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (*sticky trap*).

d) Lalat

Sama halnya dengan survei kecoak, survei lalat juga dilakukan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare. Survei lalat dilakukan menggunakan alat fly grill dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan

e) HI Perimeter

Pengamatan *House Index* (HI) perimeter yakni pengamatan terhadap keberadaan larva *Aedes sp* dengan menghitung persentase bangunan di wilayah perimeter Pelabuhan yang positif ditemukan larva.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yang terdiri dari orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang dilakukan pemeriksaan oleh BBKK Tanjung Priok.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini yaitu Indeks pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

3. Cara Perhitungan

Cara perhitungan/rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai *score* maksimal dengan *score* minimal dari 4 parameter yakni :

- Persentase orang yang diperiksa sesuai standar
- Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
- Persentase barang yang diperiksa sesuai standar
- Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

Adapun cara perhitungan/rumus indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara sebagai berikut

Tabel 3. 2
Matrik Perhitungan Nilai Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

No	Parameter	Bobot	<i>Baseline</i>	<i>Coverage</i>	<i>Score</i>	Maksimal	<i>COv Max</i>	<i>Score Max</i>	Minimal	<i>Score Min</i>
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{7} \times 100$	$6 = 3 \times 5$	7	8	$9 = 3 \times 8$	10	$11 = 3 \times 10$
Nilai Empiris					Nilai <i>Score</i> Max			Smax		Smin

$$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$$

Keterangan :

S = skor

S_{max} = skor maksimal

S_{min} = skor minimal

- Skor dihitung dari bobot x cakupan (*coverage*)
- Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (*coverage max*)
- Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (*coverage min*)

Berdasarkan matrik perhitungan nilai Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk di atas, kolom parameter diisi 4 parameter indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk. Kolom bobot diisi bobot dari masing-masing parameter yang dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas parameter yang harus diselesaikan. Masing-masing parameter dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Adapun bobot masing-masing indikator yaitu :

Tabel 3. 3
Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Parameter	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	5	5	5,0
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	4	5	5	4,7
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	5	3	2	3,3
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	5	4	4,7

4. Capaian Kinerja

Tabel 3. 4
Rincian Indikator Kinerja Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2024

Indikator		Target	Realisasi	Capaian%
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN		0,92	0,96	104,35
Pemeriksaan penapisan orang		1.285.668	1.536.751	119,53
a.	Jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal	75.744	86.420	
b.	Jumlah Kunjungan Poliklinik (Selain Penumpang)	2.280	2.598	
c.	Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri	394.644	454.606	
d.	Jumlah pengawasan penumpang datang dalam negeri	388.000	475.809	
e.	Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam negeri	423.600	515.742	
f.	Jumlah <i>screening</i> TB	700	703	
g.	Jumlah <i>screening</i> HIV AIDS	700	873	
Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina		37.990	45.379	118,28
a.	<i>Certificate Of Pratique</i>	2.904	3.579	
b.	PHQC	35.086	41.800	
Pemeriksaan Barang		2	2	100
a.	Izin Angkut Jenazah	2	2	
Pemeriksaan Lingkungan		1.717	1.993	116,07
a.	Tempat Pengelolaan Pangan	387	489	
b.	Tempat-tempat Umum	200	249	
c.	Inspeksi Sanitasi Penyehatan Air Bersih	500	617	
D	Pemeriksaan Air	384	392	
E	Rekap Hasil Survei Vektor	246	246	

Target jumlah pemeriksaan penapisan orang pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.285.668 orang dan terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak 1.536.751 orang atau sebesar 119,53%. Rincian capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Jumlah pemeriksaan ICV awak kapal sebanyak 86.420 orang

Awak kapal sering bepergian ke berbagai negara, sehingga berpotensi membawa penyakit menular antarnegara. Pemeriksaan ICV memastikan mereka telah menerima vaksinasi yang diwajibkan. Pemeriksaan ICV awak kapal dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kedatangan kapal dalam rangka upaya

mencegah masuknya penyakit PHEIC pada awak kapal. Pemeriksaan ICV yang dilakukan meliputi pemeriksaan daftar vaksinasi (vaccination list), pemeriksaan jenis vaksin dan buku ICV, masa kedaluwarsa (expired), dan keaslian buku. Target tercapai dikarenakan aktivitas pelayaran meningkat pasca pandemi. Pemerintah menerapkan kebijakan ketat terhadap kapal yang memasuki wilayahnya, dengan syarat awak kapal memiliki ICV. Target tercapai dikarenakan Aktivitas pelayaran meningkat pasca pandemi, Pemerintah menerapkan kebijakan ketat terhadap kapal yang memasuki wilayahnya, dengan syarat awak kapal memiliki ICV.

2) Jumlah kunjungan poliklinik sebanyak 2.598 orang

Pelayanan kesehatan yang diberikan di poliklinik BBKK selain pelayanan vaksinasi adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan terbatas dan berobat. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pelaut yang akan berlayar untuk mendapatkan surat keterangan pengujian kesehatan. Poliklinik juga memberikan pelayanan bagi masyarakat pelabuhan yang akan berobat. Penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih di lokasi pintu masuk mendorong kunjungan poliklinik tercapai.

3) Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri 454.606 orang

Pemeriksaan ABK adalah bagian dari protokol untuk menjaga kesehatan transportasi dalam negeri. Kegiatan pemeriksaan personil yang dilakukan sama halnya seperti pada pengawasan penumpang yang datang dan berangkat baik luar negeri maupun dalam negeri, yaitu terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermal scanner* serta pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang. Pasca pencabutan pembatasan perjalanan, aktivitas transportasi domestik meningkat signifikan, sehingga pemeriksaan ABK meningkat

4) Jumlah pengawasan penumpang datang dalam negeri sebanyak 475.809 orang

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermal scanner* serta pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 Wilayah Kerja. Pemeriksaan ini dilakukan agar mencegah Penumpang yang datang berisiko membawa penyakit dari daerah lain, terutama di wilayah dengan wabah.

- 5) Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam negeri sebanyak 515.742 orang

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan thermal scanner serta pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan lima Wilayah Kerja. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penumpang yang berangkat dalam kondisi sehat sehingga tidak membawa penyakit ke wilayah lain..

- 6) Jumlah *screening* TB sebanyak 703 orang

TB adalah penyakit menular yang mudah menyebar di tempat dengan kepadatan tinggi, seperti bandara dan pelabuhan. Skrining penyakit TB dilakukan terhadap para pekerja pelabuhan untuk mengetahui gambaran tentang kelompok risiko tinggi serta mendapatkan data yang berhubungan dengan kasus TB. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor, yaitu tenaga dari Puskesmas setempat sebagai pendamping kegiatan di lapangan serta untuk memudahkan koordinasi apabila ditemukan kasus positif. Kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan peningkatan akses screening; pemerintah menyediakan lebih banyak alat deteksi TB di fasilitas kesehatan pintu masuk. Selain itu, kesadaran risiko TB meningkat, dan kampanye kesehatan setelah pandemi menyoroti pentingnya deteksi dini penyakit menular seperti TB..

- 7) Jumlah *screening* HIV sebanyak 873 orang

HIV/AIDS adalah ancaman kesehatan global, dan pelaku perjalanan sering menjadi fokus pemeriksaan karena mobilitasnya. Skrining penyakit HIV dilakukan terhadap para pekerja pelabuhan untuk mengetahui gambaran tentang kelompok risiko tinggi, serta mendapat data yang berhubungan dengan kasus HIV/AIDS. Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor yaitu tenaga dari Puskesmas setempat sebagai pendamping kegiatan di lapangan serta untuk memudahkan koordinasi apabila ditemukan kasus positif. Kampanye pencegahan HIV/AIDS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam *screening*.

Pengawasan jenazah merupakan bagian penting dari pengendalian kesehatan masyarakat di pintu masuk negara, seperti pelabuhan. Jenazah yang diangkut melalui jalur laut (pelabuhan) berpotensi membawa risiko kesehatan,

terutama jika jenazah berasal dari wilayah yang sedang mengalami wabah atau memiliki riwayat penyakit menular. Oleh karena itu, prosedur pengawasan ketat diterapkan untuk memastikan pengangkutan jenazah sesuai standar kesehatan. Kegiatan pengawasan terhadap pengiriman jenazah bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko penyakit menular potensial wabah/KLB yang dapat terjadi melalui pengiriman jenazah, abu jenazah, atau kerangka lintas dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta pemeriksaan dan penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi pengiriman jenazah yang berpotensi menyebarkan penyakit menular. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit menular potensial wabah/PHEIC. Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengiriman jenazah, dapat diidentifikasi apakah ada jenazah yang memiliki penyakit menular, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pengamatan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ). SIAJ merupakan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengangkut jenazah, abu jenazah, atau kerangka lintas dalam negeri maupun luar negeri. Dengan memastikan kelengkapan dokumen dan penerbitan SIAJ, dapat dipastikan bahwa pengiriman jenazah dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit menular.

Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan dapat terdeteksi adanya pengiriman jenazah yang berpotensi menyebarkan penyakit menular, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang tepat. Upaya ini merupakan salah satu bentuk kewaspadaan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular potensial wabah/PHEIC.

Realisasi capaian pemeriksaan barang sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 sebanyak 2. Capaian ini menunjukkan bahwa semua kasus izin angkut jenazah yang diajukan telah diproses sesuai dengan standar dan regulasi. Jumlah izin angkut jenazah cenderung rendah karena jarang terjadi kasus pengangkutan

jenazah yang berisiko tinggi. Hal ini memudahkan petugas untuk memproses setiap izin dengan teliti.

Pengawasan alat angkut di pelabuhan, termasuk pemeriksaan *Certificate of Pratique* (COP) dan Public Health Quarantine Certificate (PHQC), adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Target Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina sebesar 37.990 dengan realisasi sebesar 45.379. Target pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan COP dan PHQC. COP adalah dokumen yang menyatakan bahwa kapal bebas dari penyakit menular dan telah memenuhi semua persyaratan kesehatan sebelum masuk ke pelabuhan.

Proses pengawasan yang dilakukan meliputi

- Pemeriksaan Dokumen: Petugas memverifikasi laporan kesehatan kapal, termasuk riwayat pelabuhan sebelumnya dan catatan kesehatan awak kapal
- Inspeksi Kesehatan Kapal : Melibatkan pengecekan kondisi sanitasi, ventilasi, dan fasilitas kesehatan di atas kapal.

Kegiatan pemeriksaan keberangkatan kapal dan penerbitan dokumen izin berlayar karantina kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance/PHQC*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan faktor risiko penyakit sebelum kapal diperbolehkan berlayar. Proses pengawasan yang dilakukan meliputi Inspeksi Alat Angkut:

- Pemeriksaan sanitasi umum kapal seperti kebersihan ruang muatan, dapur, dan tempat penyimpanan air,
- Pemeriksaan Limbah: Limbah medis atau limbah domestik kapal diperiksa untuk memastikan pembuangan sesuai aturan,
- Verifikasi Vektor Penyakit: Petugas memeriksa adanya keberadaan vektor penyakit seperti tikus atau serangga di kapal.

Dalam hal ini, pemeriksaan keberangkatan kapal dilakukan oleh BBKK untuk menerbitkan dokumen PHQC. Ini berarti bahwa pihak Kesyahbandaran tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan PHQC tersebut, dan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan BBKK. Pemeriksaan keberangkatan kapal melibatkan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen kesehatan kapal. Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen yang diperlukan untuk karantina kesehatan kapal telah dilengkapi dengan benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa kapal

yang berangkat bebas dari masalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) atau faktor risikonya. Jika terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, kapal diwajibkan untuk melengkapi atau memperbaharui dokumen tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ditemukan masalah KKM atau faktor risiko, langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku harus diambil.

Pengawasan keberangkatan kapal yang dilakukan di BBKK Tanjung Priok terdiri dari pengawasan keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas jaga/piket dengan memeriksa dokumen kesehatan kapal dan kesehatan awak kapal. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data dan informasi cakupan pengawasan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri berupa dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC). Hasilnya adalah semua keberangkatan kapal, baik tujuan dalam negeri maupun tujuan luar negeri, dapat diawasi kesehatannya. Pentingnya pengawasan ini dikarenakan:

- Mencegah Penyebaran Penyakit: Kapal dapat menjadi vektor bagi penyakit menular,
- Melindungi Kesehatan Awak dan Penumpang: Pemeriksaan memastikan lingkungan di kapal aman dan sehat.

Di tahun 2024, aktivitas pelayaran internasional dan domestik meningkat signifikan, terutama karena pemulihan ekonomi global. Hal ini meningkatkan jumlah alat angkut yang diawasi.

Pengawasan lingkungan di pelabuhan bertujuan untuk memastikan bahwa area pelabuhan memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan pangan, tempat umum, sanitasi air bersih, pemeriksaan air, dan survei vektor. Total target yang dicapai pada tahun 2024 pada pemeriksaan lingkungan yaitu terlaksananya pemeriksaan sebanyak 1.993 kali dengan rincian pemeriksaan: 249 Tempat-tempat Umum, 489 Tempat Pengelolaan Pangan, 617 Inspeksi sarana air bersih, 392 Air dan 246 hasil survei vektor. Kegiatan ini mencapai target dikarenakan adanya inspeksi berkala terhadap fasilitas di pelabuhan memastikan seluruh target pengawasan lingkungan terpenuhi, Kolaborasi antara BBKK Tanjung priok

otoritas pelabuhan, dan pengelola fasilitas mendukung tercapainya target pengawasan lingkungan dan juga BBKK Tanjung Priok dan pemangku kepentingan lebih berkomitmen terhadap kebersihan pelabuhan

Dari tabel di atas didapatkan hasil persentase capaian pemeriksaan penapisan orang sebesar 119,53%, Pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar karantina sebesar 118,28%, Pemeriksaan barang sebesar 100% dan Pemeriksaan Lingkungan sebesar 116,07%. Kemudian hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Nilai skala Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebagai berikut :

- a) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar mendapatkan nilai skala 5;
- b) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mendapatkan nilai skala 5;
- c) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar mendapatkan nilai skala 3;
- d) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar mendapatkan nilai skala 5.

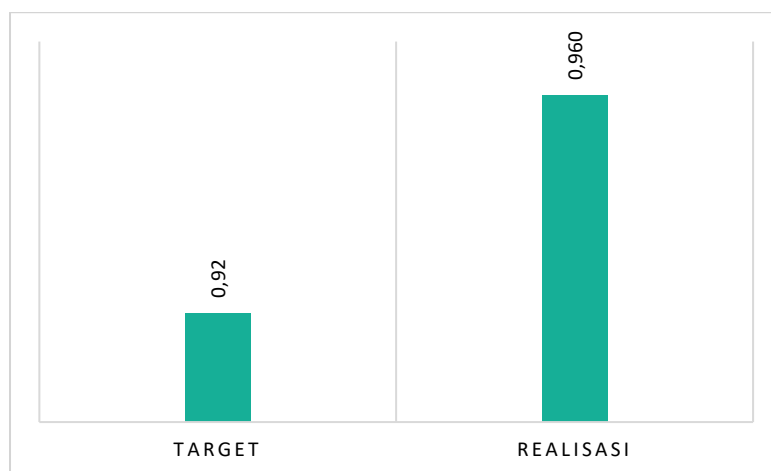
Tabel 3. 5
Nilai Empiris Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	119,53	119,53	600	100	120	600
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	119,42	119,42	591,421	100	120	600
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	100,00	100,00	300	100	120	360
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	116,07	116,07	565,952	100	120	600
TOTAL				2.075,11			2,160	

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{2.075,11}{2.160} \times 100 = 96$$

Indeks ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pengendalian faktor risiko kesehatan di pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). Dengan capaian 104,35%, target yang ditetapkan telah terlampaui, mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam mendeteksi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan. Pencapaian melampaui target juga dikarena implementasi pengawasan yang konsisten dan intensif.

Grafik 3. 1
Realisasi Kinerja Dengan Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2024



Dari grafik 3.1 Realisasi sebesar 104,35% menunjukkan bahwa program pengendalian faktor risiko berhasil secara optimal, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan efektivitas strategi dan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan faktor risiko. Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Strategi merupakan factor yang mempengaruhi pencapaian indikator melalui Proses evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program memungkinkan identifikasi kendala serta perbaikan langkah strategis secara cepat. Manfaat dari pencapaian target ini yaitu Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa pelabuhan, Menjamin keamanan dan keselamatan aktivitas di pelabuhan dan Menekan kemungkinan kejadian insiden akibat risiko lingkungan atau operasional.

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2020	2021	2022		2023		2024	
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN								

Indikator		2020	2021	2022		2023		2024	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pemeriksaan penapisan orang		687.846	51.386	919.100	1.106.982	991.824	1.309.612	1.285.668	1.536.751
a.	Jumlah pemeriksaan ICV awak kapal	8.337	65	666	72.309	67.760	73.067	75.744	86.420
b.	Jumlah Kunjungan Poliklinik (Selain Penumpang)	1.436	960	24	243	1.644	2.341	2.280	2.598
c.	Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri	40.746	335	4.155	458.601	444.600	445.533	394.644	454.606
d.	Jumlah pengawasan penumpang datang dalam negeri	110.201	80	2.166	264.101	238.260	367.016	388.000	475.809
e.	Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam negeri	159.149	90	2.166	307.966	238.260	420.355	423.600	515.742
f.	Jumlah screening TB	563	700	700	700	600	600	700	703
g.	Jumlah screening HIV AIDS	700	700	700	875	700	700	700	873
Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina		45.187	45.917	41.497	46.419	38.000	44.948	37.990	45.379
a.	Certificate Of Pratique	2.807	2.923	2.968	3.546	2.950	3.432	2.904	3.579
b.	PHQC	4.238	42.994	38.529	42.873	35.050	41.516	35.086	41.800
Pemeriksaan Barang		-	-	-	-	1	1	2	2
a.	Izin Angkut Jenazah	-	-	-	-	1	1	2	2
Pemeriksaan Lingkungan		1.985	1.952	2.048	2.048	2.100	2.377	1.717	1.993

Indikator		2020	2021	2022		2023		2024	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a.	Tempat Pengelolaan Pangan	390	280	334	334	360	511	387	489
b.	Tempat-tempat Umum	78	136	166	166	240	246	200	249
c.	Inspeksi Sanitasi Penyehatan Air Bersih	636	600	612	612	576	696	500	617
d.	Pemeriksaan Air	396	396	396	396	384	384	384	392
e.	Rekap Hasil Survei Vektor	485	540	540	540	540	540	246	246
	Nilai Indeks			0,9	0,9	0,91	0,95	0,92	0,96

Dapat dilihat di tabel terjadi peningkatan capaian indeks pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2021-2023. Adapun penjelasan setiap parameter dan perbandingan data setiap tahun sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Penapisan Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemeriksaan penapisan orang pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan signifikan pada jumlah total pemeriksaan penapisan orang dari tahun ke tahun. Ini menandakan adanya peningkatan kesadaran dan upaya proaktif dalam mencegah penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya. Kenaikan jumlah pemeriksaan ICV awak kapal sampai tahun 2024 menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan para pekerja di sektor maritim. Hal ini penting mengingat mobilitas tinggi para awak kapal yang berpotensi membawa berbagai penyakit.

Peningkatan kunjungan poliklinik selain penumpang mengindikasikan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan di pelabuhan, dan PLBDN oleh masyarakat sekitar atau pihak-pihak terkait lainnya.

Kenaikan penumpang datang dan berangkat meningkat drastis pada tahun 2024, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas perjalanan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan ikut meningkat. Selain itu, Pemulihan sektor pariwisata dan bisnis setelah pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan jumlah penumpang.

Meskipun jumlah pemeriksaan secara keseluruhan meningkat, jumlah pemeriksaan untuk screening TB dan HIV/AIDS cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa program pencegahan dan pengendalian kedua penyakit ini telah berjalan efektif.

b) Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina

Dari data yang disajikan, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah pemeriksaan alat angkut dan penerbitan sertifikat selama periode 2020-2024. Alat angkut merupakan salah satu sarana utama penyebaran penyakit dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pemeriksaan alat angkut merupakan langkah penting dalam mencegah masuknya penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, secara umum, terdapat beberapa tren yang dapat disimpulkan: Peningkatan Awal: Pada awal periode (2020-2021), jumlah pemeriksaan cenderung meningkat. Hal ini mungkin terkait dengan peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman kesehatan global, termasuk pandemi COVID-19. Penurunan Sementara: Setelah periode peningkatan awal, terjadi penurunan jumlah pemeriksaan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pelonggaran pembatasan akibat penurunan kasus COVID-19 atau adanya penyesuaian kebijakan. Peningkatan Kembali: Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah pemeriksaan kembali meningkat. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang, kemungkinan sebagai respons terhadap munculnya ancaman kesehatan baru atau perubahan dalam regulasi internasional. Pemeriksaan alat angkut pada tahun 2024 sebesar 45.379. Realisasi pemeriksaan alat angkut mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya dikarenakan sudah memasuki tahun politik.

c) Pemeriksaan Barang

Pada tahun 2024 terdapat 2 pemeriksaan faktor risiko pada barang di BBKK Tanjung Priok

d) Pemeriksaan Lingkungan

Terjadi peningkatan realisasi Tempat-tempat Umum (TTU) pada tahun 2024 dikarenakan pada indikator TTU ada penambahan gedung bangunan yang telah diperiksa dan penambahan intensitas pemeriksaan yang tadinya 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali pemeriksaan dalam setahun.

Untuk Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terjadi peningkatan dikarenakan adanya pengawasan *leveransir/suplai* bahan makanan yang termasuk dalam indikator pengawasan TPP. Inspeksi Kesehatan Lingkungan sarana penyediaan air bersih (IKLSPAB) meningkat jumlahnya karena adanya penambahan pengawasan di setiap hidran yang ada di sepanjang kolam Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air Bersih, menurun dikarenakan di wilayah kerja selain Tanjung Priok adanya sarana pengelolaan PAB yang telah tutup atau sedang dalam renovasi pada bangunan yang dipakai. Selain itu, untuk survei vektor tetap seperti tahun sebelumnya tidak ada perubahan.

Secara umum, data menunjukkan fluktuasi dalam jumlah pemeriksaan lingkungan dari tahun ke tahun. Namun, terdapat tren yang dapat disimpulkan: pemeriksaan rekap hasil survei vektor menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini mungkin terkait dengan adanya kejadian luar biasa atau perubahan musim yang mempengaruhi populasi vektor.

Kinerja indeks pengendalian faktor risiko mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, terlihat adanya upaya untuk meningkatkan kinerja indeks pengendalian faktor risiko. Perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi terkait pengendalian faktor risiko dapat berdampak signifikan pada capaian kinerja. Kebijakan yang lebih ketat atau relaksasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas pengendalian. Pandemi atau krisis ekonomi dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan menyebabkan penurunan kinerja. Tahun 2022 : Capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai

target yang telah ditetapkan pandemi. Fluktuasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor transportasi dan logistik. Tahun 2023: Terjadi peningkatan yang signifikan pada capaian kinerja tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program pengendalian risiko. Tahun 2024: Capaian kinerja tahun 2024 kembali meningkat dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Revisi ke-5. Artinya tahun 2024 merupakan tahun penilaian kinerja RAK apakah indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik atau tidak tercapai.

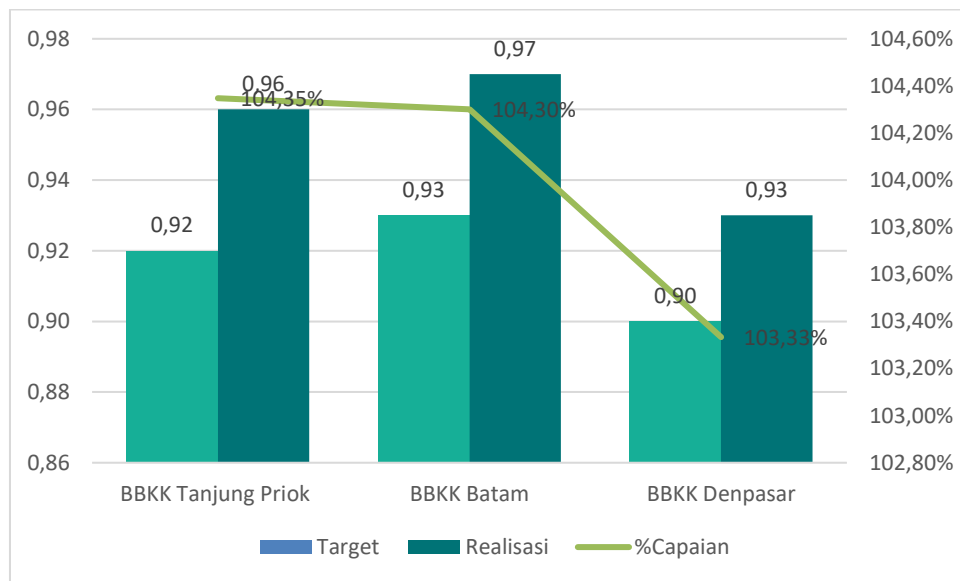
Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target indikator yang dihasilkan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yaitu berjumlah 2,73. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan yang dihasilkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dengan jumlah total 2,81.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah terhadap realisasi sampai dengan tahun 2024, maka capaiannya adalah sebesar $2,81/2,73 \times 100\% = 102,93\%$. Dengan tingkat capaian tersebut, hingga tahun 2024, kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah sebesar 2,93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja BBKK Tanjung Priok telah melampaui target kinerja jangka menengah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diartikan bahwa BBKK Tanjung Priok telah mencapai bahkan melampaui target perencanaan jangka menengah (RAK 2020-2024) dengan capaian melebihi 100%.

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024, tidak terdapat indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2024. Namun, indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

Grafik 3. 2
Perbandingan Target dan Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Tanjung Priok Dengan
BBKK Denpasar, dan BBKK Batam Tahun 2024



Capaian BBKK Denpasar pada indikator pertama yaitu 103,33%, sedangkan BBKK Batam 104,30%. Berdasarkan grafik yang Anda berikan, terlihat adanya perbedaan capaian indeks deteksi faktor risiko antara BBKK Tanjung Priok, Batam, dan Denpasar. Persentase capaian Tanjung Priok lebih tinggi dari persentase capaian BBKK lainnya. Perbedaan realisasi kinerja antara masing-masing BBKK berbeda-beda dikarenakan perbedaan target dan realisasi. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karakteristik wilayah: volume lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia tentu memiliki volume lalu lintas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelabuhan di Batam atau Denpasar. Selain itu, terdapat faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional pelabuhan dan bandara. Peningkatan volume pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja indeks deteksi faktor risiko, dan kejadian luar biasa seperti wabah penyakit atau bencana alam dapat menyebabkan peningkatan risiko serta membutuhkan penyesuaian strategi pengawasan.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- Melakukan sosialisasi target kegiatan pengawasan orang, alat angkut,

- barang dan lingkungan seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan target dan realisasi kinerja secara berkala melalui laporan rutin yang berisi tentang saran dan rekomendasi perbaikannya.
 - c) Melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas kesehatan lingkungan dengan kegiatan inspeksi sanitasi alat angkut, tempat-tempat umum, dan pemeriksaan kualitas air bersih/minum, kualitas makanan, serta pencemaran lingkungan
 - d) Menerbitkan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lingkungan kepada lintas sektor.
 - e) Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana aksi kegiatan terhadap capaian target kegiatan secara berkala melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
 - f) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru Pada 18 Desember 2024 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru 2025 (48 Peserta). Koordinasi evaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru dengan lintas program dan lintas sektor dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan
 - g) Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan VCT Mobile dan Deteksi Dini Terduga TB. Koordinasi kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 dan Evaluasi pada tanggal 26 Oktober 2023
 - h) Meningkatkan kewaspadaan dini melalui pengamatan pada website WHO terhadap wilayah/negara terjangkit KKMD/PHEIC
 - i) Melakukan penyesuaian sesuai SOP Pengawasan Kapal dalam Karantina sesuai dengan Permenkes terbaru
 - j) Melakukan Koordinasi Penggunaan Website SINKARKES dalam rangka Penerbitan Buku ICV di Klinik dan Rumah Sakit. pada tanggal 02 Februari 2024 dan 25 s.d 27 September 2024 sehingga Memperkuat jejaring antara klinik dan RS Pelaksana Vaksinasi Internasional dengan BBKK Tanjung Priok
 - k) Melakukan Verifikasi dan Pengawasan Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV
 - l) Melakukan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus dengan membuat surat kepala kantor No

HK.02.03/C.IX.5/8808/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kesehatan pada situasi khusus natal dan Tahun Baru 2025

- m) Melaksanakan/penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi
- n) Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan
- o) Mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk mengintegrasikan melalui Sistem Satu Data (SABATA)
- p) Melakukan Pengawasan Faktor Risiko TB dan HIV/AIDS
- q) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Pelatihan Deteksi Dini dalam rangka Surveilans Vektor, Binatang Pembawa Penyakit
- r) Workshop Pemeliharaan Alat Pengawasan kesehatan Lingkungan, Orientasi Kader Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit (PVBPP) di Wilayah BBKK Tanjung Priok, On the Job Training Pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Wabah, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Bidang Epidemiologi dan Karantina, On the job training digitalisasi data surveilans

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

- a) Sosialisasi Target yang Jelas dan Terarah

Sosialisasi target kegiatan pengawasan sejak awal tahun anggaran memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh pihak terkait. Hal ini meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga efektivitas pengawasan alatangkut, orang barang dan lingkungan

- b) Monitoring dan Evaluasi Berkala

Evaluasi kinerja secara rutin (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) memungkinkan identifikasi cepat terhadap kendala yang dihadapi. Saran dan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi membantu perbaikan dan penyempurnaan strategi pengawasan.

- c) Pengawasan Rutin terhadap Kualitas Kesehatan Lingkungan

Inspeksi sanitasi alat angkut, tempat umum, dan pemeriksaan kualitas air, makanan, serta pencemaran lingkungan memastikan deteksi dini terhadap risiko kesehatan. Rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan lingkungan meningkatkan pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lingkungan.

d) Koordinasi dan Evaluasi dalam Situasi Khusus

Koordinasi pelayanan kesehatan dalam situasi khusus (Idul Fitri dan Nataru) memungkinkan kesiapan layanan kesehatan yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan memberikan umpan balik untuk peningkatan pelayanan pada masa mendatang.

e) Deteksi Dini Melalui VCT Mobile dan Pengawasan TB/HIV/AIDS

Pelaksanaan deteksi dini terhadap TB dan HIV/AIDS melalui VCT Mobile mempercepat penemuan kasus dan pengobatan lebih awal. Pengawasan faktor risiko TB dan HIV/AIDS di wilayah kerja mengurangi potensi penyebaran penyakit.

f) Peningkatan Kewaspadaan Dini dengan Pengamatan Wilayah Terjangkit KKMD/PHEIC

Pemantauan informasi dari WHO meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi wabah penyakit menular. Langkah ini mempercepat tindakan preventif dalam menghadapi ancaman kesehatan global.

g) Penerapan SOP Terbaru dan Digitalisasi Proses Karantina Kesehatan

Penyesuaian SOP pengawasan kapal dalam karantina sesuai regulasi terbaru meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan internasional. Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti SINKARKES dan SABATA mempercepat penerbitan dokumen kekarantinaan serta meningkatkan akurasi data.

h) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Workshop

Pelatihan pegawai dalam deteksi dini vektor penyakit dan epidemiologi memperkuat kemampuan dalam surveilans dan pengendalian wabah. Workshop pemeliharaan alat pengawasan kesehatan lingkungan meningkatkan keandalan peralatan yang digunakan dalam inspeksi.

i) Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait HIV dan AIDS

Sosialisasi, edukasi dan promosi kesehatan tentang HIV dan AIDS kepada ABK, Masyarakat disekitar pelabuhan . Selain itu juga dilakukan sosialisasi program HIV dan AIDS di masyarakat melalui germas bersama stakeholder dan pembuatan atau pembaharuan media KI

7. Kendala/Masalah yang dihadapi

- a) Risiko tinggi bagi petugas pemeriksa kapal di laut akibat cuaca buruk yang dapat menghambat efektivitas pengawasan kesehatan kapal.
- b) Keterbatasan tenaga kerja di beberapa wilayah kerja, menyebabkan beban kerja berlebihan bagi petugas yang ada dan menurunkan efektivitas pengawasan.
- c) Terbatasnya peralatan pendukung pengawasan kapal dalam karantina, khususnya di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok, yang berdampak pada kurang optimalnya deteksi faktor risiko kesehatan.
- d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan HIV akibat stigma sosial yang masih kuat serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya deteksi dini.
- e) Kurangnya sistem pemantauan dan integrasi data secara real-time yang menghambat efektivitas pelaporan dan respons cepat terhadap temuan faktor risiko kesehatan.
- f) Belum optimalnya digitalisasi dalam penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan, sehingga masih ada kendala dalam efisiensi layanan dan akurasi data.
- g) Peningkatan mobilitas global dan risiko masuknya penyakit menular baru (*emerging infectious diseases*) yang membutuhkan kesiapan lebih tinggi dalam deteksi dan respons cepat.

8. Usul Pemecahan masalah

- a) Penyesuaian strategi pemeriksaan kapal dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, termasuk penentuan lokasi alternatif dan metode pemeriksaan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi.
- b) Penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS, PPPK, dan mutasi internal, serta optimalisasi distribusi tenaga kesehatan ke wilayah yang mengalami kekurangan.
- c) Pengadaan alat pengawasan secara bertahap dalam rencana anggaran 2023–2025, termasuk alat deteksi kesehatan lingkungan dan peralatan inspeksi kapal yang lebih modern.
- d) Peningkatan kampanye dan edukasi deteksi dini HIV/AIDS, serta integrasi pemeriksaan HIV dengan pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat.

- e) Pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk integrasi data surveilans faktor risiko kesehatan di pelabuhan/bandara/PLBDN, termasuk sistem peringatan dini
- f) Digitalisasi penuh dalam penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan, termasuk optimalisasi sistem SINKARKES dan SABATA, untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di pelabuhan dan bandara.
- g) Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap emerging infectious diseases melalui pemantauan global berbasis WHO, peningkatan kapasitas laboratorium deteksi penyakit, serta penyediaan protokol penanganan cepat terhadap penyakit yang berpotensi masuk melalui pintu kedatangan internasional.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp2.539.739.000 untuk memenuhi target indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp2.507.693.870 (98,74%). Dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 104,35%, dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensi anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak Rp32.045.130. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, dan juga berasal dari sisa transport yang dibayarkan at cost.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB). Setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level output RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi adalah dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran; kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AARO_i : Alokasi Anggaran
RARO_i : Realisasi Anggaran
CRO_i : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN. BBKK Tanjung Priok mencapai efisiensi capaian kinerjanya sebesar 63%. Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 64%.. Dengan anggaran 98,74%, dapat mencapai kinerja 104,35%.

Selain efisiensi terhadap anggaran dan kinerja, BBKK Tanjung Priok melakukan efisiensi terhadap sumber daya manusia, di antaranya memberdayakan semua sumber daya untuk melaksanakan kegiatan (melibatkan timker lain).

Indikator kedua
Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

a) Pengertian

Indikator faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan merupakan indikator yang memberikan gambaran upaya pengendalian yang dilakukan terhadap faktor risiko yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sebagai berikut:

a) Faktor Risiko Orang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan orang yaitu:

- 1) Penumpang dengan suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$
- 2) Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan vaksinasi Covid-19 tidak lengkap
- 3) Penumpang positif Covid-19
- 4) HIV positif
- 5) TB positif
- 6) Penumpang atau ABK dengan penyakit berpotensi menularkan wabah
- 7) Pengobatan atau penanganan gawat darurat

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- a) Melakukan isolasi sementara dan penyelidikan epidemiologi bagi penumpang yang dicurigai mengidap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah
- b) Merujuk penumpang yang sakit, memiliki suhu tinggi ($>37,5^{\circ}\text{C}$), dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut ke rumah sakit
- c) Menolak keberangkatan atau menolak masuk penumpang yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d) Melakukan vaksinasi meningitis dan yellow fever bagi calon pelaku perjalanan yang akan berangkat ke daerah endemis meningitis atau yellow fever
- e) Melakukan pengobatan atau penanganan gawat darurat
- f) Menerbitkan izin angkut orang sakit

- g) Memberikan rekomendasi perjalanan (clearance)
- b) Faktor Risiko pada alat angkut
- 1) Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan alat angkut yaitu:
Ditemukan vektor, kecoak, tikus, lalat, nyamuk
 - 2) Mengangkut penumpang sakit berpotensi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) atau datang dari negara terjangkit penyakit KKM
 - 3) Tidak terdapat obat dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
 - 4) Air tercemar/terkontaminasi
- Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :
- 1) Disinfeksi atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan untuk menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan penyakit.
 - 2) Disinseksi atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan serangga di dalam kapal laut.
 - 3) Deratisasi/fumigasi atau tindakan pengendalian atau hapus tikus yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan tikus di dalam kapal laut.
- c) Faktor Risiko Barang
- Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan barang yaitu jenazah dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap salah satunya yaitu pernyataan telah dilakukan *embalming* (pengawetan jenazah). Jika persyaratan belum lengkap maka dilakukan penundaan atau penolakan keberangkatan.
- d) Faktor Risiko Lingkungan
- Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan lingkungan yaitu:
- 1) Tempat-Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
 - 2) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

- 3) Kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 4) Indeks vektor yang tinggi sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan antara lain :

- 1) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan kepada pihak penyelenggara Tempat-tempat umum, Tempat Pengolahan Pangan, dan Sarana Air Bersih.
- 2) *Fogging* untuk mengendalikan keberadaan nyamuk dewasa
- 3) *Larvasidasi* untuk mengendalikan keberadaan jentik
- 4) *Spraying* untuk mengendalikan kepadatan lalat
- 5) *Baiting* untuk mengendalikan kepadatan kecoak

Outcome dari indikator ini adalah meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan

b) Definisi Operasional

Definisi operasional indikator ini yaitu faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun. *Outcome* dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

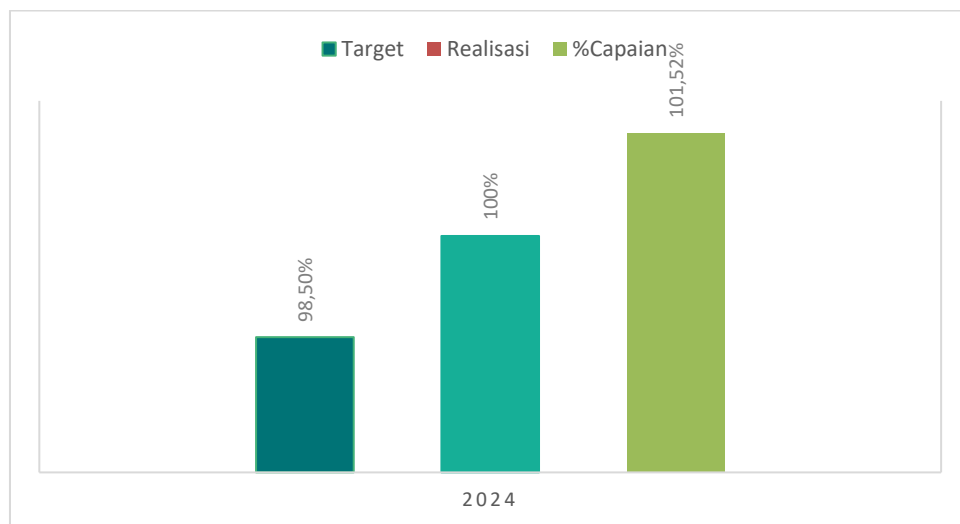
c) Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

$$= \frac{\text{Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan}}{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan}} \times 100\%$$

d) Capaian Kinerja

Grafik 3. 3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2024



Target indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 98,5%. Adapun Realisasi indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada tahun 2024 sebesar 100% sedangkan capaian realisasi untuk indikator ini sebesar 101,52 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Faktor Persentase Faktor Risiko Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2024

No	Faktor Risiko	Jumlah Faktor risiko yang Ditemukan	Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan	%Capaian
A	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	11,976	11,976	100
	Pertolongan gawat darurat	1	1	
	Rujukan	1	1	
	Isolasi	0	0	

No	Faktor Risiko	Jumlah Faktor risiko yang Ditemukan	Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan	%Capaian
	Vaksinasi (tidak termasuk covid)	11,956	11,956	
	Izin angkut orang sakit	15	15	
	Rekomendasi perjalanan <i>clearance</i>	0	0	
	HIV	2	2	
	TB	1	1	
B	Faktor Risiko Alat Angkut	128	128	100
	Jumlah alat angkut yang berisiko kesehatan (SSCC)	117	117	
	Surat Bebas Karantina Kapal	11	11	
	<i>Sailing Permit</i>	0	0	
C	Pemeriksaan Barang	0	0	
	Jenazah Tidak Berangkat	0	0	
D	Pemeriksaan Lingkungan	80	80	100
	Tempat Pengelolaan Makanan	5	5	
	Tempat Tempat Umum	0	0	
	Air yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat	27	27	
	Tindakan Pengendalian Vektor	48	48	
	Total	12,184	12,184	100

Berdasarkan nilai yang di capai tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua faktor risiko yang ditemukan telah dikendalikan. Jika dibandingkan dengan target 98,5%, maka persen capaian indikator ini telah melebihi target 101,52%.

Rincian capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang
 - a. Pertolongan gawat darurat ada 1 kasus.
 - b. Kegiatan rujukan ada 1 kasus
 - c. Isolasi belum ada kasus kejadian

Meskipun tidak ada kasus isolasi dan rekomendasi perjalanan *clearance*, penting untuk tetap memantau dan mengembangkan strategi untuk situasi yang mungkin muncul di masa depan.

- d. Capaian vaksinasi terdiri dari vaksinasi Yellow Fever sebanyak 5.834 orang, vaksinasi Meningitis sebanyak 5.772 orang, vaksinasi Typhoid sebanyak 250 orang dan vaksinasi Influenza sebanyak 100 orang. Vaksinasi yang dilakukan juga menunjukkan angka yang signifikan, yang merupakan langkah proaktif dalam menjaga kesehatan masyarakat Tingginya capaian vaksinasi menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga kesehatan masyarakat di pintu masuk negara.
 - e. Izin angkut orang sakit sebanyak 15 orang. Ijin angkut orang sakit diberikan dengan mempertimbangkan kondisi medis dari calon penumpang selama melakukan perjalanan ke bandara/pelabuhan tujuan. Selain itu juga terdapat pertimbangan lain seperti kompetensi pendamping calon penumpang yang sakit tersebut, peralatan medis yang dibutuhkan saat perjalanan, dan juga jenis penyakit menular atau tidak.
 - f. Pemberian Rekomendasi Perjalanan Clearance belum ada.
 - g. Berdasarkan hasil screening TB ditemukan positif TB 2 orang.
Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan survei faktor risiko penyakit TB dengan 703 orang yang di *screening* TB. Dari 703 orang yang di *screening* TB ada 2 orang yang reaktif TB dan dirujuk ke Puskesmas Tanjung Priok dan Puskesmas Penjaringan. Langkah ini penting untuk mencegah penularan penyakit TB di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok
 - h. Berdasarkan hasil screening HIV ditemukan positif HIV 1 orang.
Skrining penyakit HIV dilakukan terhadap para pekerja pelabuhan untuk mengetahui gambaran tentang kelompok risiko tinggi, serta mendapat data yang berhubungan dengan kasus HIV/AIDS. Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor yaitu tenaga dari Puskesmas setempat sebagai pendamping kegiatan di lapangan serta untuk memudahkan koordinasi apabila ditemukan kasus positif. Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan survei faktor risiko penyakit HIV dengan 873 orang yang di *screening* HIV. Dari 873 orang yang di *screening* HIV ada 1 orang yang reaktif HIV dan sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Cilincing.
2. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

Pengendalian risiko pada alat angkut dilakukan terhadap faktor risiko yang ditemukan di alat angkut (kapal). Selama tahun 2023 telah ditemukan 128 faktor risiko di alat angkut kapal dan telah dilakukan tindakan pengendalian sebesar 100%.

3. Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang

Tidak ditemukan faktor risiko barang pada jenazah yang keluar dari Pelabuhan dengan menggunakan kapal laut selama tahun 2024.

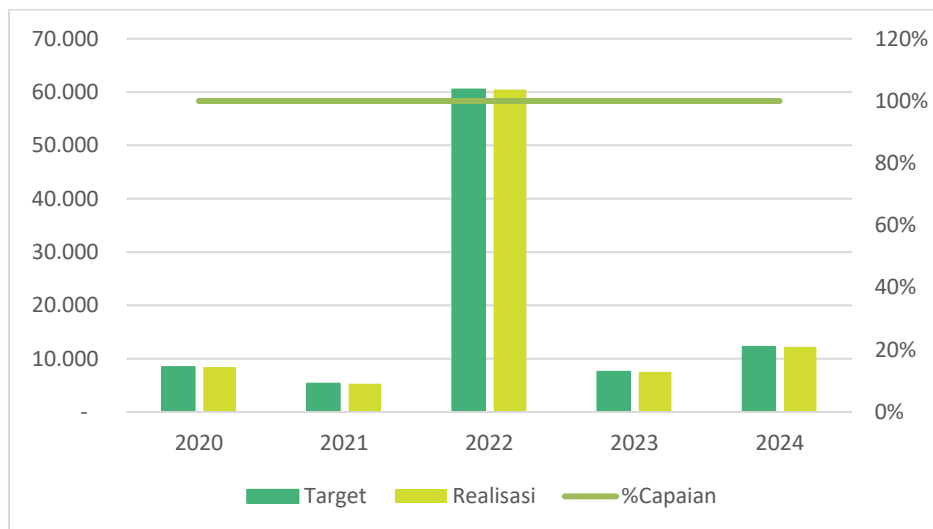
4. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPP, Air dan Vektor)

Faktor risiko yang ditemukan dari seluruh kegiatan pemeriksaan lingkungan mencapai 80 faktor risiko. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100% telah dikendalikan. Rincian faktor risiko dan tindakan pengendalian sebagai berikut:

- a) Dari hasil pemeriksaan kualitas air bersih/minum secara kimiawi dan bakteriologis ditemukan 27 sampel yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil tersebut telah direkomendasikan kepada pihak pengelola sarana penyediaan air bersih/minum untuk melakukan rekomendasi yang diperlukan. Setelah diberikan rekomendasi, dilakukan uji lab kembali hasilnya memenuhi syarat kesehatan.
- b) Dari hasil pemeriksaan kualitas makanan dan usap alat masih ditemukan 5 sampel yang tidak memenuhi syarat secara bakteriologis. Rekomendasi serta saran perbaikan untuk mencegah risiko penularan penyakit telah diberikan kepada pengelola TPP;
- c) Dari hasil pemeriksaan kualitas tempat-tempat umum tidak ditemukan tempat-tempat umum yang tidak memenuhi syarat;
- d) Dari hasil pemeriksaan Tindakan pengendalian vektor ditemukan 48 sampel yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil tersebut telah direkomendasikan kepada pihak pengelola untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pengendalian risiko pada alat angkut dan lingkungan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan semua faktor risiko yang ditemukan telah dikendalikan. Ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pihak berwenang dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah potensi risiko kesehatan yang dapat muncul dari aktivitas pelabuhan.

Grafik 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Upaya pengendalian faktor risiko di Pelabuhan Tanjung Priok telah dilakukan dengan baik, dengan capaian 100% pada semua kategori yang diperiksa. Hal ini menunjukkan efektivitas program kesehatan masyarakat yang diterapkan.

Terjadi Perubahan cara perhitungan sub indikator pada tahun 2022, sehingga data realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, Pelaksanaan kegiatan ini tetap dilakukan. Pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan data yang sangat signifikan terhadap faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dikarenakan :

1. Pandemi COVID-19: Pada tahun 2020 dan 2021, awal pandemi COVID-19 terjadi pembatasan perjalanan yang mengakibatkan menurunnya jumlah pelaku perjalanan. Hal ini berdampak langsung pada jumlah pengendalian faktor risiko yang dikendalikan pada orang, yang mengalami penurunan signifikan.
2. Pada tahun 2022, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) melalui surat nomor SR.03.04/II/446/2022 tanggal 31 Januari 2022, sebagai penanggung jawab penanganan kesehatan di fasilitas karantina terpusat Rusun Nagrak. Penunjukan ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengendalian faktor risiko yang dikendalikan pada orang di BBKK Tanjung Priok.

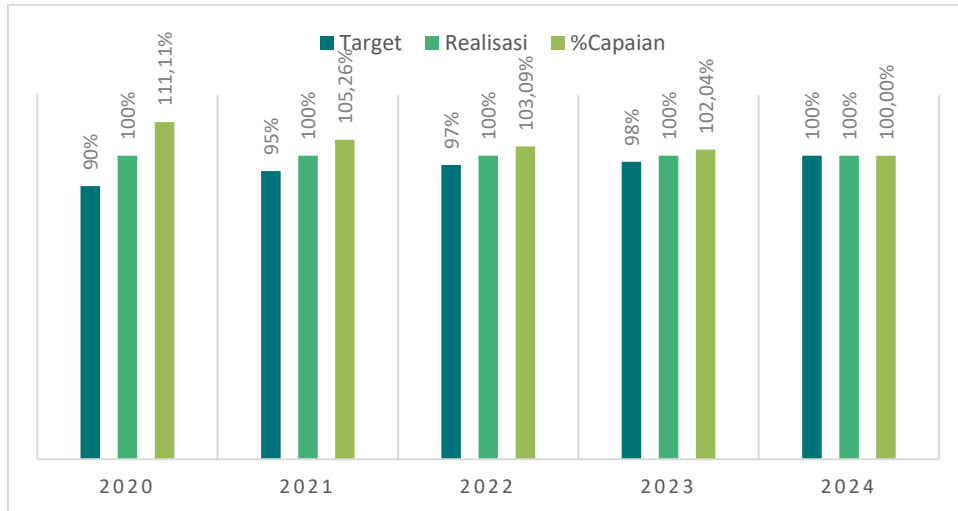
3. Terjadi penurunan kasus COVID-19 yang signifikan pada tahun 2023, sehingga jumlah pengendalian faktor risiko yang dikendalikan pada orang menurun drastis. Hal ini ditandai dengan pencabutan status pandemi melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Proyeksi Tahun 2024
Dengan tidak adanya status pandemi, pengendalian faktor risiko kemungkinan akan lebih terfokus pada penyakit menular lain serta pemantauan faktor risiko lingkungan. Upaya vaksinasi dan karantina tetap penting, terutama dalam menghadapi risiko penyakit lintas negara seperti meningitis dan demam berdarah. Peningkatan inspeksi terhadap alat angkut, barang, dan lingkungan akan menjadi aspek utama dalam strategi pengendalian.

Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan berbagai upaya seperti dalam pemeriksaan faktor risiko pada orang melalui pemberian rujukan, vaksinasi meningitis pada calon jemaah, pertolongan gawat darurat, karantina terhadap kasus positif penyakit menular, dan pemberian *clearance* bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah menunjukkan hasil test PCR negatif. Pengendalian faktor risiko alat angkut dilakukan dengan disinfeksi, disinfeksi, fumigasi, penetapan kapal dalam karantina terhadap kapal yang membawa penumpang dengan penyakit menular kekarantinaan. Pengendalian faktor risiko lingkungan dilakukan dengan cara penyehatan TTU, TPP, kegiatan Pengendalian vektor dan kegiatan pemeriksaan air.

Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan respons yang adaptif terhadap situasi kesehatan masyarakat yang dinamis. Perubahan dalam cara perhitungan sub-indikator juga mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan metode evaluasi dengan kondisi yang berubah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik terlihat perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, yang memberikan gambaran jelas tentang target dan realisasi capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2024.

Dengan analisis di atas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kinerja pengendalian faktor risiko di Pelabuhan Tanjung Priok serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah tantangan yang ada

Tantangan dan Rekomendasi di tahun 2024 diantaranya :

- a) Adaptasi terhadap Normal Baru: Setelah pandemi, strategi pengendalian harus lebih bersifat preventif daripada responsif.
- b) Penguatan Infrastruktur Pengawasan: Dengan meningkatnya kembali aktivitas perjalanan internasional, perlu ada peningkatan fasilitas deteksi dini dan respons cepat di pintu masuk.
- c) Evaluasi Metode Pengukuran: Perubahan dalam perhitungan sub-indikator harus diikuti dengan peningkatan sistem pelaporan agar tren jangka panjang tetap dapat dianalisis secara akurat.

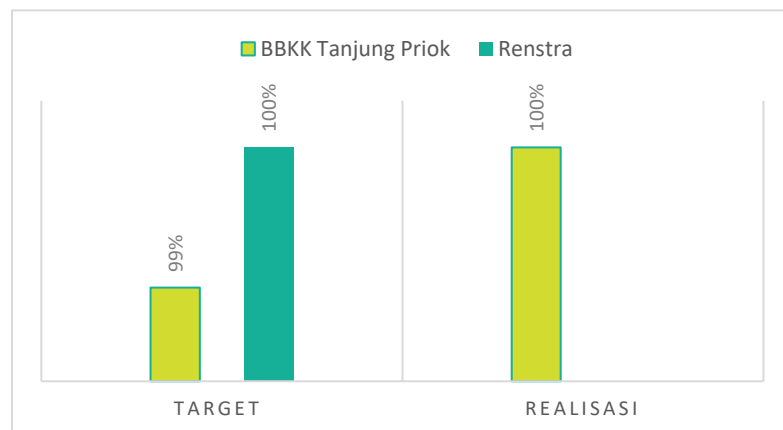
Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Revisi ke-5. Artinya tahun 2024

merupakan tahun penilaian kinerja RAK apakah indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik atau tidak tercapai.

Target jangka menengah yaitu berjumlah 97%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah terhadap realisasi sampai dengan tahun 2024 maka capaiannya yaitu sebesar $100/97 \times 100\% = 103,09\%$. Dengan tingkat capaian tersebut hingga tahun 2024 kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah sebesar 3,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja BBKK Tanjung Priok telah melampaui target kinerja jangka menengah.

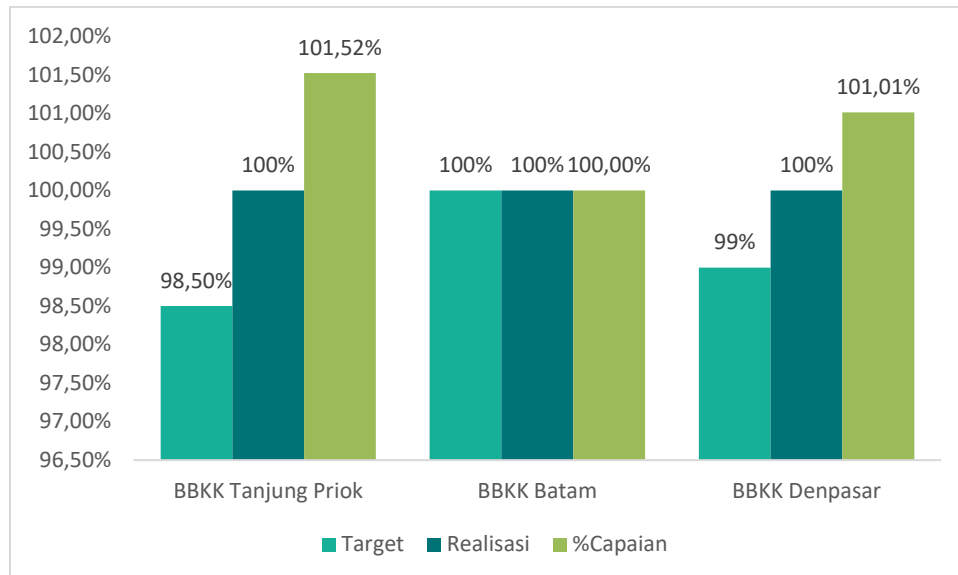
Berdasarkan analisis di atas, dapat diartikan bahwa BBKK Tanjung Priok dapat mencapai bahkan telah melampaui target perencanaan jangka menengah (RAK 2020-2024) dengan capaian melebihi 100% untuk indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Grafik 3. 6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024



Capaian BBKK Tanjung Priok pada indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk telah melebihi target indikator yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024, yaitu 100%. Dengan mencapai 100%, BBKK Tanjung Priok telah berkontribusi signifikan dalam pencapaian target secara nasional, menunjukkan bahwa upaya pengendalian risiko di pelabuhan ini sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan.

Grafik 3. 7
Perbandingan Target Dan Capaian Persentase Faktor Risiko Penyakit di
Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan
Lingkungan BBKK Tanjung Priok Dengan, BBKK Denpasar, dan BBKK
Batam Tahun 2024



Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa target, realisasi, dan persentase capaian BBKK Tanjung Priok lebih tinggi dibandingkan BBKK lainnya. Hal ini disebabkan oleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam pengendalian faktor risiko yang dilakukan oleh BBKK Tanjung Priok.

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa persentase capaian BBKK Tanjung Priok lebih tinggi dibandingkan BBKK Denpasar dan BBKK Batam, menunjukkan bahwa strategi dan langkah-langkah pengendalian yang diterapkan lebih optimal dalam mencapai target nasional.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian risiko yang ditemukan di BBKK Tanjung Priok yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran.
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target kegiatan. Evaluasi ini berperan dalam menilai efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pengendalian faktor risiko serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

- c) Melaksanakan Pelatihan Fogging Treatment: Pengenalan, Perawatan dan Aplikasi yang Baik dan Benar guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengendalian vektor penyakit secara efektif.
- d) Melaksanakan Koordinasi Service Level Agreement Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Kapal pada Percepatan Integrasi dan Kolaborasi Antar BKK
- e) Melaksanakan inspeksi sanitasi di tempat-tempat umum, gedung, bangunan, dan perusahaan di pelabuhan serta bandar udara. Hasil pemeriksaan yang kurang memenuhi standar akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan diseminasi informasi terkait perbaikan sanitasi.
- f) Melakukan Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum, gedung, bangunan dan perusahaan di pelabuhan dan bandar udara, serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi sanitasi tempat-tempat umum;
- g) Melakukan inspeksi sanitasi di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di pelabuhan dan bandar udara serta memberikan saran perbaikan terkait kelengkapan administrasi dan teknis agar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
- h) Melakukan Pencegahan dan penanggulangan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu di pintu masuk negara dan wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan;
- i) Melaksanakan pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam rangka pengendalian nyamuk di wilayah pelabuhan melalui metode visual dan pemasangan ovitrap. Fogging akan dilakukan apabila indeks jentik tinggi atau dalam situasi khusus yang memerlukan tindakan segera.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan

Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan memenuhi target sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator ini karena :

- a) Target tahun 2024 dapat tercapai karena adanya pembinaan dan upaya perbaikan secara berkelanjutan, termasuk pemberian saran dan

rekomendasi terhadap sanitasi sarana Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), kualitas air, serta pengendalian vektor yang tidak memenuhi standar kesehatan.

- b) Keberhasilan dalam pelaksanaan tindakan penyehatan alat angkut didukung oleh kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan pelayaran menunjukkan dukungan yang tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan alat angkut guna memastikan kebersihannya dan bebas dari faktor risiko. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Badan Usaha Swasta, turut berperan dalam implementasi tindakan penyehatan alat angkut secara lebih efektif.
- c) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pencapaian target kegiatan turut berkontribusi terhadap keberhasilan dalam pengendalian faktor risiko. Dengan adanya evaluasi rutin, hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi sehingga efektivitas program pengendalian risiko tetap terjaga.
- d) Penerapan teknologi dan metode modern dalam pengendalian vektor penyakit serta sanitasi lingkungan di pelabuhan dan bandar udara berkontribusi besar dalam menekan risiko penyakit menular.
- e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi *Table Top Exercise* Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Reviu Dokumen Rencana Kontijensi

7. Kendala/masalah yang dihadapi

- a) Kurangnya kesadaran dan ketaatan dari pemilik atau penyelenggara Tempat Pengelolaan Pangan terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat serta penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Pangan yang sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi.
- b) Penyelenggara Tempat Pengelolaan Pangan tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, khususnya pemeriksaan rectal swab, yang merupakan salah satu syarat pengelolaan makanan yang memenuhi standar.
- c) Kurangnya koordinasi antara perusahaan penyedia air bersih (PT. EPI) dengan perusahaan induknya, yaitu PT. Pelindo II.
- d) Masih ditemukan faktor risiko di alat angkut akibat rendahnya kesadaran

awak kapal dalam menjaga kesehatan kapal dari faktor risiko yang mungkin terbawa.

- e) Pengendalian vektor telah dilaksanakan sesuai dengan *plan of action*, namun di lapangan masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sanitasi lingkungan di wilayahnya. Akibatnya, meskipun telah dilakukan pengendalian, tetap terdapat potensi faktor risiko perindukan/habitat vektor penyakit.

8. Pemecahan Masalah

- a) Meningkatkan advokasi terkait peraturan kekarantinaan kesehatan kepada awak kapal dan kapal yang singgah di pelabuhan.
- b) Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dengan perusahaan pelayaran serta pemilik kapal agar secara rutin melakukan tindakan pencegahan terhadap masuk dan berkembangnya penyakit melalui awak kapal dan barang yang ada di kapal.
- c) Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder* dan instansi terkait guna memperkuat koordinasi dalam pengelolaan kesehatan dan sanitasi di pelabuhan.
- d) Melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha Tempat Pengelolaan Pangan agar segera mendaftarkan usahanya ke BBKK, paling lambat 3 bulan setelah operasional.
- e) Mengadakan sosialisasi kepada kader di perusahaan tempat mereka bekerja mengenai pentingnya menjaga sanitasi lingkungan serta upaya pengendalian vektor secara terpadu.
- f) Menyediakan layanan kegawatdaruratan dan rujukan untuk menangani kasus-kasus yang muncul secara cepat dan efektif

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

BBKK Tanjung Priok mengalokasikan anggaran sebesar Rp103.270.000 untuk memenuhi target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi anggaran untuk indikator ini mencapai Rp101.875.450 atau 98,65% dari total alokasi anggaran.

Meskipun realisasi anggaran hampir mencapai 100%, capaian kinerja justru melampaui target, yakni sebesar 101,52%. Hal ini menunjukkan bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensikan anggaran sebanyak Rp1.394.550. Efisiensi ini diperoleh dari sisa biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan biaya aktual (*at cost*).

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level *output* RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AARO_i : Alokasi Anggaran
RARO_i : Realisasi Anggaran
CRO_i : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57%. Dengan anggaran 98,65% dapat mencapai kinerja 101,52%.

Indikator ketiga
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN

1. Pengertian

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dari parameter yaitu sebagai berikut :

- a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespons secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respons cepat di level BBKK sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Pelabuhan dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat.

- b) Indeks Pinjal ≤ 1

Indeks pinjal khusus < 1 sebagai ukuran maksimal keberadaan pinjal *Xenopsylla cheopis* pada suatu wilayah sebagai indikator wilayah tersebut bebas dari faktor risiko penyakit pes. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

- c) Tidak Ditemukan Larva *Anopheles* sp

Pengamatan keberadaan larva *Anopheles* dilakukan dengan survei Larva *Anopheles* dengan penangkapan larva menggunakan *dipper*/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar pelabuhan yaitu tidak ditemukannya larva *Anopheles*.

- d) Indeks Populasi Kecoak < 2

Kecoak merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoak dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoak seperti rumah makan/restoran, gedung dan bangunan.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya. yaitu jumlah populasi kecoak *Blatella germanica* < 2 ekor (kategori rendah).

e) Indeks Populasi Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

f) HI perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes sp* baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

g) HI buffer < 1

Wilayah buffer adalah wilayah darat yang berjarak jarak 400 m dari batas terluar pelabuhan yang harus bebas risiko penularan penyakit oleh vektor dengan standar *House Index* (HI) < 1. Empat ratus meter adalah jarak terbang vektor nyamuk *Aedes*.

h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan Tempat-tempat umum yang digunakan oleh pengguna jasa dan masyarakat sekitar pelabuhan/ bandara yang telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi

i) Persentase lokus TPP laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Tempat pengelolaan makanan yang terdiri dari rumah makan/restoran, jasa boga/catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin yang dilakukan pengawasan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j). Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali

bakteriologis

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks pengendalian faktor risiko sesuai dengan syarat baku mutu di pintu masuk negara.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini yaitu Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

3. Cara Perhitungan

Cara perhitungan/rumus indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal dari 10 parameter yakni:

- a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- b) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- c) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- d) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2
- e) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2
- f) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- g) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
- h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- i) Persentase lokus laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Adapun cara perhitungan/rumus indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Matrik Perhitungan Nilai Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
pelabuhan/bandara/PLBDN

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Mak	COv Max	Sore Max	Min	Scor e Min
1	2	3	4	$5 = (4/7) \times 100$	$6 = 3 \times 5$	7	8	$9 = 3 \times 8$	10	$11 = 3 \times 10$
Nilai Empiris				S	Nilai Score Max			Smax		Smin

$$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$$

Keterangan :

S = skor

Smax = skor maksimal

Smin = skor minimal

- Skor dihitung dari bobot x cakupan (*coverage*)
- Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (*coverage max*)
- Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (*coverage min*)
- Capaian merupakan persentase yang diperoleh dari hasil realisasi dibagi target. Capaian parameter dihitung maksimal 120 dan minimal 0

Berdasarkan matrik perhitungan nilai Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk di atas, kolom parameter diisi 10 parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN. Kolom bobot diisi bobot dari masing-masing parameter yang dihitung berdasarkan metode USG. Metode USG merupakan cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Adapun bobot masing-masing indikator yaitu :

Tabel 3. 9
Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indikator Indeks Pengendalian Faktor
Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

<i>Parameter</i>	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	<i>Rata-Rata</i>
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	5	5	5,0
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	5	3	4,0
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	3	2	2,7
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2	5	4	4	4,3
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	5	4	4	4,3
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	5	5	5,0
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	5	5	5,0
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	3	5	3	3,7
Persentase lokus TPM laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	5	4	4,7
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	5	4	4,7

4. Capaian Kinerja

Rincian sub indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons Kurang dari 24 Jam

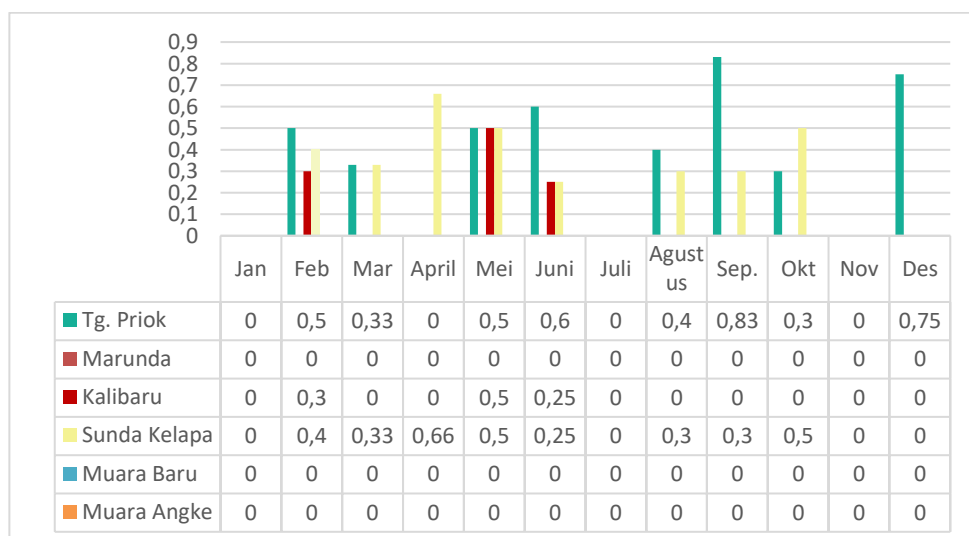
Kasus ini berupa pengawasan seluruh kedatangan ABK dan penumpang sebagai respons terhadap Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspons Kurang Dari 24 Jam.

- 2) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva *Anopheles sp* (<1)

Tidak ditemukan larva *Anopheles sp* di lingkungan BBKK Tanjung Priok. Untuk di wilayah DKI Jakarta sudah mendapat predikat eliminasi malaria dan tidak terdapatnya sarang atau tempat perindukan nyamuk di wilayah Pelabuhan malaria.

- 3) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Grafik 3. 8
Indeks Pinjal Khusus di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024



Nilai indeks pinjal di Kantor Induk dan lima wilayah kerja tahun 2024 adalah kurang dari satu. Oleh karena itu, keduanya dapat dikatakan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Permenkes Nomor 02 Tahun 2023, sehingga dapat diinterpretasikan tidak menjadi faktor risiko dalam penyebaran penyakit pes.

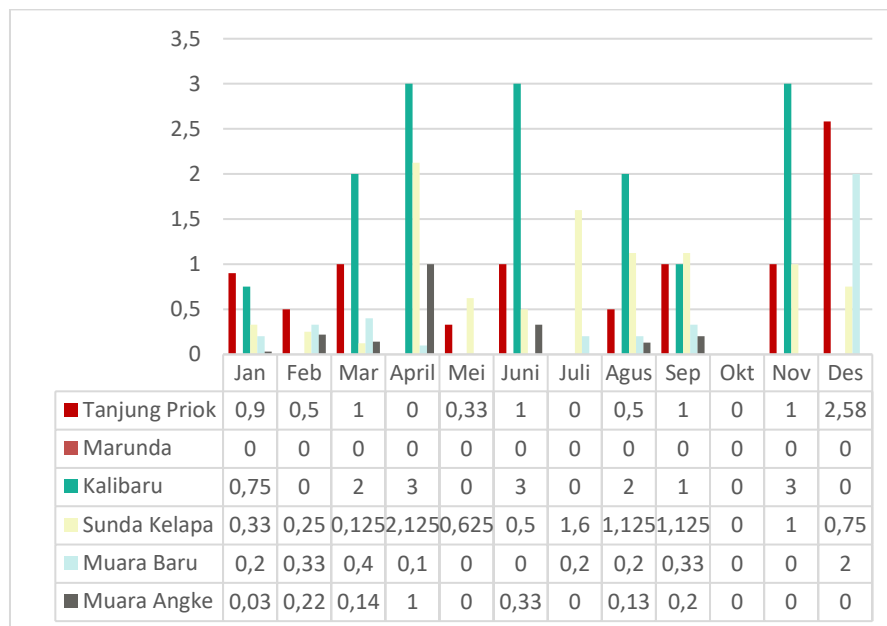
Kendati demikian, keberadaan tikus masih ditemukan di area tempat

sampah, pergudangan, dan kargo di pelabuhan. Banyaknya tumpukan sampah menjadi tempat yang disukai tikus untuk mencari sisa-sisa makanan. Selain itu, keberadaan tikus di area pergudangan dan kargo dipengaruhi oleh ketersediaan sumber makanan, sehingga area tersebut menjadi tempat yang disukai tikus untuk mencari makan.

Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dikategorikan sebagai risiko rendah (*Low Risk*) dalam penyebaran penyakit pes. Pemasangan perangkap tikus berjumlah 4.800 perangkap, dengan jumlah tikus tertangkap sebanyak 189 ekor.

4) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2

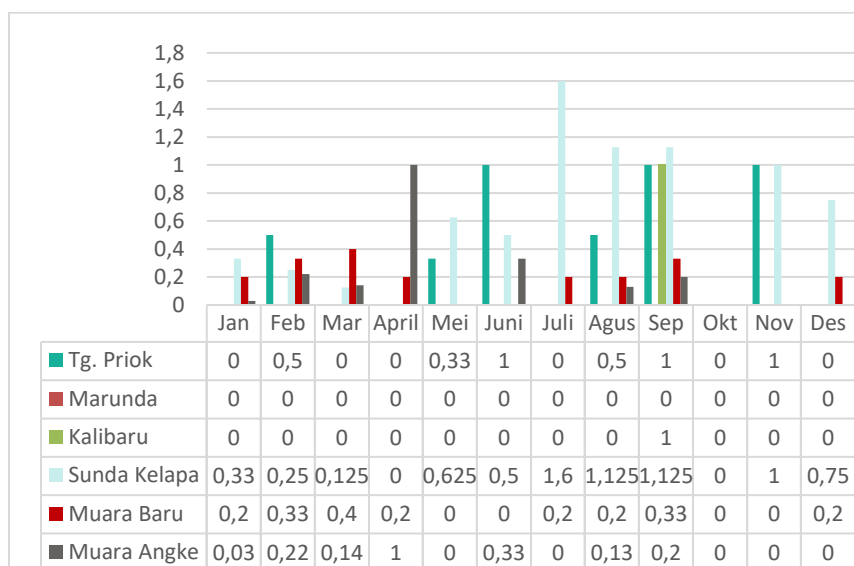
Grafik 3. 9
Kepadatan Kecoak di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



Dilihat dari data di atas, terdapat wilayah kerja yang masih ditemukan kecoak, namun masih sesuai dengan nilai ambang batas yang dipersyaratkan. Metode pengamatan yang digunakan adalah trapping dengan jenis perangkap lem (*sticky trap*), yang selain berfungsi sebagai media pengamatan juga digunakan sebagai bentuk pengendalian untuk mengurangi infestasi kecoak di lokasi pengamatan.

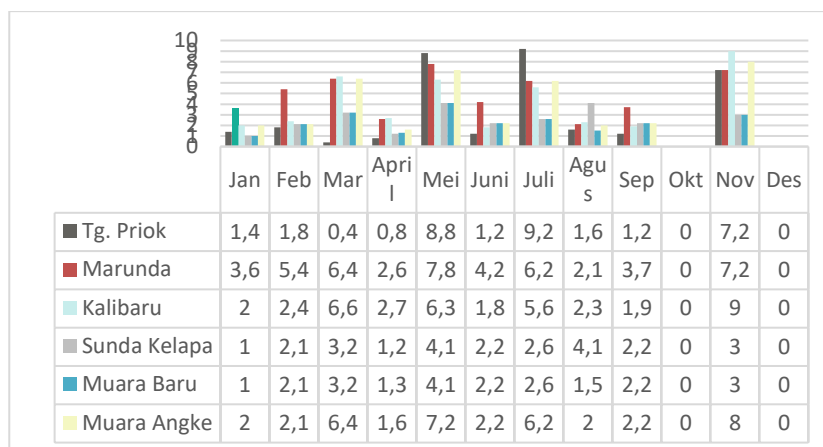
Namun, pada beberapa wilayah kerja, hasil pengamatan menunjukkan nilai melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi sanitasi di tempat-tempat pengolahan makanan yang menjadi lokasi pengamatan. Tindakan pengendalian yang dilakukan meliputi penyuluhan mengenai pengelolaan sanitasi di tempat pengolahan makanan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kepadatan kecoak < 2 pada tahun 2023 mencapai 100%

Grafik 3. 10
Kepadatan Kecoak di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024
Setelah Dilakukan Tindakan Pengendalian



5) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Grafik 3. 11
Kepadatan Lalat di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



Berdasarkan data di atas, terdapat wilayah kerja dengan hasil kepadatan yang memenuhi syarat sepanjang tahun 2024, sementara wilayah kerja yang tidak memenuhi syarat mengalami fluktuasi kepadatan pada setiap pengamatan bulanan. Metode pengamatan yang digunakan adalah flygrill.

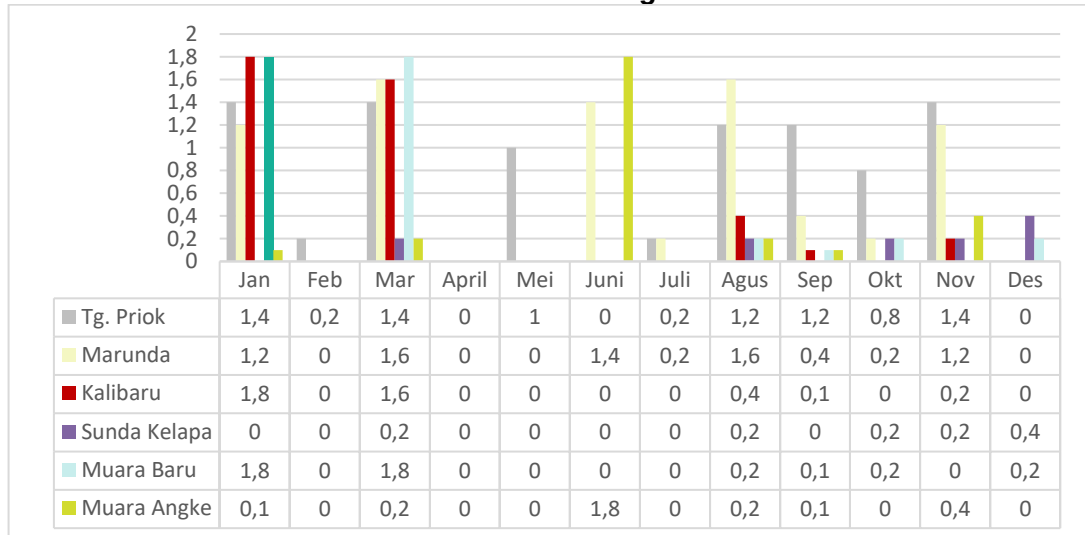
Pada beberapa wilayah kerja, hasil pengamatan menunjukkan angka kepadatan lalat yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh buruknya sanitasi dan sarana tempat pembuangan sampah sementara yang tidak tertutup dan tidak dipilah. Selain itu, rentang waktu pengambilan sampah yang tidak rutin menyebabkan overcapacity, sehingga sampah menumpuk dan terlambat diangkut. Hal ini menimbulkan bau dan menarik banyak lalat, yang berdampak pada angka kepadatan lalat yang melebihi baku mutu saat pengamatan dilakukan.

Tindakan pengendalian yang dilakukan meliputi:

1. Penyuluhan kepada pengelola pelabuhan untuk perbaikan sanitasi dan peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, sehingga kepadatan lalat dapat ditekan sesuai baku mutu yang dipersyaratkan.
2. Pengendalian secara kimia, yaitu spraying pada periode ketika indeks kepadatan lalat tidak sesuai dengan baku mutu.

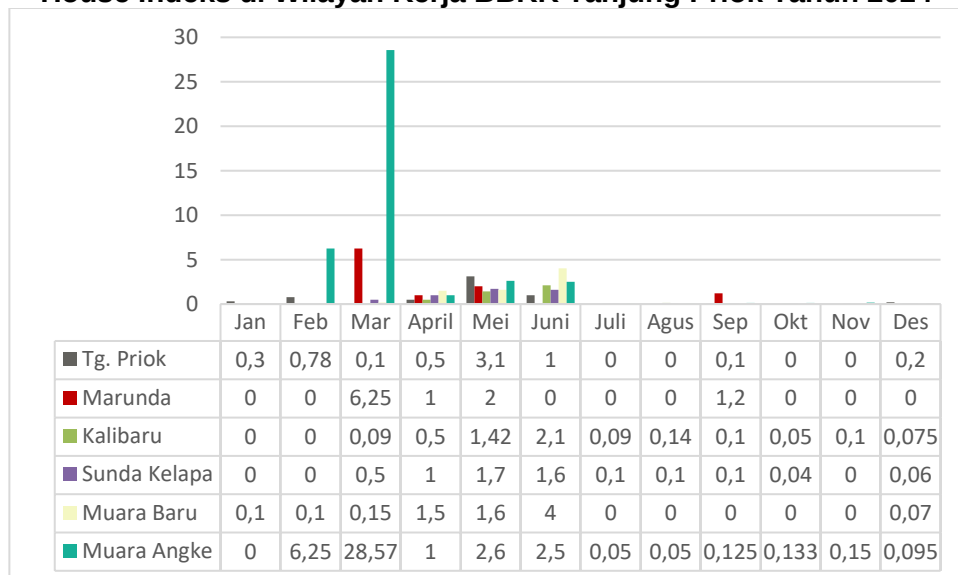
Setelah tindakan pengendalian dilakukan, indeks kepadatan lalat yang melebihi baku mutu dapat ditekan, sehingga kepadatan lalat < 2. Dengan demikian, capaian kinerja kepadatan lalat < 2 pada tahun 2024 mencapai 100%.

Grafik 3. 12
Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 Setelah Dilakukan Tindakan Pengendalian



6) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Grafik 3. 13
House Indeks di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



Berdasarkan grafik, angka House Index (HI) tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 28,57. Tindakan pengendalian jentik dilakukan dengan pemberian larvasida, yang diberikan atau dibubuhkan pada bangunan yang positif ditemukan jentik. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perkembangbiakan jentik nyamuk agar tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa.

Kegiatan pengendalian vektor dilakukan dengan kombinasi beberapa metode secara terpadu, serta mendorong peran serta masyarakat pelabuhan. Pengendalian ini tidak selalu mengedepankan penggunaan bahan kimia, karena jika tidak dilakukan secara cermat, dapat menyebabkan resistansi vektor. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengendalian jentik dengan 3M
Perilaku sehat dengan cara menguras, membersihkan, dan menutup tempat-tempat penampungan air agar jentik nyamuk tidak dapat berkembang biak.
- Pengendalian jentik dengan larvasidasi
Pengendalian jentik dengan larvasidasi dilakukan setiap bulan, bersamaan dengan survei tingkat kepadatan jentik. Larvasida diberikan pada tempat penampungan air yang sulit atau jarang dikuras.
- Pengendalian nyamuk dewasa dengan pengasapan (*fogging*)
Pengendalian nyamuk dewasa dilakukan melalui pengasapan atau fogging, yang dilaksanakan berdasarkan hasil survei jentik dengan indikator CI dan HI yang tinggi.
- Diseminasi informasi dalam kegiatan pengendalian vektor DBD
Penyampaian informasi mengenai pengendalian vektor DBD dilakukan kepada pengelola bangunan dan stakeholder di lingkungan pelabuhan.

Tabel 3.10
House Indeks di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

HOUSE INDEKS perimeter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tg. Priok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalibaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

Berdasarkan hasil survey tingkat kepadatan larva nyamuk *Aedes aegypti* jika ditemukan larvanya, maka harus langsung dilakukan tindakan pengendalian dengan memberikan larvasida sehingga angka kepadatannya dapat ditekan dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian dilakukan survey ulang sehingga House Indeks di wilayah buffer menjadi < 1 hal ini sesuai dengan dengan aturan yang berlaku dalam Permenkes nomor 50 Tahun 2017.

8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

Salah satu tugas pokok BBKK Tanjung Priok adalah melakukan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan gedung/bangunan perkantoran, perusahaan, dan tempat-tempat umum yang berada di wilayah pelabuhan dan sekitarnya, dengan tujuan agar faktor risiko kesehatan dapat dikendalikan. Adapun jenis sarana bangunan tempat umum yang ada antara lain terminal pelabuhan, pasar, masjid, serta perkantoran/perusahaan yang melayani umum.

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya dengan optimal, sehat, aman, dan selamat. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus didesain sedemikian rupa agar menjadi kondusif, aman, dan nyaman bagi pekerja untuk melaksanakan tugasnya.

Jumlah lokus inspeksi sanitasi tempat-tempat umum yang digunakan oleh pengguna jasa dan masyarakat sekitar pelabuhan sebanyak 84 kali kegiatan dengan hasil memenuhi syarat kesehatan dalam 3 kali pemeriksaan, dibandingkan dengan jumlah inspeksi sanitasi tempat-tempat umum sebanyak 83 kegiatan. Dengan demikian, capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%

9) Persentase lokus TPP laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Kegiatan pengamanan makanan dan minuman di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara rutin setiap bulan. Sesuai dengan *International Health Regulation* 2005, Annex 1B poin d tentang kapasitas inti pelabuhan, disebutkan bahwa pelabuhan harus menjamin lingkungan yang aman, termasuk menyediakan fasilitas di pintu masuk negara, salah satunya pengamanan terhadap makanan dan tempat pengelolaannya.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, disebutkan bahwa pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Tempat Pengelolaan Pangan yang diawasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok antara lain rumah makan, sentra kantin dan pangan jajanan, jasa boga/katering, serta kegiatan pengawasan pemasok bahan makanan ke kapal.

Jumlah lokus pengawasan tempat pengelolaan makanan dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebanyak 133 kali kegiatan dengan hasil memenuhi syarat kesehatan, dibandingkan dengan jumlah pengawasan tempat pengelolaan makanan sebanyak 133 kegiatan. Dengan demikian, capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.

- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.

Jumlah pengawasan dan pemeriksaan lokus air bersih sebanyak 33 kali kegiatan dengan hasil memenuhi syarat kesehatan, dibandingkan dengan jumlah lokus air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologi sebanyak 32 kali kegiatan. Dengan demikian, capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.11
Rincian Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
pelabuhan/bandara/PLBDN Tahun 2024

Parameter	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	10	10	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	6	6	100%
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva <i>Anopheles sp</i> (<1)	6	6	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2	6	6	100%

Parameter	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	6	6	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	6	6	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	6	6	100%
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	84	84	100%
Persentase lokus TPP laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	133	133	100%
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	32	32	100%

Dari tabel di atas didapatkan hasil Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 100%, Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 sebesar 100%, Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva *Anopheles sp* (<1) sebesar 100%, Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2 sebesar 100%, Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 sebesar 100%, Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 sebesar 100%, Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 sebesar 100%, Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebesar 100%, Persentase lokus TPP laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 100%, Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis sebesar 100%. Kemudian Hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1–5.

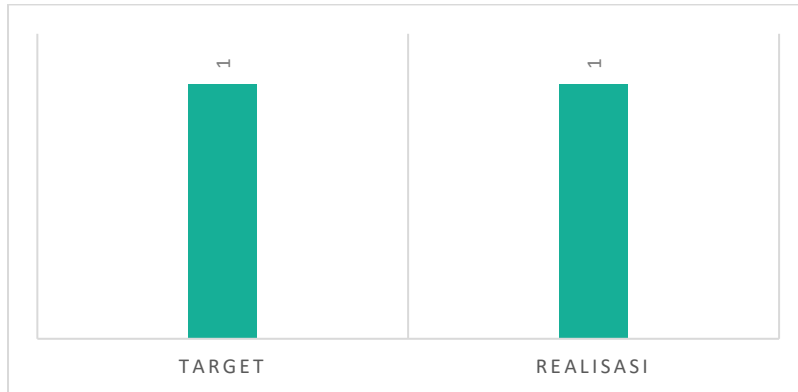
Tabel 3. 12
Nilai Emipris Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Tahun 2024

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Mak	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2	4	100	100	400	100	100	400
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI <i>buffer</i> < 1	5	100	100	500	100	100	500
8	Persentase lokus TTU	4	100	100	400	100	100	400

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Mak	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
	memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan							
9	Persentase lokus TPP laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500	100	100	500
					4.100			4.100

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{4.100}{4.100} \times 100 = 1$$

Grafik 3. 14
Realisasi Kinerja dengan Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
pelabuhan/bandara/PLBDN Tahun 2024



Dari grafik 3.15 Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 1 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3. 13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun
Sebelumnya

Parameter	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Realisasi	Realisasi	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	13	39	17	17	10	10	10	10
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	6	6	6	6	6	6	6	6
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva <i>anopheles</i> (<1)	6	6	6	6	6	6	6	6

Parameter	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Realisasi	Realisasi	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat	Target yang diperiksa	Realisasi yang memenuhi syarat
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2	6	6	6	6	6	6	6	6
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	6	6	6	6	6	6	6	6
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	6	6	6	6	6	6	6	6
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	6	6	6	6	6	6	6	6
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	39	78	83	83	80	80	84	84
Persentase lokus TPM laik higiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	185	140	164	164	128	128	133	133
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	28	28	33	33	35	35	32	32

Terjadi Perubahan Indikator pada tahun 2022, sehingga data realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, Pelaksanaan kegiatan ini tetap dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Terjadi kenaikan pemeriksaan TTU dan TPM pada tahun 2024.

Grafik 3. 15
Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan target Jangka menengah

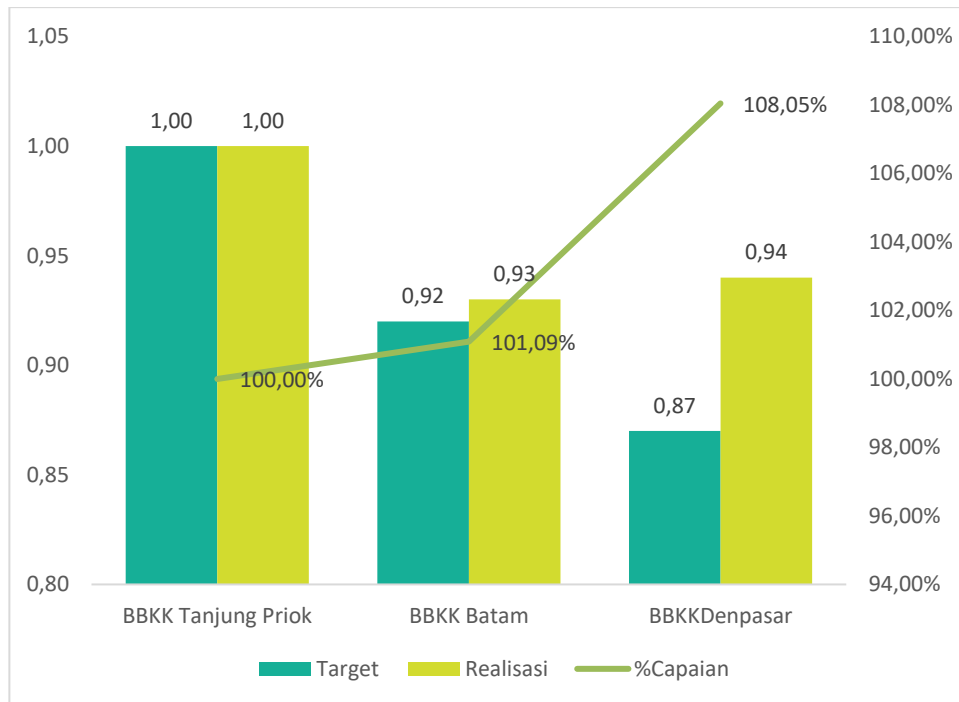


Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Revisi ke-5. Artinya tahun 2024 merupakan tahun penilaian kinerja RAK apakah indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik atau tidak tercapai.

Target jangka menengah yaitu berjumlah 0,99. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 1. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah terhadap realisasi sampai dengan tahun 2024 maka capaiannya yaitu sebesar $1/0,99 \times 100\% = 101,01\%$. Dengan tingkat capaian tersebut hingga tahun 2024 kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah sebesar 3,09% Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja BBKK Tanjung Priok telah melampaui target kinerja jangka menengah.

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sesuai, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

Grafik 3. 16
Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
pelabuhan/bandara/PLBDN BBKK Tanjung Priok dengan BBKK Denpasar,
dan BBKK Batam Tahun 2024



Dapat dilihat pada grafik di atas untuk realisasi target BBKK Tanjung Priok, BBKK Batam dan BBKK Denpasar tercapai. Perbedaan realisasi kinerja berbeda-beda antara masing-masing BBKK dikarenakan perbedaan target dan realisasi. Untuk target dan realisasi capaian BBKK Tanjung Priok lebih besar diantara BBKK lainnya. Semua Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun di BBKK Tanjung Priok memenuhi syarat baku mutu.

Perbedaan capaian kinerja dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan dukungan anggaran, tingkat koordinasi antar sektor, dan kondisi lingkungan yang berbeda di masing-masing wilayah.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- Menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk penanggulangan kasus *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Tim Gerak Cepat berperan dalam respons cepat terhadap kasus-kasus

kesehatan yang berpotensi menjadi wabah atau darurat kesehatan global. Upaya ini mencakup identifikasi dini, intervensi cepat, serta koordinasi dengan otoritas kesehatan nasional dan internasional.

- b) Melakukan pengumpulan, analisis data, dan diseminasi hasil surveilans. Data surveilans digunakan untuk mendeteksi pola tren penyakit dan faktor risiko, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Pemanfaatan teknologi dalam sistem surveilans meningkatkan akurasi dan kecepatan respons.
- c) Penyediaan bahan, peralatan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan reagen laboratorium, alat deteksi cepat, serta fasilitas pemeriksaan kesehatan menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pengawasan. Penyediaan alat pengendalian vektor seperti insektisida dan peralatan fumigasi untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.
- d) Melakukan penyelidikan epidemiologi. Investigasi epidemiologi secara menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi sumber penularan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit.
- e) Menyampaikan rekomendasi hasil kegiatan pengendalian vektor dan sanitasi lingkungan kepada operator pelabuhan/bandara. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah perbaikan sanitasi, serta pengendalian populasi vektor seperti nyamuk, lalat, dan kecoak.
- f) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, seperti: Syahbandar, otoritas pelabuhan, otoritas bandara, pengelola pelabuhan/bandara, imigrasi, bea cukai, balai besar karantina pertanian, balai besar karantina ikan, maskapai penerbangan, agen pelayaran, serta fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) di sekitar pelabuhan dan bandara. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam deteksi, pencegahan, dan respons cepat terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat di kawasan pintu masuk negara.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan

a) Akses Informasi yang Cepat dan Akurat

BBKK Tanjung Priok memiliki akses yang mudah terhadap informasi peningkatan kasus atau kasus PHEIC dari Kementerian Kesehatan, WHO, dan lembaga internasional lainnya. Hal ini memungkinkan pengambilan tindakan yang tepat waktu berdasarkan data terbaru.

Sistem digitalisasi data mempermudah pemantauan dan pelaporan kondisi kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara.

b) Respons Cepat dan Efektif dari Petugas

Kecepatan respons petugas BBKK Tanjung Priok dalam menangani kasus-kasus kesehatan masyarakat berperan besar dalam pengendalian faktor risiko. Dengan adanya prosedur standar dan koordinasi yang baik, tindakan pencegahan serta mitigasi dapat segera diterapkan.

c) Koordinasi dan Kolaborasi yang Solid dengan Lintas Sektor

Keberhasilan pengendalian faktor risiko di pelabuhan, bandara, dan PLBDN sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Pemberdayaan kader kesehatan di lingkungan pelabuhan/bandara serta penguatan program kesehatan dengan dukungan pembiayaan dari lintas sektor turut meningkatkan efektivitas pengendalian risiko.

d) Implementasi Teknologi dan Digitalisasi dalam Surveilans Kesehatan

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan berbasis digital memungkinkan pelaporan dan analisis data secara real-time. Dengan demikian, deteksi dini terhadap faktor risiko dapat dilakukan lebih akurat, mempercepat respons dalam pencegahan penyebaran penyakit.

7. Kendala/Masalah yang Dihadapi

a) Perilaku Masyarakat yang Tidak Mendukung Upaya Pengendalian Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola tempat penampungan air masih rendah, sehingga nyamuk Aedes aegypti tetap memiliki akses untuk bertelur dan berkembang biak

b) Kurangnya Inovasi dalam Metode Pengendalian Vektor Pengendalian vektor membutuhkan inovasi yang berkelanjutan agar tetap efektif dalam menghadapi adaptasi vektor terhadap metode yang sudah ada.

- c) Kurangnya Respons Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terhadap Rekomendasi Pengendalian Beberapa pengelola TPP tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, menyebabkan upaya pengendalian risiko kesehatan menjadi kurang optimal.
- d) Jumlah Kader yang Tidak Proporsional dengan Luas Wilayah Pengawasan Jumlah kader yang terlibat dalam pengawasan masih terbatas, sehingga efektivitas program pengendalian vektor di wilayah yang luas menjadi kurang optimal.
- e) Tingkat Kepadatan Vektor yang Masih Tinggi di Beberapa Titik. Beberapa lokasi masih memiliki tingkat kepadatan vektor yang tinggi, meningkatkan risiko penularan penyakit.
- f) Kondisi Lingkungan dengan Sanitasi Buruk Lingkungan dengan sanitasi yang kurang memadai berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya vektor, memperburuk situasi pengendalian.
- g) Struktur Bangunan Kantin yang Tidak Mendukung Pengendalian Vektor. Kantin dengan bangunan semi permanen mempermudah akses vektor pembawa penyakit keluar masuk, meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

8. Pemecahan Masalah

Beberapa kendala/permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi dengan Kader Mengoptimalkan penggunaan teknologi seluler dan komunikasi langsung untuk meningkatkan keaktifan, kinerja, dan disiplin kader dalam pengawasan dan pengendalian vektor.
- b) Melakukan Pengendalian di Titik dengan Kepadatan Vektor Tinggi Mengintensifkan intervensi pada lokasi dengan kepadatan vektor tinggi hingga angka kepadatannya menurun dan risiko penularan dapat ditekan.
- c) Meningkatkan Koordinasi dengan Pengelola Lingkungan dan Pihak Terkait Berkoordinasi dengan pengelola lingkungan untuk memberikan intervensi yang diperlukan agar area tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya vektor. Hasil pemantauan dan kendala yang ditemukan juga dibahas dalam pertemuan koordinasi lintas sektor di pelabuhan.

- d) Membuat Sistem Pelaporan Berbasis Aplikasi Mengembangkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pemantauan lebih efisien, cepat, dan akurat dalam pengendalian faktor risiko.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp84.979.000 untuk memenuhi target indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran pada indikator ini Rp82.954.000 (97,62%), dengan dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 100% (melampaui target).

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level *output* RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AARO_i : Alokasi Anggaran
RARO_i : Realisasi Anggaran
CRO_i : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57%, dengan anggaran 97,62% dapat mencapai kinerja 100%.

Indikator keempat

Nilai kinerja anggaran

1. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dengan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada dashboard aplikasi SMART Kemenkeu RI

2. Definisi Operasional

NKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada dashboard aplikasi SMART Kemenkeu RI.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- a) Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%
- b) Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%
- c) Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- a) Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%
- b) Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%
- c) Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%
- d) Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%
- e) Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%

- f) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%
- g) Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan
- h) Dispensasi SPM (sebagai pengurang)

3. Cara Perhitungan

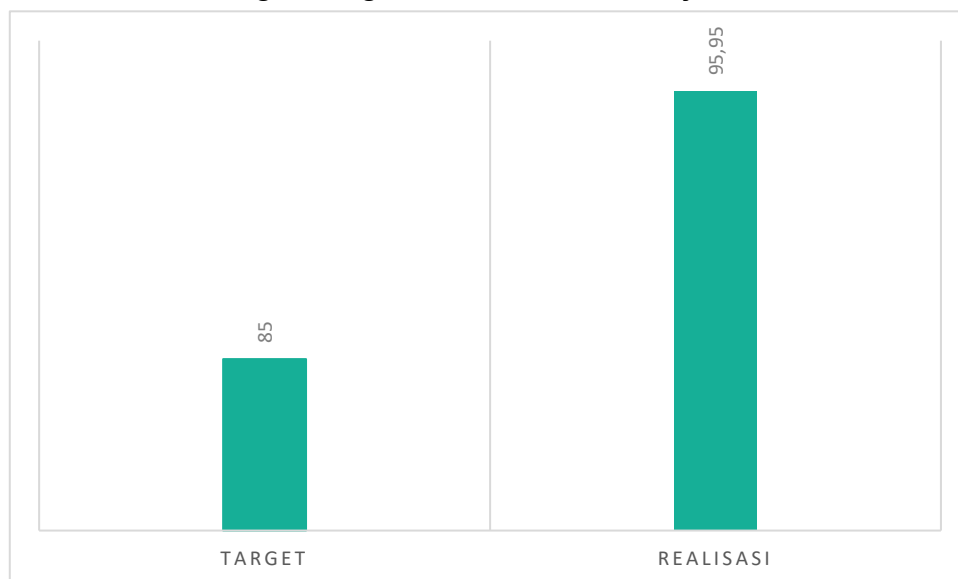
Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Adapun pengukuran capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Capaian Kinerja Anggaran Satker pada}} \times 100\%$$

4. Capaian Indikator

Grafik 3. 17
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

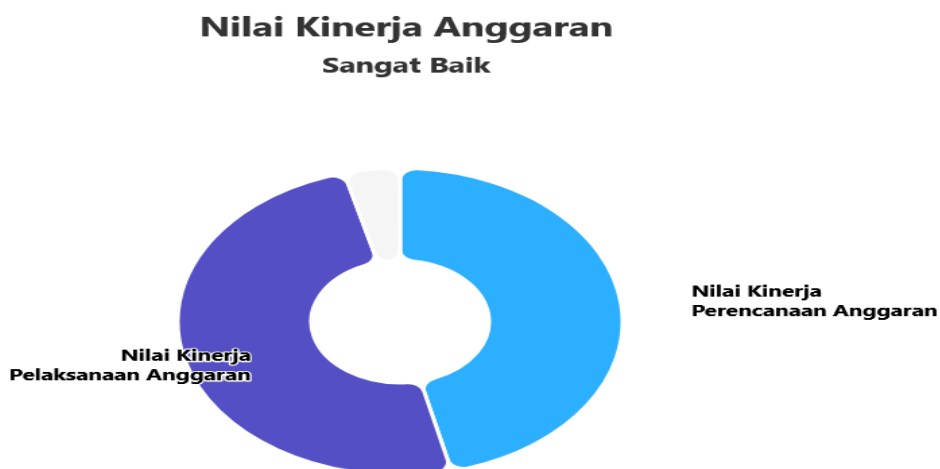


Sesuai dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada

dashboard aplikasi SMART Kemenkeu RI, nilai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 adalah sebesar 95,95 Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran BBKK Tanjung Priok masuk kedalam Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).

Adapun output yang telah terealisasi adalah sebanyak 1409 dari 1409. Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Tanjung Priok tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini

Diagram 3. 1
Nilai Kinerja Anggaran BBKK Tanjung Priok berdasarkan Aplikasi SMART
DJA

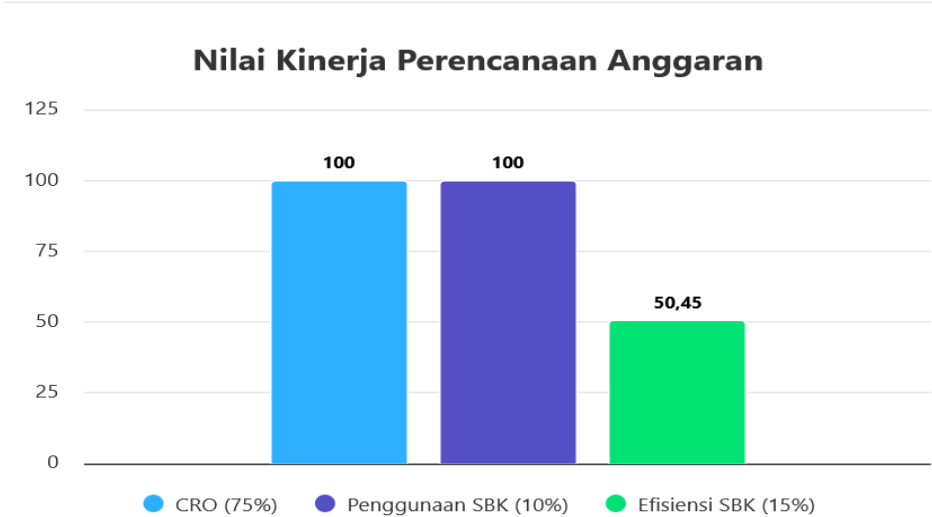


Tabel 3. 14
Monitoring Nilai Kinerja Anggaran BBKK Tanjung Priok berdasarkan Aplikasi SMART DJA

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	92,57	99,32	95,95

Diagram 3.1: Menampilkan nilai kinerja keseluruhan berdasarkan aplikasi SMART DJA. Data ini mencerminkan sejauh mana anggaran telah direncanakan, diimplementasikan, dan dipantau secara efektif. Tabel 3.15 Menguraikan indikator spesifik yang digunakan untuk memonitor nilai kinerja perencanaan anggaran. Dapat dilihat dari tabel 3.15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBKK Tanjung Priok didapatkan hasil sebesar 92,57.

Grafik 3. 18
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBKK Tanjung Priok berdasarkan Aplikasi SMART DJA



“Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”

Tabel 3. 15
Monitoring Nilai Perencanaan BBKK Tanjung Priok

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAIAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	92,57	100,00	100,00	50,45

Grafik 3. 19
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBKK Tanjung Priok berdasarkan Aplikasi SMART DJA



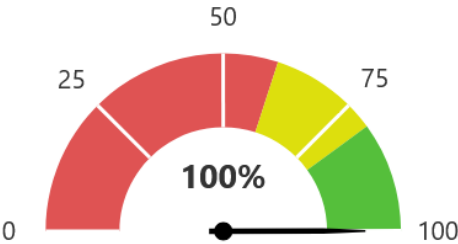
Tabel 3. 16
Monitoring Pelaksanaan Anggaran

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output		
1	Desember	182	024	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	Nilai	100,00	100,00	99,10	100,00	100,00	95,02	100,00	99,32	100%
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25		
						Nilai Akhir	10,00	15,00	19,82	10,00	10,00	9,50	25,00		
						Nilai Aspek	100,00				98,53		100,00		

Grafik 3.20 dan Grafik 3.21 Membandingkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kinerja Pelaksanaan untuk mengidentifikasi perbedaan antara rencana awal dan realisasi pelaksanaan. Kinerja perencanaan Menunjukkan seberapa baik anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan, Nilai kinerja perencanaan yang tinggi menunjukkan bahwa BBKK Tanjung Priok mampu merumuskan anggaran yang realistis dan sesuai dengan tujuan strategis.Kinerja Pelaksanaan. Kinerja pelaksanaan Menggambarkan seberapa baik anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dalam praktik dan Nilai kinerja pelaksanaan yang tinggi menunjukkan bahwa BBKK Tanjung Priok mampu menggunakan anggaran secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Gambar 3. 1
Progress Rincian Output

Progress Rincian Output



100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai besar kekarantinaan kesehatan tanjung priok

Tabel 3. 17
Tabel Data Anomali BBKK Tanjung Priok
Data Anomali

Kondisi ↑↓	Keterangan ↑↓	Jumlah RO ↑↓	Persentase ↑↓
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Tabel 3.18 (Data Anomali) Mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Data ini penting untuk menyusun strategi perbaikan

Tabel 3. 18
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BBKK Tanjung Priok

No.	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realissi
1	51 BELANJA PEGAWAI	20.244.978.000	19.601.783.963	96,82%
1	52 BELANJA BARANG	14.031.146.000	13.801.693.426	98,36%
2	53 BELANJA MODAL	117.235.000	116.907.800	99,72%

Pada awal pelaksanaan, tugas pokok dan fungsi BBKK Tanjung Priok didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA BBKK Tanjung Priok sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan alokasi sebesar Rp33.608.830.000.

Pada bulan Mei, terdapat penambahan alokasi anggaran di BBKK Tanjung Priok sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Kewenangan DJA Tahap-3 P2P TA 2024. Penambahan ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program kebutuhan prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan, sehingga terdapat alokasi tambahan menjadi Rp34.393.359.000. Penambahan alokasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang diperlukan oleh BBKK Tanjung Priok.

Di akhir tahun anggaran, berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran

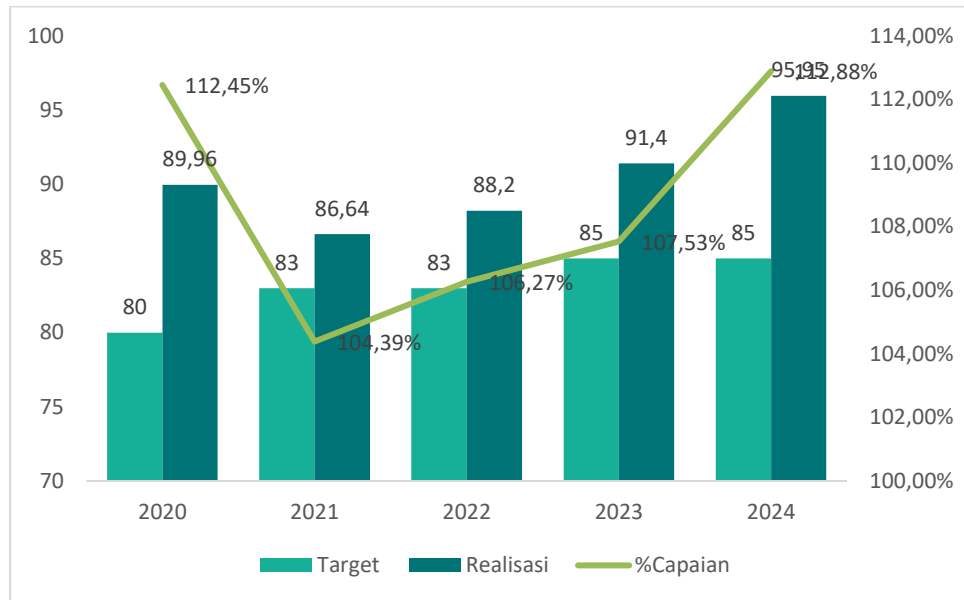
Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 tentang Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, serta Surat Plt. Direktur Jenderal P2P Nomor PR.04.02/C/2855/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Distribusi Pagu Penghematan Dinas melalui *Self-Blocking* Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P TA 2024, BBKK Tanjung Priok melakukan efisiensi pada akun perjalanan dinas sebesar Rp44.537.000.

Grafik 3.23 menggambarkan bahwa realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2024 mencapai 95,95%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi ini disebabkan oleh perubahan cara perhitungan nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK Nomor 466 Tahun 2023. PMK Nomor 466 Tahun 2023 lebih menekankan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Efektivitas: Mengukur capaian keluaran (output) dan hasil (outcome).
- Efisiensi: Menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK).
- Kepatuhan: Melibatkan evaluasi terhadap standar biaya, alokasi belanja tertentu, dan pelaksanaan kebijakan tematik.

Penilaian dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi yang mengumpulkan data dari Kementerian/Lembaga, DJPb, dan hasil audit. Sementara itu, dalam PMK sebelumnya, pendekatan yang digunakan lebih terbatas, dengan bobot yang lebih besar pada penyerapan anggaran dan pencapaian target fisik, namun kurang memberikan perhatian pada kualitas hasil atau manfaat anggaran.

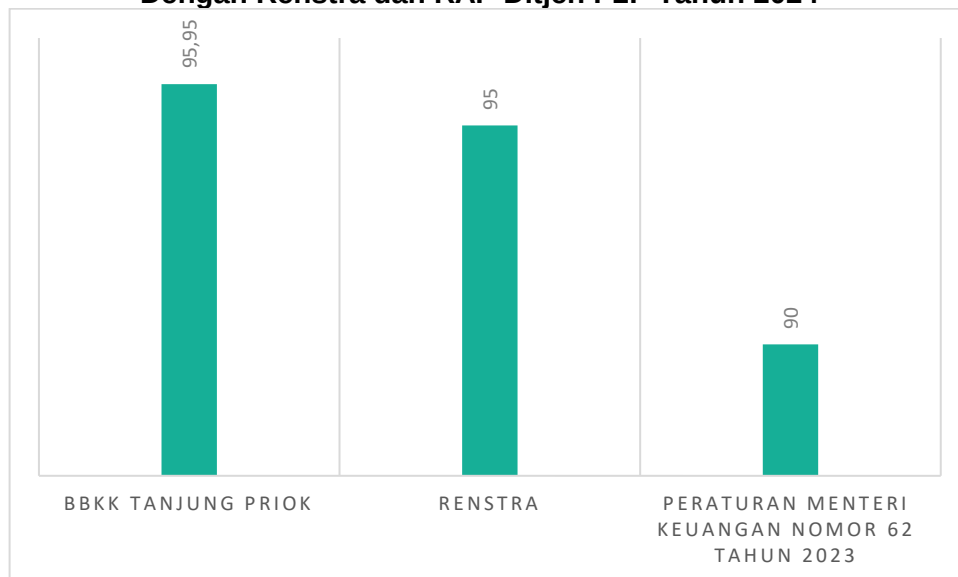
Grafik 3. 20
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024. Target Nilai Indikator Anggaran sebesar 85 sedangkan Realisasi kinerja tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran cukup berfluktuasi dan mengalami realisasi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,95.

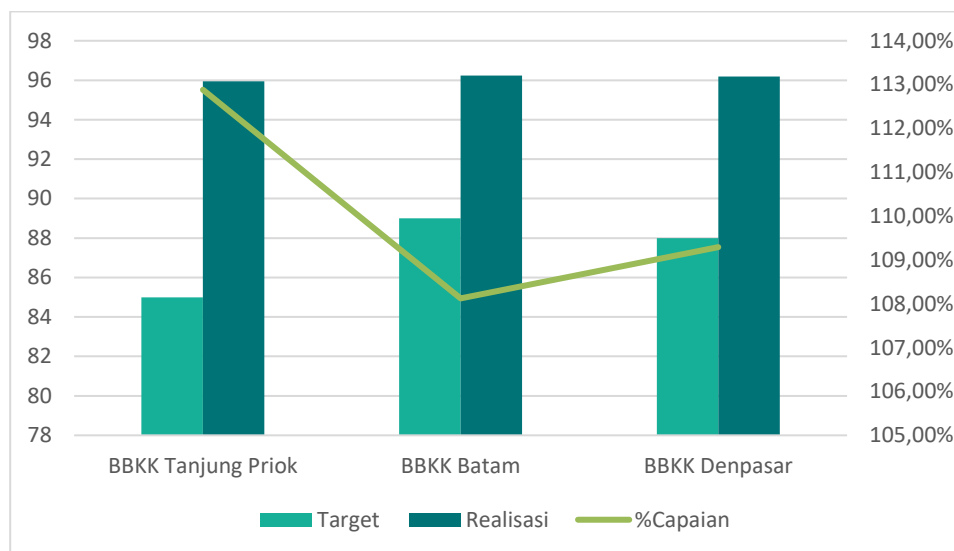
Realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 95,95. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2022 terhadap realisasi sampai tahun 2024 maka capaiannya adalah $(95,95/83 \times 100\% = 115,60\%)$, yang artinya pada tahun 2024 ini kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah. Dengan pencapaian selama lima tahun terakhir maka diprediksikan pada tahun 2025 dan tahun selanjutnya untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran akan tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik 3. 21
Perbandingan Capaian Indikator BBKK Tanjung Priok
Dengan Renstra dan RAP Ditjen P2P Tahun 2024



Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBKK Tanjung Priok merupakan indikator kinerja yang ditetapkan pad oleh unit utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nilai Kinerja Anggaran yang akan digunakan sebagai target nasional adalah Target dalam Renstra Kemenkes sebesar 95 dan Target sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, bahwa kategori nilai dengan predikat baik ada pada rentang nilai lebih dari 80 sampai dengan 90. Pada tahun 2024 NKA BBKK Tanjung Priok telah berhasil melampaui target nasional, baik target Kemenkeu maupun target Renstra Kemenkes, dimana realisasi pada tahun ini mencapai 95,95 sehingga capaian NKA BBKK Tanjung Priok jika dibandingkan target nasional mencapai 101% untuk perbandingan target Kemenkeu dan 106,61% untuk Target Renstra Kemenkes.

Grafik 3. 22
Perbandingan Target dan Capaian Nilai kinerja anggaran BBKK Tanjung Priok, BBKK Batam, Denpasar Tahun 2024



BBKK Tanjung Priok membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan satker sejenis dan setara tingkat eselon II yaitu dengan BBKK Batam dan Denpasar. sehingga sandingan dapat dilakukan seimbang dengan level organisasi yang setara. Dapat dilihat pada grafik realisasi persen capaian BBKK Tanjung Priok lebih tinggi dibandingkan dengan BBKK lainnya. Persen Capaian BBKK Tanjung Priok lebih tinggi dibandingkan dengan BBKK Lainnya disebabkan oleh beberapa factor diantaranya :

- a) Efektivitas Perencanaan Anggaran
 - Rencana Anggaran yang Realistis: BBKK Tanjung Priok memiliki perencanaan anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaan, sehingga target lebih mudah tercapai.
 - Kesesuaian Prioritas dengan Kebijakan Nasional: Alokasi anggaran mungkin diarahkan pada program yang menjadi prioritas nasional, seperti kesehatan masyarakat, yang memiliki pendanaan lebih stabil.
- b) Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran
 - Manajemen yang Efisien: Pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, misalnya melalui penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang sesuai, sehingga sumber daya dimanfaatkan secara optimal.

- Minimnya Kendala Teknis: Proyek atau kegiatan yang dijalankan mungkin lebih sedikit mengalami kendala teknis seperti keterlambatan tender atau hambatan logistik.
 - Pengadaan dan Pelaksanaan Tepat Waktu: Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal memungkinkan realisasi anggaran berjalan lancar.
- c) Tingginya Tingkat Output dan Outcome
- Kinerja Kegiatan yang Optimal: BBKK ini mungkin menghasilkan lebih banyak keluaran (output) yang relevan dengan target sasaran dibandingkan balai lain.

5. Upaya yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- a) Rekonsiliasi dan Pemantauan Data
- Melakukan rekonsiliasi data secara berkala.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran.
 - Mengisi e-Monev DJA sebagai bagian dari pemantauan kinerja anggaran.
 - Melakukan pemantauan rutin atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan guna meminimalisir kesenjangan antara rencana penarikan dana/pelaksanaan kegiatan dengan realisasinya.
- b) Optimalisasi Koordinasi Tim Kerja dan Keuangan
- Memperkuat koordinasi antara tim kerja BBKK Tanjung Priok dan penanggung jawab keuangan.
 - Memastikan proses pencairan anggaran berjalan lancar untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Penyusunan dan Implementasi RPK serta RPD
- Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara sistematis.
 - Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.
- d) Melaksanakan Rapat Pertemuan Bappenas dan Penganggaran

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya perencanaan tahunan berupa:

- a) Perencanaan Tahunan yang Matang
 - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara tepat.
 - Kesesuaian antara TOR, RAB, dan kebutuhan di lapangan sehingga volume layanan dapat tercapai secara optimal.
- b) Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
 - Setiap penggunaan anggaran diarahkan untuk menghasilkan output yang jelas dan terukur.
 - Fokus pada pencapaian manfaat dari setiap alokasi anggaran, bukan sekadar penyerapan dana.
- c) Evaluasi dan Pengendalian yang Konsisten
 - Melaksanakan evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semester) terhadap realisasi fisik dan anggaran.
 - Mengidentifikasi kendala serta melakukan perbaikan secara cepat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
- d) Fleksibilitas dalam Revisi Anggaran
 - Melakukan revisi anggaran dalam RKAKL guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang tidak terencana.
 - Revisi dilakukan di berbagai tingkat, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil DJPb, dan DJA, untuk memastikan optimalisasi anggaran.
 - Menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam halaman III DIPA agar sesuai dengan realisasi penarikan dana.
 - Kesesuaian RPD dengan realisasi menjadi salah satu faktor utama dalam evaluasi kinerja anggaran.

7. Kendala / Permasalahan

- a. Terdapat indikator yang dapat dihitung dalam periode satu tahun dengan target satu layanan, sehingga capaian indikator tidak dapat menggambarkan secara bulanan
- b. Terdapat data yang berubah setiap bulannya
- c. Laporan capaian *output* tim kerja tidak selalu tepat waktu disampaikan.

- d. Proses revisi anggaran yang dilakukan berulang kali (16 kali) memerlukan waktu yang berakibat pada tidak konsistensinya RPD
- e. Pada triwulan IV terdapat kebijakan penghematan perjalanan dinas melalui mekanisme *selfblocking*, sehingga menghambat realisasi kegiatan
- f. Rendahnya nilai Deviasi hal III DIPA disebabkan kurangnya konsistensi melaksanakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

8. Pemecahan Masalah

- a. Dilakukan rekon dalam rangka monitoring atas capaian kinerja, realisasi kegiatan dan rencana kegiatan bidang/bagian.
- b. Mengisi progress capaian keluaran setiap bulannya, sehingga walaupun volume layanan belum tercapai namun tetap ada keterangan progres kegiatan
- c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui realokasi anggaran
- d. Memperbaiki Rencana Penarikan Dana melalui revisi Halaman III DIPA
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pagu Anggaran BBKK Tanjung Priok tahun 2024 untuk indikator nilai kinerja anggaran sebesar Rp66.865.000 untuk memenuhi target indikator nilai kinerja anggaran. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, realisasi anggaran pada indikator ini 58.358.600(87,28%), dengan dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 112,88% (melampaui target), dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensi anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak Rp8.506400. Efisiensi tersebut berasal sisa transport yang dibayarkan at cost.

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level *output* RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AARO_i : Alokasi Anggaran
RARO_i : Realisasi Anggaran
CRO_i : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Nilai Kinerja Anggaran telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 105%, dengan anggaran 87,28% dapat mencapai kinerja 112,88%.

Indikator kelima

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Pengertian

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring*

(OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kualitas laporan keuangan satker yang akuntabel.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini yaitu untuk Capaian keluar ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

Aspek pertama adalah kualitas perencanaan anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 indikator yakni :

- a) Revisi DIPA, yang mengukur kualitas perencanaan berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan,
- b) Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Aspek kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni :

- a) Penyerapan Anggggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran triwulanan
- b) Belanja Kontraktual, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi penerbitan kontrak
- c) Penyelesaian Tagihan, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual
- d) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian

pertanggungjawaban UP/TUP, persentase Ganti Uang Persediaan, serta persentase setoran TUP, serta

- e) Dispensasi SPM, yang diukur berdasarkan rasio SPM yang terbit dengan dispensasi di akhir tahun (Menjadi Pengurangan Nilai IKPA).

Ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas Hasil

Pelaksanaan Anggaran diukur dengan menggunakan indikator Capaian Output. Indikator Capaian Output diukur dengan melihat kepatuhan pelaporan data capaian output dan ketercapaian output Satker K/L sebagaimana komitmen dalam DIPA.

Adapun bobot masing-masing penilaian sebagai berikut:

- a) Aspek kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (15%);
- b) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan(10%), Pengelolaan UP dan TUP(10%), dan Dispensasi SPM menjadi pengurangan nilai IKPA; dan
- c) Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja Capaian *Output* (25%).

3. Cara Perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output.

Hasil perhitungan otomatis atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi pada aplikasi (OM SPAN) yang berasal dari transaksi keuangan Satker.

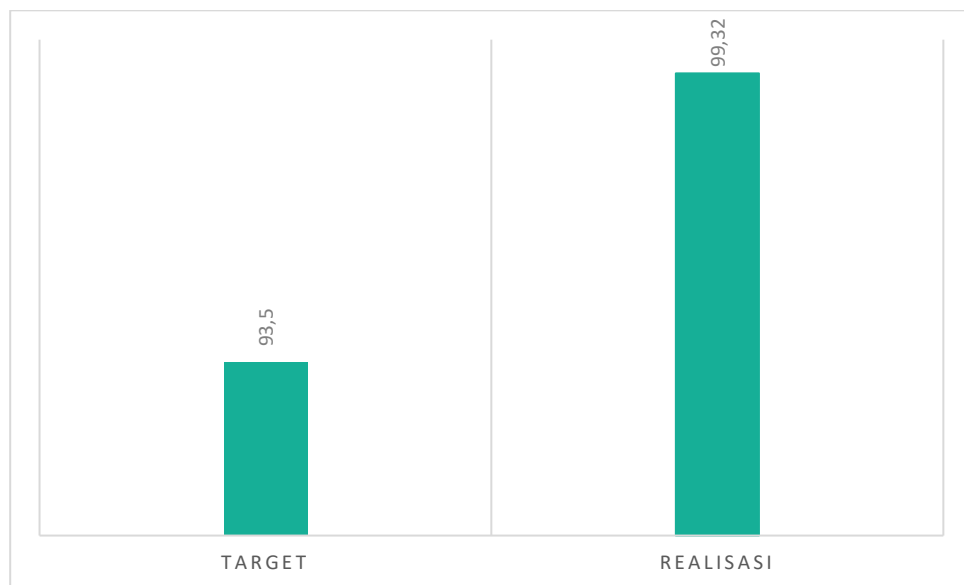
IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring* (OM SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja.

Rumus:

$$= \frac{\text{Capaian Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran}}{\text{Target Capaian Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran}} \times 100\%$$

4. Capaian Kinerja

Grafik 3. 23
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Capaian realisasi nilai IKPA tahun 2024 sebesar 99,32 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 sebesar 93,5 sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 106,22% .

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBKK Tanjung Priok pada tahun 2024 capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria “Sangat Baik”. Rincian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3. 19
Tabel Rincian Nilai IKPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	182	024	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	Nilai	100.00	100.00	99.10	100.00	100.00	95.02	100.00	99.32	100%	0.00	99.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.82	10.00	10.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.53				100.00				

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 sebesar 99,32 dengan rincian:

a) Revisi DIPA: Tahun 2024 BBKK Tanjung Priok telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak **10 kali** dengan pagu tetap.100,

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker.

Indikator revisi DIPA ini merupakan salah satu indikator yang mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 Tahun 2022 ke tahun 2024, di mana sebelumnya frekuensi yang dihitung adalah per triwulan menjadi semesteran.

Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat satker dan termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kanwil DJPB Kementerian Keuangan antara lain :

- (201) Antar fungsi/sub fungsi dan/atau antar program
- (211) Pemenuhan belanja operasional
- (212) Penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional
- (213) Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non-operasional
- (217) Penyelesaian tunggakan

- (220) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola
- (221) Pergeseran anggaran antarjenis belanja
- (222) Kontrak tahun jamak
- (225) RO cadangan
- (226) Penurunan volume RO secara total
- (229) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
- (231) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
- (236) Pergeseran anggaran antar KRO dan/atau antar kegiatan
- (239) Revisi dalam rangka pagu tetap lainnya

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilail KPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut :

Tabel 3. 20
Nilail KPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran
0-1	110
2	100
>=3	50

Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan semester II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%. Formula perhitungan nilai IKPA revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II), dimana NKRA berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester. Tahun 2024 BBKK Tanjung Priok telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 10 kali

b) Deviasi halaman III DIPA

Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung

berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulanan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum 100 adalah 5%. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Adapun nilai parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Tanjung Priok tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini

Tabel 3. 21
Parameter Devisiasi Hal III DIPA BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Belanja	Nama Belanja	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rate Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA	
					61	62	63	67	61	62	63	67	61	62	63	67	61	62	63	67	61	62	63	67	61	62	63	67				
1	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	01	508,298,178	343,572,324		0	508,298,178	343,572,324		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	02	1,339,167,967	1,424,703,793		0	1,345,233,515	1,421,902,594		0	6,065,548	2,801,199	0	0	0.45	0.20	0.00	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.26	0.08	0.00	0.00	0.34	0.17	100.00	
3	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	03	1,377,924,282	2,153,393,352	109,485,000	0	2,606,020,305	2,108,841,904	105,696,700	0	1,228,096,023	44,551,448	3,788,300	0	89.13	2.07	3.46	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.12	100.00	
4	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	04	1,453,054,250	1,008,399,685		0	1,453,054,250	1,008,569,685		0	0	170,000	0	0	0.00	0.02	0.00	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.09	100.00
5	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	05	1,498,926,838	1,080,481,832		0	1,499,260,138	1,100,087,505		0	333,300	19,805,673	0	0	0.02	1.81	0.00	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.01	0.76	0.00	0.00	0.77	0.23	100.00	
6	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	06	2,711,856,145	633,667,649		0	2,719,084,724	614,227,939		0	7,228,579	19,440,110	0	0	0.27	3.07	0.00	0.00	57.90	41.75	0.35	0.00	0.16	1.28	0.00	0.00	1.44	0.43	100.00	
7	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	07	1,446,496,315	1,212,468,495	9,890,000	0	1,427,427,435	1,124,885,959	5,080,000	0	19,068,880	87,582,536	4,810,000	0	1.32	7.22	48.63	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	0.78	2.95	0.17	0.00	3.90	0.92	100.00	
8	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	08	1,446,794,003	1,449,723,705		0	1,405,057,985	1,021,866,937		0	41,726,038	427,857,168	0	0	2.88	29.51	0.00	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	1.70	12.04	0.00	0.00	13.74	2.53	100.00	
9	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	09	1,446,810,003	793,031,108		0	1,420,478,677	813,275,889		0	26,331,326	20,244,781	0	0	1.82	2.55	0.00	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	1.07	1.04	0.00	0.00	2.11	2.48	100.00	
10	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	10	1,429,278,358	1,503,947,995	4,200,000	0	1,423,748,009	1,476,921,804	4,200,000	0	5,530,349	27,026,191	0	0	0.39	1.80	0.00	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	0.23	0.73	0.00	0.00	0.96	2.33	100.00	
11	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	11	1,437,587,720	979,278,850	2,255,000	0	1,406,074,237	981,097,965		0	31,513,483	1,819,115	2,255,000	0	2.19	0.19	100.00	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	2.23	100.00	
12	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	12	1,437,587,720	979,278,850	2,255,000	0	1,406,074,237	981,097,965		0	31,513,483	1,819,115	2,255,000	0	2.19	0.19	100.00	0.00	58.86	40.80	0.34	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	2.23	100.00	

Nilai deviasi Halaman III DIPA BBKK Tanjung Priok tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN adalah 100. Indikator deviasi Halaman III DIPA mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 tahun 2022 ke tahun 2024, yakni deviasi bulanan semula dihitung hanya berdasarkan rata-rata per jenis belanja menjadi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Selain itu, bobot penilaian IKPA untuk deviasi halaman III DIPA dari 10% menjadi 15%.

c) Penyerapan anggaran:

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Tabel 3. 22
Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yakni :

Jenis Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
51	20%	50%	75%	95%
52	15%	50%	70%	90%
53	10%	40%	70%	90%

Nilai Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN adalah 99,10, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.22 berikut ini

Tabel 3. 23
Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

INDIKATOR PENYERAPAN

Periode	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Revisi Ke	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja				Keterangan	Realisasi dan NKPA Per Jenis Belanja				NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
						51	52	53	57		51	52	53	57		
01	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	1	Pagu Jenis Belanja	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	508,298,178	343,572,324	0	0	16.89	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	17.41%	16.32%	0.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%							
					Nominal Target	2,919,067,350	2,104,671,900	11,723,500	0	NKPA Tertimbang	10.08	6.81	0.00	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							
02	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	1	Pagu Jenis Belanja	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	1,853,531,693	1,785,474,918	0	0	71.79	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	63.50%	83.88%	0.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%							
					Nominal Target	2,919,067,350	2,104,671,900	11,723,500	0	NKPA Tertimbang	36.77	35.02	0.00	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							
03	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	1	Pagu Jenis Belanja	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	4,459,551,998	3,874,316,822	105,696,700	0	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	19,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%							
					Nominal Target	2,919,067,350	2,104,671,900	11,723,500	0	NKPA Tertimbang	57.90	41.75	0.35	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							

hal : 1 dari 4 halaman

tanggal cetak : 19-01-25 07:39:08 oleh : 416108



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

04	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	3	Pagu Jenis Belanja	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	5,912,606,248	4,882,886,507	105,696,700	0	73.39	86.70					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	75.96%	69.60%	100.00%	0.00%							
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%												
					Nominal Target	7,784,179,600	7,015,573,000	46,894,000	0								NKPA Tertimbang	43.98	29.06	0.35	0.00
					Target	40%	50%	40%	50%												

05	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	3	Pagu Jenis Belanja	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	7,979,525,128	5,982,974,012	105,696,700	0	93.85	96.93					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	100.00%	85.28%	100.00%	0.00%							
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%												
					Nominal Target	7,784,179,600	7,015,573,000	46,894,000	0								NKPA Tertimbang	57.90	35.60	0.35	0.00
					Target	40%	50%	40%	50%												

06	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	3	Pagu Jenis Belanja	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	10,130,951,110	6,597,620,551	105,696,700	0	97.51	98.76					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	10,460,449,000	14,031,146,000	117,235,000	0	% Realisasi	100.00%	94.04%	100.00%	0.00%							
					Proporsi Pagu Netto	57.90%	41.75%	0.35%	0.00%												
					Nominal Target	7,784,179,600	7,015,573,000	46,894,000	0								NKPA Tertimbang	57.90	39.26	0.35	0.00
					Target	40%	50%	40%	50%												



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

07	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	5	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	11,558,378,545	7,722,087,510	110,776,700	0	84.11	93.87					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	NKPA Tertimbang	51.70	32.07	0.34	0.00							
					Proporsi Pagu Netto	58.86%	40.80%	0.34%	0.00%								% Realisasi	87.83%	78.62%	100.00%	0.00%
					Nominal Target	13,159,235,700	9,821,802,200	82,064,500	0												
					Target	65%	70%	70%	75%												
08	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	5	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	12,963,436,510	8,743,954,047	110,776,700	0	94.65	97.39					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	NKPA Tertimbang	57.99	36.32	0.34	0.00							
					Proporsi Pagu Netto	58.86%	40.80%	0.34%	0.00%								% Realisasi	98.51%	89.03%	100.00%	0.00%
					Nominal Target	13,159,235,700	9,821,802,200	82,064,500	0												
					Target	65%	70%	70%	75%												
09	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	5	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	14,383,915,187	9,557,229,936	110,776,700	0	98.90	98.80					
					Blokir	0	0	0	0												
					Pagu Netto	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	NKPA Tertimbang	58.86	39.70	0.34	0.00							
					Proporsi Pagu Netto	58.86%	40.80%	0.34%	0.00%								% Realisasi	100.00%	97.31%	100.00%	0.00%
					Nominal Target	13,159,235,700	9,821,802,200	82,064,500	0												
					Target	65%	70%	70%	75%												



10	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	10	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	15,808,253,992	11,034,151,740	114,978,700	0	84.48	95.22
					Blokir	0	44,527,000	0	0							
					Pagu Netto	20,244,978,000	13,986,619,000	117,235,000	0	% Realisasi	82.10%	87.66%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	58.94%	40.72%	0.34%	0.00%							
					Nominal Target	19,232,729,100	12,587,957,100	105,511,500	0	NKPA Tertimbang	48.44	35.69	0.34	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							
11	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	10	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	17,213,737,433	12,195,228,392	114,978,700	0	92.54	97.24
					Blokir	0	44,527,000	0	0							
					Pagu Netto	20,244,978,000	13,986,619,000	117,235,000	0	% Realisasi	89.50%	96.88%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	58.94%	40.72%	0.34%	0.00%							
					Nominal Target	19,232,729,100	12,587,957,100	105,511,500	0	NKPA Tertimbang	52.75	39.45	0.34	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							
12	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	10	Pagu Jenis Belanja	20,244,978,000	14,031,146,000	117,235,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	19,636,672,653	13,801,693,426	116,907,800	0	100.00	99.10
					Blokir	0	44,527,000	0	0							
					Pagu Netto	20,244,978,000	13,986,619,000	117,235,000	0	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	58.94%	40.72%	0.34%	0.00%							
					Nominal Target	19,232,729,100	12,587,957,100	105,511,500	0	NKPA Tertimbang	58.94	40.72	0.34	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							

d) Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan (3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%). Nilai Belanja Kontraktual BBKK Tanjung Priok tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 100.

- Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I adalah kontrak belanja barang/modal dengan nilai di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan untuk kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak dini) adalah sebesar 0. Poin yang diberikan untuk data kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 0.

- Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak belanja modal terhadap seluruh data kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Penyelesaian kontrak belanja modal yang dimaksud adalah penyelesaian pembayaran atas belanja modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai dengan Rp200 juta. Penyelesaian pembayaran yang dimaksud mengacu pada tanggal SP2D. poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian kontrak belanja modal yakni :

1. Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 0;
2. Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 0;
3. Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100; dan
4. Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100.

- Komponen distribusi akselerasi kontrak (bobot 20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan Triwulan III dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan III yakni :

- 1) Rasio >75% (nilai 100)
- 2) $50,01\% < \text{Rasio} \leq 75\%$ (nilai 80)
- 3) $25,01\% < \text{Rasio} \leq 50\%$ (nilai 60)
- 4) $0,01\% < \text{Rasio} \leq 25\%$ (nilai 50)
- 5) Rasio = 0% (nilai 0)

Tabel 3. 24
Parameter Belanja Kontraktual BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

INDIKATOR BELANJA KONTRAKTUAL

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
					Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
1	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	01	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	02	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	03	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	04	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	05	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	06	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	07	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
8	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	08	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
9	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	09	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
10	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	10	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
11	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	11	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
12	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	182	12	1	1	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00

e) **Penyelesaian Tagihan**

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPMLS Kontraktual pada Satker. Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Nilai Penyelesaian tagihan tahun 2024 pada aplikasi OM SPAN 100, artinya seluruh SPM LS kontraktual disampaikan dengan tepat waktu ke KPPN. Berikut dilampirkan tabel Indikator Penyelesaian Tagihan di BBKK Tanjung Priok, sebagai berikut :

Tabel 3. 25
Indikator Penyelesaian Tagihan di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

LAPORAN INDIKATOR KINERJA PENYELESAIAN TAGIHAN

No.	Kode Satker	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen	Rincian
1	416108	01	0	0	0	0.00	Rincian SPM
2	416108	02	0	0	0	0.00	Rincian SPM
3	416108	03	0	0	0	0.00	Rincian SPM
4	416108	04	0	0	0	0.00	Rincian SPM
5	416108	05	0	0	0	0.00	Rincian SPM
6	416108	06	0	0	0	0.00	Rincian SPM
7	416108	07	1	0	1	100.00	Rincian SPM
8	416108	08	1	0	1	100.00	Rincian SPM
9	416108	09	1	0	1	100.00	Rincian SPM
10	416108	10	1	0	1	100.00	Rincian SPM
11	416108	11	1	0	1	100.00	Rincian SPM
12	416108	12	1	0	1	100.00	Rincian SPM

f) **Pengelolaan UP dan TUP : 95,02**

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu Pertanggungjawaban UP (GUP) dan Pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai dari komponen :

- Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%) Dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNBK. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari subkomponen Nilai Kinerja :Ketepatan waktu (bobot 50%), Persentase GUP disebulankan (25%), Setoran TUP (25%)
- Pengelolaan UP KKP (bobot 10%) Dihitung untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.Nilai Pengelolaan UP/TUP BBKK Tanjung Priok pada tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapat nilai 95,02.

g) **Dispensasi SPM**

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Indikator dispensasi SPM ini mengalami reformulasi untuk

penilaian IKPA tahun 2024, dimana sebelumnya menjadi salah satu indikator yang memiliki bobot 5%, sekarang dihitung diluar komponen nilai IKPA yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

h) Capaian *Output* pada tahun 2024 didapatkan hasil 100

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker.

Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus). Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan terlambat adalah sebesar 0 (nol)

Nilai Kinerja Komponen Capaian RO dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO,
- b. Ketentuan target capaian RO adalah sebagai berikut:
 - Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO yang diproksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan
 - Target capaian RO triwulan IV sebesar target RO dalam DIPA
 - Apabila dalam triwulan I sampai dengan triwulan III PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA
- c. Terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja Capaian *Output* diberikan maksimal sebesar 100 (seratus).
- d. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status Terkonfirmasi.

Tabel 3. 26
Indikator Kinerja Capaian Output di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

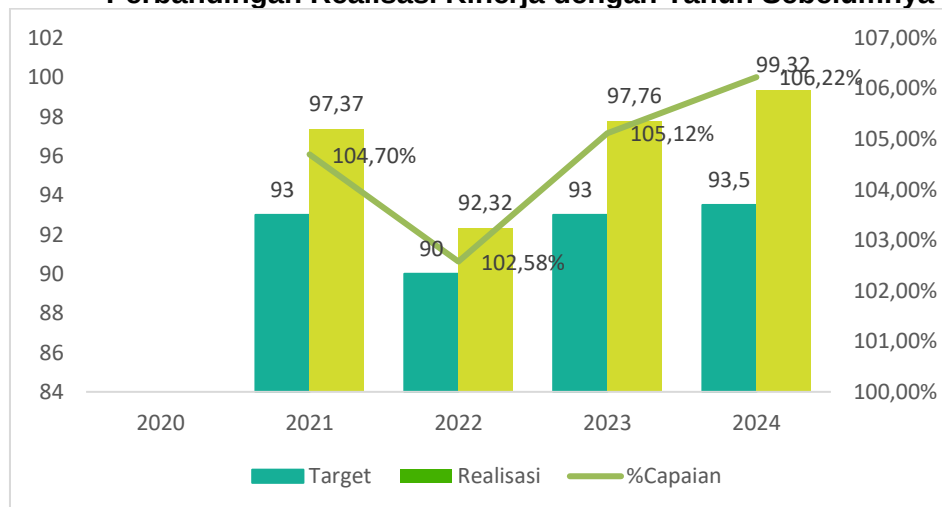
DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	01	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00
2	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	02	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00
3	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	03	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00
4	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	04	30	2,712.09	90.40	100.00	93.28
5	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	05	30	2,555.16	85.17	100.00	89.02
6	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	06	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00
7	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	07	30	2,996.87	99.88	100.00	99.22
8	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	08	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00
9	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	09	30	2,928.00	97.60	100.00	98.32
10	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	10	30	2,908.11	96.94	100.00	97.86
11	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	11	30	2,766.59	92.22	100.00	94.55
12	410108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	12	30	3,000.00	100.00	100.00	100.00

Jika dilihat dari realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama tiga tahun terakhir, tahun 2024 merupakan tahun dengan nilai IKPA tertinggi yaitu mencapai 99,32. Pelaksanaan indikator kinerja untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 telah memenuhi target namun BBKK Tanjung Priok masih harus terus berupaya melakukan perbaikan terutama untuk:

1. Proporsi penyerapan
2. Pengelolaan UP dan TUP

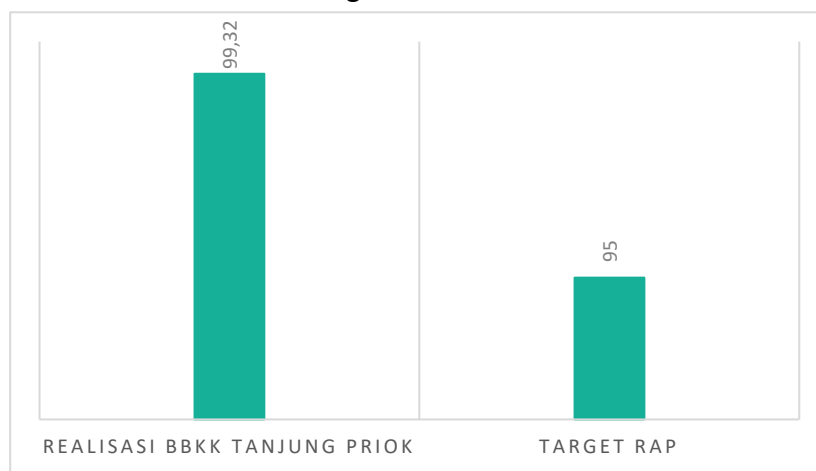
Grafik 3. 24
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024. Realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 99,32. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2022 terhadap realisasi sampai tahun 2024 maka capaiannya adalah $(99,32/90 \times 100\% = 110,35\%)$, yang artinya pada tahun 2024 ini kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah.

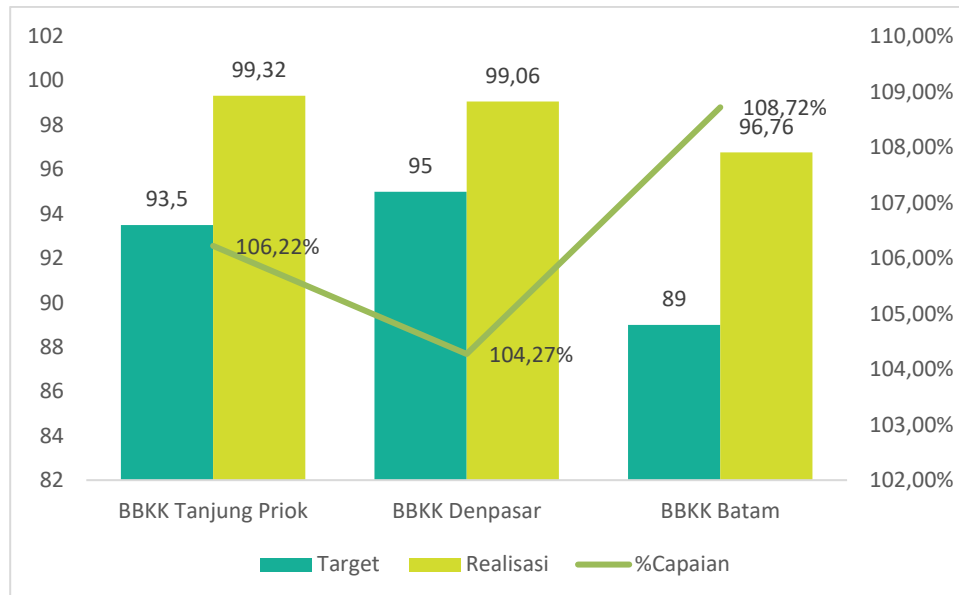
Diperlukan upaya peningkatan capaian melalui upaya realisasi anggaran sesuai proporsi penyerapan berdasarkan proporsi penyerapan secara triwulan sehingga penyerapan anggaran terutama belanja modal dan barang tidak diakhir tahun dan mengurangi deviasi realisasi dengan yang direncanakan.

Grafik 3. 25
Perbandingan Capaian Indikator BBKK Tanjung Priok
dengan RAP Tahun 2024



Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian BBKK Tanjung Priok pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 telah melebihi target indikator tersebut pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu 95. Jika dibandingkan dengan target nasional dalam Renstra Kemenkes maka, pada tahun 2024 Tanjung Priok telah berhasil melampaui target nasional Dimana realisasi pada tahun ini mencapai telah mencapai 104,54%. Secara tidak langsung dapat disimpulkan, BBKK Tanjung Priok telah berkontribusi dalam pencapaian target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara nasional.

Grafik 3. 26
Perbandingan Target dan Capaian Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBKK Tanjung Priok dengan
BBKK Denpasar, dan BBKK Batam Tahun 2024



Dapat dilihat pada grafik BBKK Tanjung Priok memperoleh nilai lebih tinggi dari pada BBKK lainnya. Hal ini bias dikarenakan, bobot nilai penyerapan dan konsistensi RPK RPD di BBKK Tanjung Priok tinggi sehingga mempengaruhi nilai capaian IKPA.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- Telah Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan.
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dilakukan revolving dalam jangka waktu satu bulan sekali dengan syarat sudah mencapai 50%.
- Tidak adanya keterlambatan penginputan ADK Kontrak di Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- Tidak ada kesalahan/pengembalian SPM: operator melakukan pengecekan

terhadap redaktur, nomer rekening penerima, akun yang digunakan sebelum melakukan penginputan SPM

- f) Menetapkan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis yang memiliki
- g) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian *output* dengan penyerapan anggaran.
- h) Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- i) Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- j) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

Nilai IKPA tahun 2024 adalah 99,32 hal ini didukung oleh beberapa hal antara lain :

- a) terselesaikannya tagihan secara tepat waktu
- b) tersampainya kontrak secara tepat waktu
- c) Minimalisir terdapatnya pengembalian SPM
- d) Tidak terdapatnya pengajuan Dispensasi SPM sampai dengan akhir tahun anggaran
- e) Sebelum mengajukan realisasi anggaran BBKK Tanjung Priok menggunakan aplikasi s.id digital keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan untuk menghindari kesalahan SPM.
- f) Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- g) Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP.
- h) Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- i) Menghindari adanya dispensasi SPM.
- j) Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening

penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.

- k) Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
- l) Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN

7. Kendala / Permasalahan

Dalam pelaksanaan anggaran, sering kali terjadi dana UP (Uang Persediaan) atau TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang telah dicairkan tidak dapat diserap sepenuhnya. Permasalahan ini dapat timbul karena berbagai faktor, seperti realisasi biaya yang lebih rendah dari estimasi awal.

8. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Secara rutin membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki.
- b) Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
- c) Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan
- d) Masing-masing substansi melakukan monitoring terhadap RPK/RPD, agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan target awal yang telah disusun
- e) Memperkuat proses perencanaan dan estimasi anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp83.816.000 untuk memenuhi target indikator Nilai Indikator kinerja anggaran. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 realisasi anggaran pada indikator ini Rp82.336.639 (98,23%), dengan dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,22% (melampaui target), dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensi anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak Rp 1.479.361 Efisiensi tersebut berasal sisa transport yang dibayarkan *at cost* dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui daring.

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level *output* RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AARO_i : Alokasi Anggaran
RARO_i : Realisasi Anggaran
CRO_i : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 68%, dengan realisasi anggaran 98,23% dapat mencapai kinerja 106,22%.

Indikator keenam
Kinerja implementasi WBK satker

1. Pengertian

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Implementasi WBK berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Outcome indikator ini antara lain :

- a) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen pendukung laporan evaluasi RB satker dan Kementerian.
- b) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen penilaian kinerja satker oleh Ditjen P2P.
- c) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen penilaian kinerja satker dalam penilaian SAKIP
- d) Meningkatnya kualitas satker dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini yaitu perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

3. Cara Perhitungan

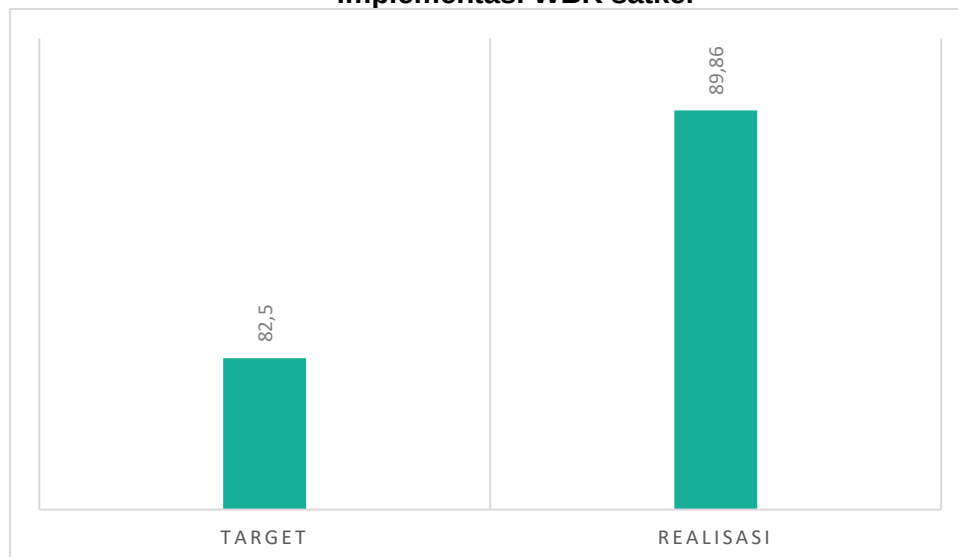
Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

Komponen penilaian tersebut meliputi:

- a) Komponen Pengungkit (60%)
Komponen pengungkit terdiri dari dua aspek yaitu aspek pemenuhan (30%) dan aspek reform (30%).
- b) Komponen Hasil (40%)
Komponen hasil terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,5%) dan pelayanan publik prima (17,5%)

4. Capaian Kinerja

Grafik 3. 27
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kinerja implementasi WBK satker



Target indikator Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 82,5. Capaian indikator Kinerja implementasi WBK satker di tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian dari tim kerja Hukormas Direktorat Jenderal P2P sebesar 89,86. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa

untuk indikator Nilai Indikator Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,86, sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,92%. Hasil capaian indikator Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 berhasil melewati target karena adanya monitoring setelah pertemuan rapat WBK hal itu berdampak dari percepatan pengumpulan dokumen.

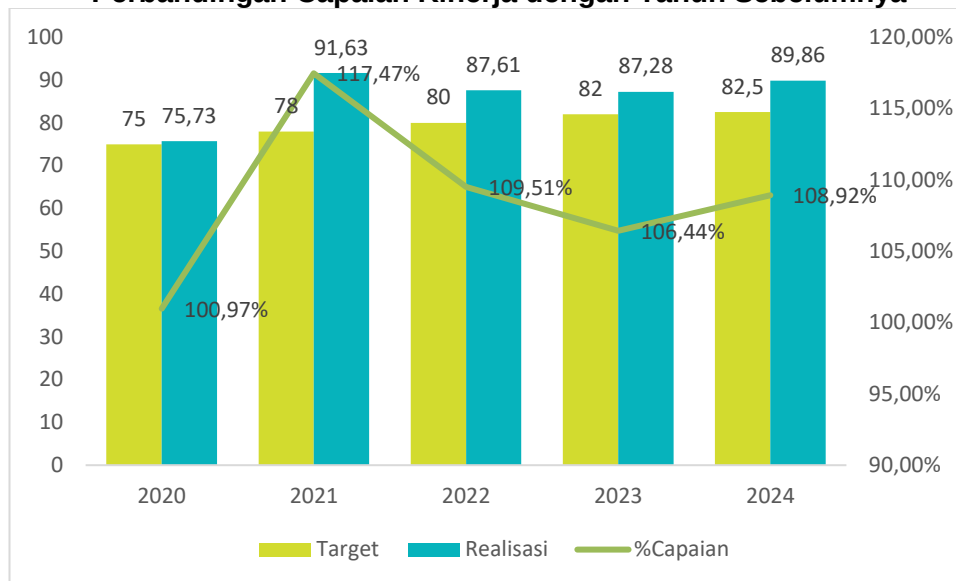
Rincian Nilai Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 27
Rincian Nilai Kinerja Implementasi WBK
BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

Adapun hasil desk disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	60	53
A.	Aspek Pemenuhan	30	25.44
1	Manajemen Perubahan	4	3.49
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3.13
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.54
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.73
5	Penguatan Pengawasan	7.5	5.72
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3.83
B.	Aspek Reform	30	27.56
1	Manajemen Perubahan	4	4
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3.33
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.25
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.51
5	Penguatan Pengawasan	7.5	6.88
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4.59
II	KOMPONEN HASIL	40	36.86
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.5	20.27
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.5	16.52
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	3.75
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17.5	16.59
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17.5	16.59
TOTAL NILAI		100	89.86

Grafik 3. 28
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Target capaian kinerja tahun 2024 sebesar 82,5, realisasi sebesar 89,86 dengan capaian kinerja 108,92%. Adapun pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 87,28 dari target 82 dengan capaian kinerja 106,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 persentase capaian nilai Kinerja Implementasi WBK satker pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2,48%. Kenaikan ini terjadi karena komponen penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan capaian kinerja dari capaian kinerja sebelumnya sudah melakukan perbaikan dan mendapatkan nilai memuaskan, melihat dari dokumen dan hasil analisis yang diberikan BBKK Tanjung Priok sudah melewati standar dokumen dari tim penilai

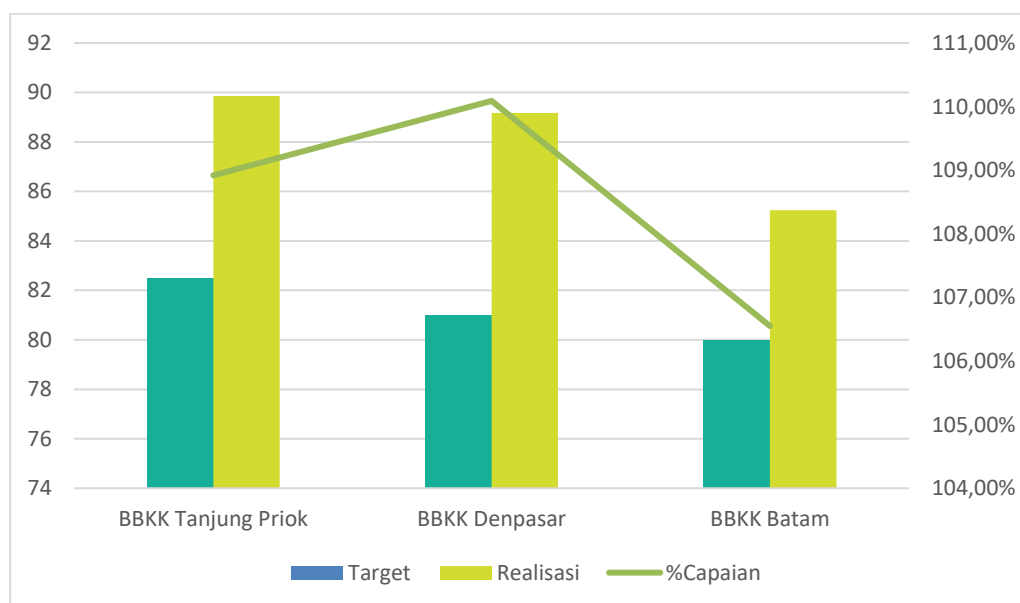
Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2027. Target jangka menengah ditentukan dengan capaian Indikator Kinerja implementasi WBK satker dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu mencapai 82,5. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 yang dicapai sebesar 89,86.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2022 terhadap realisasi sampai tahun 2024 maka capaiannya yaitu sebesar $(89,86/80 \times 100\% = 112,32\%)$, dengan tingkat capaian tersebut pada tahun 2024 ini kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target, sehingga dapat

disimpulkan kinerja BBKK Tanjung Priok telah melampaui target kinerja jangka menengah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020- 2024 tidak terdapat indikator nilai kinerja implementasi WBK Satker, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator RAP P2P sebesar 60.

Grafik 3. 29
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja implementasi WBK satker BBKK Tanjung Priok dengan, BBKK Denpasar, dan BBKK Batam Tahun 2024



Dapat dilihat pada grafik di atas persentase capaian BBKK Denpasar lebih tinggi dari pada persentase capaian di BBKK lainnya. Target dan Realisasi BBKK Tanjung Priok untuk tahun 2024 ini lebih besar dari BBKK Batam, BBKK Denpasar. BBKK Tanjung Priok mempunyai keinginan untuk menggapai cita-cita yang belum terealisasi dari tahun 2016 saat di tetapkannya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk menjadi UPT Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), oleh karena itu target setiap tahun di naikan agar dorongan untuk realisasi kinerja makin meningkat.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- a) Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala
- c) Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan *pre assessment*;
- d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat;
- e) Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
- f) Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
- g) Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
- h) Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen pengungkit Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- i) Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan Publik

6. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a) Ditetapkannya Zona Integritas (ZI) di wilayah Pelabuhan oleh Otoritas.
- b) Di bentuknya TIM pembangunan Zona Integritas yang bertanggung jawab untuk proses penilaian WBK, sehingga koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik;
- c) Keterlibatan seluruh SDM mulai tingkat Pimpinan sampai tingkat yang terendah Laporan Monitoring masing-masing Pokja.

7. Kendala/Masalah yang dihadapi

- a) Tidak semua Pokja mampu menyediakan data atau dokumen pendukung yang sesuai dengan indikator yang dinilai ketika penilaian dengan Tim Pengendalian Internal. Beberapa dokumen mungkin tidak terdokumentasi dengan baik atau sulit dilacak sehingga Penilaian menjadi tidak akurat karena kekurangan bukti objektif.

8. Usul Pemecahan masalah

- a) Tugaskan tim kecil untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen sebelum pelaksanaan self-assessment.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tahun 2024 Pagu Anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp186.029.000,- untuk memenuhi target indikator Kinerja implementasi WBK satker. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, realisasi anggaran pada indikator ini sebesar Rp 165.412.180,- (88,92%), dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 108,92% (melampaui target), dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensi anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak Rp 20.616.820,- dan Pagu Blokir sebesar Rp 4.850.000,-. Efisiensi tersebut berasal sisa layanan umum (pengelolaan kantor berhias dan transport perjalanan dinas pengelolaan barang dan jasa) dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi karena pertemuan rencana strategi diundur menjadi kegiatan tahun 2025 dengan terbatasnya anggaran/ pemotongan anggaran perjalanan dinas di pusat maupun di UPT.

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level output RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
AAROI : Alokasi Anggaran
RAROI : Realisasi Anggaran
CROI : Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja implementasi WBK satker telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 96%. Dengan anggaran 88,92% dapat mencapai kinerja 108,92%.

Indikator ketujuh

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

1. Pengertian

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1(satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN BBKK Tanjung Priok untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

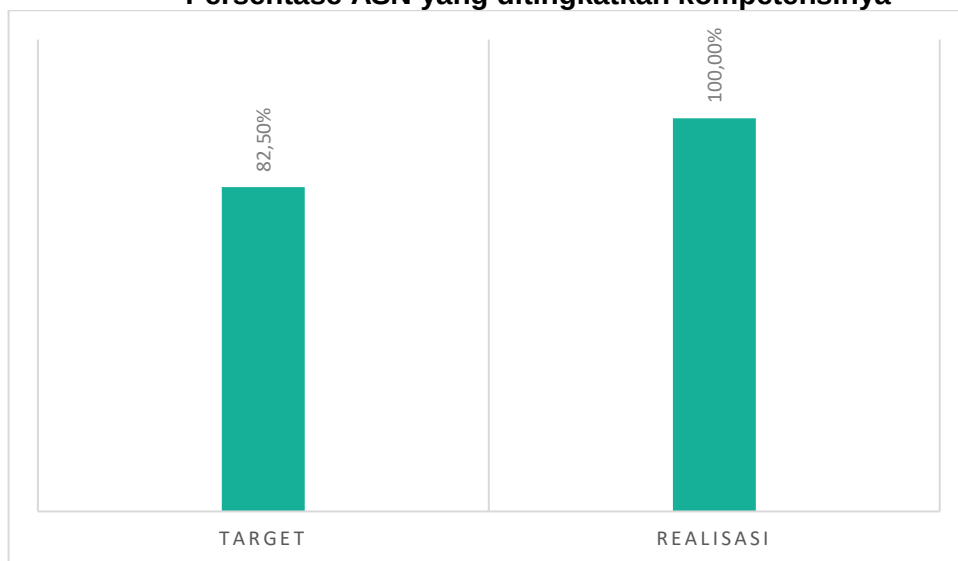
3. Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 JPL}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$$

4. Capaian Kinerja

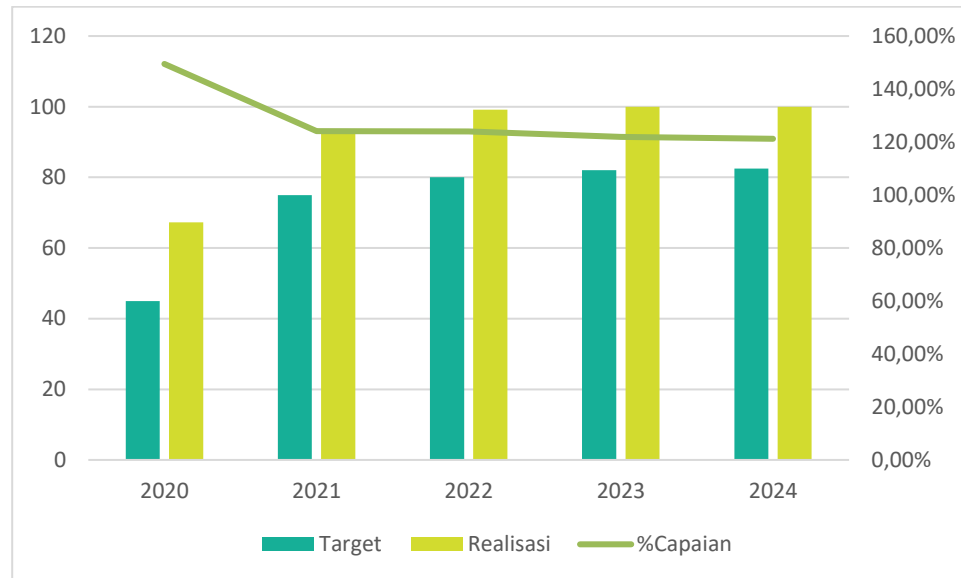
Grafik 3. 30
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya



Pada tahun 2024 jumlah ASN BBKK Tanjung Priok sebanyak 121 orang, adapun ASN yang ditingkatkan kompetensinya selama satu tahun adalah sebanyak 121 orang. Target capaian kinerja tahun 2024 sebesar 82,5% (100 orang) ASN yang ditingkatkan kompetensinya, realisasi sebesar 100% (121 orang) dengan capaian kinerja 121,21%.

Grafik 3. 31

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah pegawai dari 116 menjadi 121 hanya saja capaian realisasi masih sebesar 100%. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya fasilitas melalui media virtual/ daring sehingga pemenuhan kompetensi pegawai tetap dapat berjalan. Peningkatan kapasitas pegawai melalui non klasikal melalui metode mentoring, coaching, pelatihan jarak jauh dan e-learning. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan pada tahun 2024 melalui program izin belajar dan tugas belajar. Sedangkan peningkatan kapasitas pegawai melalui jalur klasikal melalui pelatihan teknis, pelatihan fungsional, seminar/konferensi, workshop/lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi. Dari sisi capaian Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya mengalami penurunan, hal ini disebabkan dimana tahun 2023 dan tahun 2024 realisasinya 100% dan targetnya mengalami kenaikan sebesar 0,50%.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Revisi ke-5. Target jangka menengah ditentukan dengan capaian Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu mencapai 82,5%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 yang dicapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2022 terhadap realisasi sampai tahun 2024 maka capaiannya yaitu sebesar $(100/80 \times 100\% = 125\%)$, dengan tingkat capaian tersebut pada tahun 2024 ini kinerja BBKK Tanjung Priok telah melebihi target jangka menengah sebesar 25%, sehingga dapat disimpulkan kinerja BBKK Tanjung Priok telah melampaui target kinerja jangka menengah.

Dengan adanya pencapaian tahun 2024 yang melebihi dari target kinerja jangka menengah, serta adanya peluang kegiatan peningkatan kapasitas ASN secara online dan tidak berbayar, dan juga telah dianggarkannya kegiatan peningkatan kapasitas pada tahun 2024 yang mencakup kegiatan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, seminar/konferensi, workshop/lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi. Maka, tahun 2024 BBKK Tanjung Priok mampu meningkatkan capaian untuk indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam Rencana Strategis Kemenkes tahun 2020-2024 terdapat indikator jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 6000 orang pada tahun 2024, sehingga persentase ASN BBKK Tanjung Priok yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 100% dapat mendukung pencapaian indikator Rencana Strategis tersebut. Diharapkan tahun 2024 capaian kinerja terus meningkat sehingga seluruh ASN BBKK Tanjung Priok dapat ditingkatkan kompetensinya minimal sebanyak 20 JP per tahun.

Grafik 3. 32
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Persentase ASN yang
ditingkatkan kompetensinya BBKK Tanjung Priok dengan BBKK Denpasar,
dan BBKK Batam Tahun 2024



Dapat dilihat pada grafik di atas persen capaian BBKK Denpasar yaitu 120,48%, dan BBKK Batam yaitu 125%, untuk capaian BBKK Tanjung lebih tahun 2024 ini lebih tinggi dari BBKK Denpasar karena target indikator BBKK Medan dan BBKK Denpasar lebih tinggi dari BBKK Tanjung Priok. Perbedaan realisasi kinerja berbeda-beda antara masing-masing BBKK dikarenakan perbedaan target yang signifikan. Selain itu capaian kinerja BBKK Batam lebih tinggi disebabkan karena Target indikatornya lebih rendah dari BBKK lain hanya sebesar 80%. Jadi penetapan target sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya meskipun realisasi sama 100%.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- a. Penugaskan pegawai yang belum mengikuti pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
- b. Menyediakan alokasi anggaran untuk mengikuti pelatihan melalui DIPA BBKK Tanjung Priok, Berikut dukungan anggaran untuk pelaksanaan aktivitas yang menunjang kegiatan tersebut diantaranya:

- Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
- Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
- Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang epidemiologi dan karantina
- Workshp Pengelolaan data dan Informasi Kekarantinaan
- Pelatihan Basic Sea Survival dan Keselamatan Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok
- Pelatihan Advance Sea Survival dan Keselamatan Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok
- Pelatihan Pengambilan Spesimen Lingkungan
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang Epidemiologi
- Pelatihan Pengambilan Spesimen Tikus
- Seminar di Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan
- Pelatihan BTCLS, PPI, Defensive Driving, USG dan 3rd InWOCNA Scientific Meeting
- Simulasi Basic Life Support Bagi Petugas Medis dan Non Medis
- Simulasi Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan
- Peningkatan Kapasitas Petugas BBKK
- Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum
- Implementasi Budaya Pelayanan Prima
- In House Training Penggunaan Handphone dalam seni Fotografi
- Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)
- Penyelenggaraan UKOM (daring) jabfung kesehatan lingkup Ditjen P2P
- Pelatihan Scuba Dasar dan HUET (Helicopter Underwater Escape Training)
- Bintek/Workshop Public Speaking
- Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)
- Diklat/seminar/ kursus dukungan manajemen
- OJT Menuju Inovasi Pelayanan Prima dalam Percepatan Menuju WBBM

- c. Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN di lingkungan BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi pendidikan maupun kompetensi jabatan melalui program tugas belajar dan mengikuti pelatihan jabatan fungsional.
- d. Peran aktif seluruh pegawai yang selalu berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Pembina Jabatan Fungsional masing-masing sehingga dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pelatihan yang akan diselenggarakan

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

- a) Perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga pemenuhan kebutuhan akan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan secara fleksibel
- b) Pegawai yang telah jabatan fungsional jumlahnya semakin banyak sehingga mendorong untuk memenuhi angka kredit melalui peningkatan kompetensi seperti seminar dan pelatihan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian Peningkatan kapasitas ASN secara mandiri melalui aplikasi <https://www.rudiku.com/kapasitas-pegawai>
- d) Adanya keterbukaan informasi pelatihan dari seluruh ASN yang selalu dibagi dalam grup whatsapp BBKK Tanjung Priok .
- e) Komitmen yang tinggi dari pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan.
- f) Adanya dukungan anggaran peningkatan kapasitas SDM dalam DIPA BBKK Denpasar.

7. Kendala / Masalah yang dihadapi

- a) Monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi belum berjalan maksimal karena pelaporan pegawai belum dilaksanakan secara rutin dan banyak pegawai yang tidak melaporkan kegiatan peningkatan kompetensi yang telah diikuti.

8. Pemecahan masalah

- a) Membuat Sistem informasi yang mudah untuk pelaporan peningkatan kompetensi pegawai

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp2.502.113.000,- untuk memenuhi target indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, realisasi anggaran pada indikator ini sebesar Rp2.462.408.633,- (98,41%), dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 121,21% (melampaui target), dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisienkan anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak sisa anggaran sebesar Rp 39.704.367,- dan Pagu Blokir sebesar Rp 10.988.000,- Efisiensi tersebut berasal sisa transport yang dibayarkan *real cost* dan kegiatan yang dilaksanakan melalui daring.

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level output RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	: Efisiensi
AARO _i	: Alokasi Anggaran
RARO _i	: Realisasi Anggaran
CRO _i	: Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE	: Nilai Efisiensi
----	-------------------

E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 98%, dengan realisasi anggaran 98,41% dapat mencapai kinerja 121,21% dengan hal ini didukung beberapa faktor : adanya POA, adanya kegiatan rapat monitoring disetiap bulannya, dan publikasi ke group BBKK Tanjung Priok dengan nama pegawai yang belum mencapai 20 JPL di setiap bulannya.

Indikator kedelapan

Persentase Realisasi Anggaran

1. Pengertian

Pada tahun 2023 Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023 hal: Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat penambahan dua indikator yang terkait dengan realisasi anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Persentase realisasi anggaran adalah rasio antara jumlah anggaran yang telah terealisasi atau dihabiskan dengan jumlah anggaran yang seharusnya direalisasikan atau dialokasikan program kegiatan.

Hasil perhitungan persentase realisasi anggaran memberikan gambaran sejauh mana anggaran yang telah direncanakan telah terealisasi. Jika persentase tinggi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana anggaran. Sebaliknya, persentase yang rendah dapat menunjukkan adanya penundaan atau masalah dalam pengelolaan anggaran.

Penting untuk terus memantau persentase realisasi anggaran selama pelaksanaan program untuk memastikan bahwa realisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

3. Cara Perhitungan

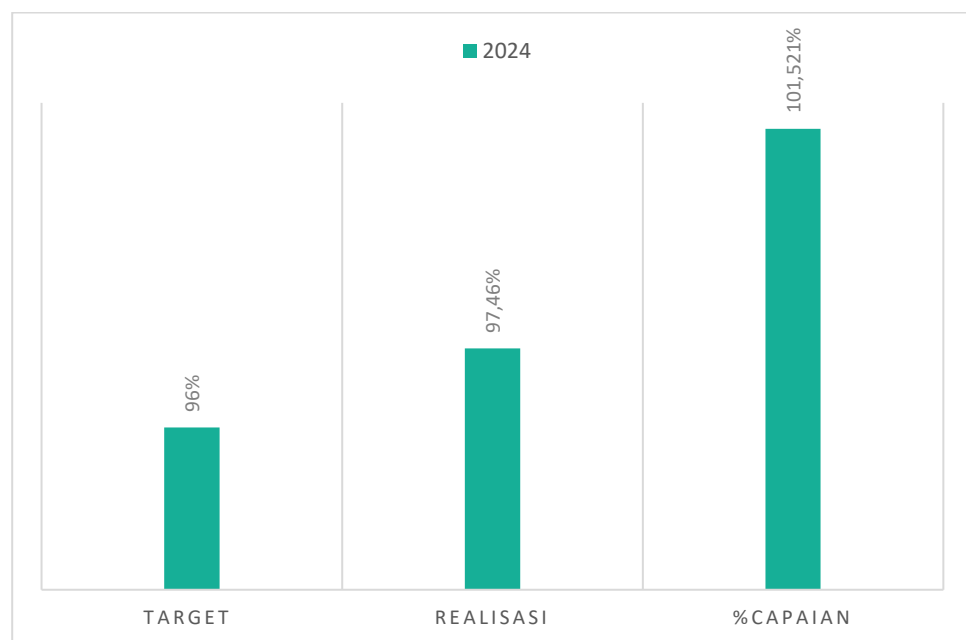
Jumlah Realisasi Anggaran berdasarkan OMSPAN dibagi dengan target capaian kinerja anggaran satker pada akhir tahun anggaran yang direncanakan dikali 100%.

Rumus :

$$= \frac{\text{Persentase Realisasi anggaran berdasarkan OMSPAN}}{\text{Target Capaian Kinerja Anggaran Satker pada akhir tahun anggaran}} \times 100\%$$

4. Capaian Kinerja

Grafik 3. 33
Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024



Pada tahun 2024 target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96% atau sebesar Rp33.017.624.640 dari Pagu anggaran sebesar Rp 34.393.359.000 Realisasi penyerapan BBKK Tanjung Priok pada tahun 2024 sebesar Rp Rp33.520.385.189 (97,46%%) dengan persen capaian sebesar 101,52%.

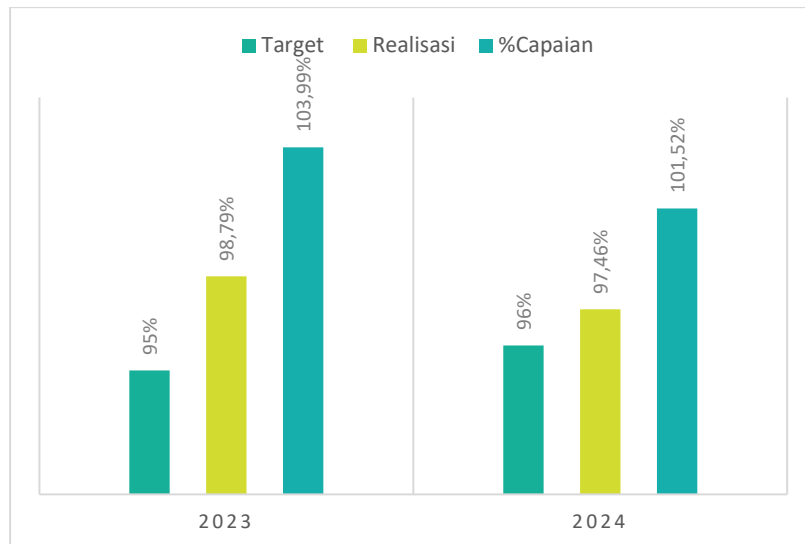
Tabel 3. 28
Distribusi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	20.244.978.000	19.601.783.963	96,82%
1	52 BELANJA BARANG	14.031.146.000	13.801.693.426	98,36%
2	53 BELANJA MODAL	117.235.000	116.907.800	99,72%

Berdasarkan Tabel 3.12 Realisasi Belanja terendah yaitu Belanja Barang. Belanja Barang terdiri dari surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang operasional lainnya, bahan, honor *output* kegiatan, barang non operasional lainnya, langganan listrik, langganan telepon, langganan air, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan perjalanan dinas. Belanja Barang yang tidak terserap sendiri berasal dari:

1. Anggaran layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus dikarenakan terdapat kebijakan kegiatan sehingga dibayarkan menggunakan lembur,
2. sisa anggaran Operasional pemeliharaan kantor
3. sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas

Grafik 3. 34
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

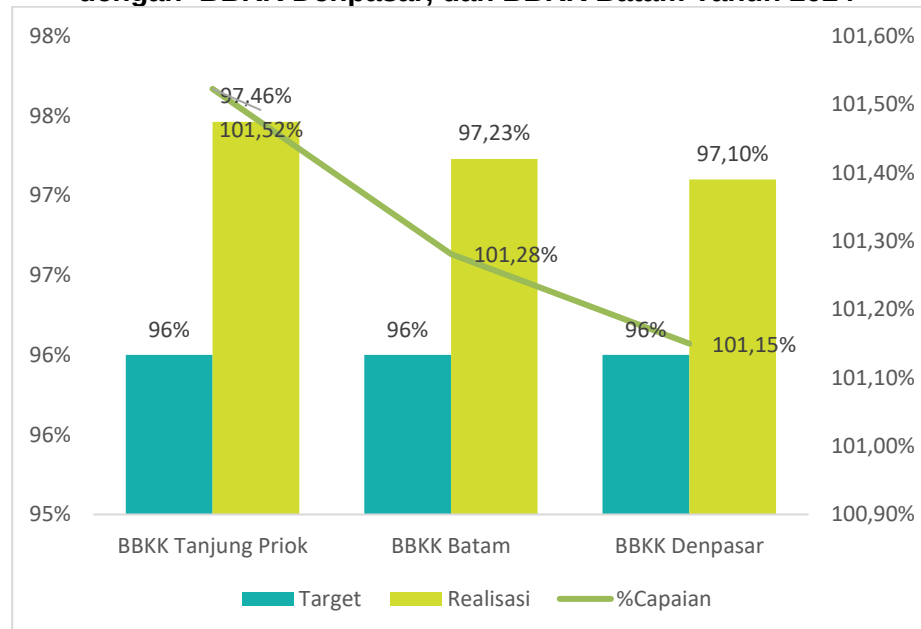


Indikator Persentase realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan persentase capaian dari Tahun 2023 sebesar 103,99% dan di Tahun 2024 sebesar 101,52% selisih 2,47%. Penurunan realisasi anggaran tahun ini sangat signifikan terdapat anggaran yang tidak terserap seperti Gaji dan Tunjangan karena ada pegawai yang sudah wafat, resign, dan pegawai tidak jadi bergabung di BBKK Tanjung Priok sebesar Rp732.314.103 maupun biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp124.008.756

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Jangka Menengah BBKK Tanjung Priok yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Revisi ke-5. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan target RAK jangka menengah dikarenakan Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2023 Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023 hal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator Persentase Realisasi anggaran, namun indikator ini mendukung indikator Nilai Kinerja Penganggaran sebesar 95%.

Grafik 3. 35
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran
dengan BBKK Denpasar, dan BBKK Batam Tahun 2024



BBKK Tanjung Priok mendapatkan persentase capaian tertinggi dari perbandingan BBKK Batam 101,28% dan BBKK Denpasar 101,15%. BBKK Tanjung Priok awal tahun 2024 memprediksi realisasi anggaran mencapai 99% dengan RPD dan POA yang sudah ditetapkan, hanya saja di pertengahan tahun tepatnya di bulan Oktober 2024 dengan adanya informasi pagu blokir dari perjalanan dinas, hal tersebut mengakibatkan kegiatan program menjadi terhenti sampai akhir tahun 2024.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

- Menyusun perencanaan anggaran;
- Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD yang ditetapkan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun non teknis;
- Melakukan revisi internal dan pemutakhiran data ke Kanwil DJPBN;

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

- a. Adanya pertemuan Tim Kerja terkait untuk menyusun perencanaan anggaran;
- b. Adanya pertemuan Tim Kerja terkait untuk menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Adanya pertemuan Tim Kerja terkait untuk memonitoring dan evaluasi anggaran;
- d. Melakukan revisi internal dan pemutakhiran data ke Kanwil DJPBn;

7. Kendala / Masalah yang dihadapi

- a. Pada triwulan 1 2024 penerimaan PNBPN belum mencapai target penerimaan sehingga pelaksanaan anggaran beberapa kegiatan yang bersumber dana PNBPN sempat tertunda.
- b. Diakhir tahun anggaran berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan nomor S-446/PB.2 /2024 tanggal 10 November 2024 hal penyampaian Rincian target Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Plt. Direktur Jenderal P2P Nomor PR.04.02/C/2855/2024 Tanggal 12 November 2024 hal Penetapan Distribusi Pagu Penghematan Dinas melalui Self Blocking Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P TA 2024 sehingga BBKK Tanjung Priok melakukan efisiensi akun perjalanan dinas.
- c. Masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap seperti Gaji dan Tunjangan Pegawai karena ada pegawai yang sudah wafat, resign, dan pegawai tidak jadi bergabung di BBKK Tanjung Priok sebesar Rp732.314.103 maupun biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp124.008.756

8. Pemecahan masalah

- a. Memilih kembali kegiatan-kegiatan bersumber dana PNBPN yang lebih prioritas.
- b. Melihat dan melakukan identifikasi kegiatan dan anggaran dalam DIPA yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan hingga akhir Desember dan melakukan penyesuaian RPK-RPD untuk selanjutnya dilakukan revisi level kewenangan KPA, dan atau Kanwil DJPBn.

- c. Memaksimalkan realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan teknis maupun non teknis.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tahun 2024 anggaran BBKK Tanjung Priok sebesar Rp28.826.548.000 untuk memenuhi target indikator Persentase Realisasi Anggaran. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran pada indikator ini sebesar Rp28.094.233.897 (97,46%), dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 101.52% (melampaui target), dapat diartikan juga bahwa BBKK Tanjung Priok berhasil mengefisiensi anggaran untuk mencapai (melampaui) target indikator ini sebanyak Rp732.314.103. Efisiensi tersebut berasal sisa Gaji dan Tunjangan Pegawai karena ada pegawai yang sudah wafat, resign, dan pegawai tidak jadi bergabung di BBKK Tanjung Priok maupun biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Berdasarkan hasil Evaluasi RB, setiap satker harus menyusun efisiensi sumber daya anggaran pada laporan kinerja pada level *output* RKAKL dengan rumus efisiensi pada emonev DJA. Formula efisiensi dengan membandingkan pejumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Alokasi anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran kemudian hasil tersebut dibagi dengan pagu anggaran keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	: Efisiensi
AARO _i	: Alokasi Anggaran
RARO _i	: Realisasi Anggaran
CRO _i	: Capaian

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

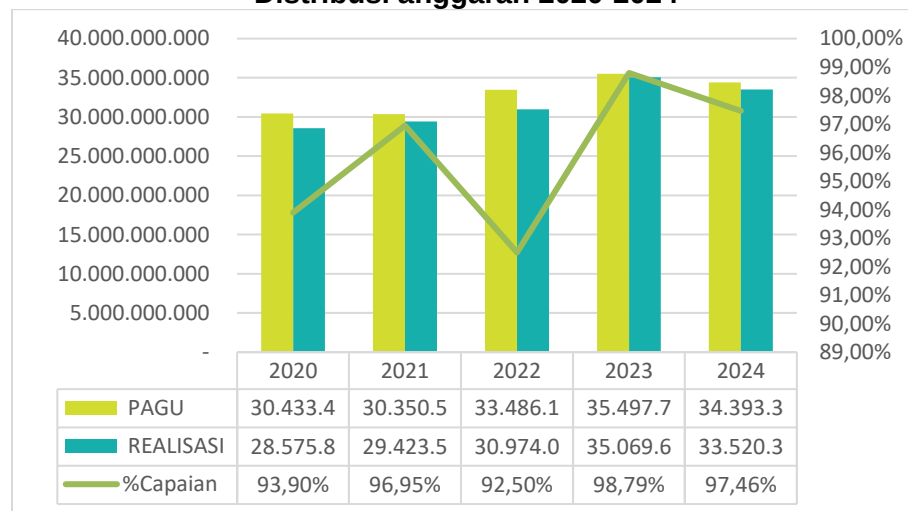
Berdasarkan perhitungan Persentase Realisasi Anggaran telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 59%, dengan anggaran 97,46% dapat mencapai kinerja 101,52%. Hal ini didukung beberapa faktor : adanya POA, kegiatan rapat monitoring disetiap bulannya dan melakukan Revisi POK dan DIPA anggaran BBKK Tanjung Priok.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Pengeluaran

Anggaran Pengeluaran Sumber anggaran pengeluaran BBKK Tanjung Priok adalah DIPA Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp34.393.359.000.

Grafik 3. 36
Distribusi anggaran 2020-2024



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran BBKK Tanjung Priok paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 98,79%. Persentase capaian realisasi anggaran meningkat Pada tahun 2023 disebabkan karena kebijakan *automatic adjustment* di kementerian kesehatan yang mempengaruhi realisasi anggaran disatuan kerja.

Tabel 3. 29
Distribusi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	20.244.978.000	19.601.783.963	96,82%
2	52 BELANJA BARANG	14.031.146.000	13.801.693.426	98,36%
3	53 BELANJA MODAL	117.235.000	116.907.800	99,72%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa alokasi belanja pegawai Rp20.244.978.000 dan telah terealisasi sebesar Rp19.601.783.963 (96,82%). Belanja pegawai ini dipergunakan untuk membayar gaji, uang makan, dan lembur pegawai. Alokasi belanja barang Rp14.031.146.000 dan telah terealisasi sebesar Rp13.801.693.426 (98,36%). Belanja barang ini terdiri dari : beban keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang operasional lainnya, bahan, honor *output* kegiatan, barang non operasional lainnya, langganan listrik, langganan telepon, langganan air, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan perjalanan dinas. Terdapat belanja modal pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp117.235.00 dan untuk realisasi anggarannya sebesar Rp116.907.800 atau sebesar 99,72%

Tabel 3. 30
Distribusi Per Sumber Pembiayaan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

No.	Kode Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	A RUPIAH MURNI	30.513.759.000	29.667.314.140	97,23%
2	D PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3.879.600.000	3.853.071.049	99,32%

Alokasi anggaran BBKK Tanjung Priok berasal dari 2 sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Sumber RM sebesar Rp30.513.759.000 dengan realisasi anggaran sebesar 97,23% sedangkan yang berasal dari PNPB yaitu Rp3.879.600 dengan realisasi sebesar 99,32%.

Tabel 3. 31
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4.390.945.000	4.352.482.110	99,12%
2	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	30.002.414.000	29.202.791.769	97,33%

Sebagian besar anggaran BBKK Tanjung Priok tahun 2024 dipergunakan untuk dukungan manajemen dan kegiatan surveilans dan karantina kesehatan.

2. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Pada tabel berikut ini digambarkan bahwa realisasi anggaran tertinggi pada indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 100% dan realisasi terendah pada indikator Nilai Kinerja Anggaran yakni sebesar 91,45%. Secara lengkap realisasi anggaran per indikator dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 32
Pagu dan Realisasi Anggaran Per BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

NO	Indikator	Pagu (P)	Realisasi (R)	Persen Realisasi
1.	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	2.539.739.000	2.507.693.870	98,74%
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	103.270.000	101.875.450	98,65%
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	84.979.000	82.954.610	97,62%
4.	Nilai kinerja anggaran	66.865.000	58.358.600	87,28%
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83.816.000	82.336.639	98,23%
6.	Kinerja implementasi WBK satker	186.029.000	165.412.180	88,92%
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	2.502.113.000	2.462.408.633	98,41%
8.	Persentase realisasi anggaran	28.826.548.000	28.094.233.897	97,46%

Pembandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 33
Pembandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Realisasi Capaian	Realisasi Anggaran
1.	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	104,35%	98,74%
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	101,52%	98,65%
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	100,00%	97,62%
4.	Nilai kinerja anggaran	112,88%	87,28%
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	106,22%	98,23%
6.	Kinerja implementasi WBK satker	108,92%	88,92%
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	121,21%	98,41%
8.	Persentase realisasi anggaran	101,52%	97,46%

3. Anggaran Penerimaan

Pada tahun 2024 BBKK Tanjung Priok menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp6.466.000.000 Realisasi penerimaan negara bukan pajak keseluruhan sebesar Rp11.056.022.004 atau 170,99% dari target.

4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 3. 34
Posisi Barang Milik Negara di BBKK Tanjung Priok per 31 Desember 2024

AKUN NERACA		JUMLAH
117111	Barang Konsumsi	752.543.864
117199	Persediaan Lainnya	747.565.401
131111	Tanah	22.988.046.000
132111	Peralatan dan Mesin	40.327.495.610
133111	Gedung dan Bangunan	28.556.959.738

AKUN NERACA		JUMLAH
134113	Jaringan	1.124.750.981
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.343.089.250)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.895.615.505)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(448.185.178)
162151	Software	473.310.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	112.344.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(53.689.520)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(473.310.000)
J U M L A H		52.869.126.141

Tabel 3. 35
Rinciaan Aset Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	Luas Tanah	16.371 m ²
2	Luas Bangunan	4.812,76 m ²
3	Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440 Unit

5. Realisasi Per Rincian Output

Tabel 3. 36
Rincian Realisasi dan rincian Volume Output BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progre s
1	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS) (kegiatan)	723.414.000	695.247.917	12	12	100
2	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang. Akta.	012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS) (Orang)	108.720.000	105.466.026	88	88	100

	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
	Keping. Bidang)						
3	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS) (layanan)	164.886.000	164.240.450	69	69	100
4	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	017 layanan pemeriksaan orang. barang. alat angkut (HS) (layanan)	181.872.000	179.582.929	31	31	100
5	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS) (layanan)	152.550.000	152.509.000	54	54	100
6	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS) (layanan)	11.496.000	11.485.000	24	24	100
7	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS) (layanan)	51.840.000	51.838.130	144	144	100
8	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS) (layanan)	17.280.000	17.279.000	48	48	100
9	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS) (layanan)	36.792.000	36.766.000	28	28	100

	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progre s
10	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan. bidang. dokumen. Miliar Rp. titik)	U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS) (layanan)	76.370.000	76.009.000	14	14	100
11	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket. Unit)	001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaa kesehatan di pintu masuk (HS) (Paket)	1.202.768.000	1.202.100.478	12	12	100
12	TBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang. Layanan. Rekomendasi)	001 Pelatihan kesehatan (HS) (Orang)	1.662.957.000	1.659.958.180	464	487	100
13	AEA Koordinasi (kegiatan)	501 Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program (kegiatan)	32.097.000	31.934.920	7	9	100
14	AEA Koordinasi (kegiatan)	502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program (kegiatan)	22.555.000	18.113.800	9	10	100
15	AEA Koordinasi (kegiatan)	503 Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran (kegiatan)	44.310.000	40.244.800	10	10	100
16	AEA Koordinasi (kegiatan)	504 Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi (kegiatan)	1.864.000	1.863.500	2	2	100
17	AEA Koordinasi (kegiatan)	505 Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum (kegiatan)	177.739.000	154.387.314	57	63	100
18	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	8.831.000	8.062.200	3	3	100

	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progre s
19	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	15.255.000	13.540.000	3	3	100
20	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	119.355.000	114.472.860	3	3	100
21	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	73.267.000	71.859.075	4	4	100
22	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	32.970.000	24.043.235	3	3	100
23	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1.700.000	1.700.000	1	1	100
24	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan. Laporan. Dokumen.	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	28.826.548.000	28.094.233.897	12	12	100

	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progre s
	Rekomendasi. Unit)						
25	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang. Layanan. Rekomendasi)	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	306.810.000	305.984.000	177	177	100
26	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang. Layanan. Rekomendasi)	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	182.340.000	179.559.931	111	116	100
27	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	52.912.000	48.046.348	4	4	100
28	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	44.328.000	35.761.370	8	8	100
29	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	42.888.000	42.339.519	5	5	100
30	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi)	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	16.645.000	16.645.000	2	2	100

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2024. BBKK Tanjung Priok telah menetapkan sebanyak 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada pelaksanaannya, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) realisasinya sudah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2023 sebesar 107.08% dari 8 Indikator IKK, di mana semua indikator melebihi 100%.
2. Pada tahun 2024, hasil perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Tanjung Priok Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah memenuhi bahkan melebihi target jangka menengah.
3. Pada tahun 2024, hasil analisis efisiensi sumber daya menunjukkan nilai efisiensi BBKK Tanjung Priok lebih dari 50. Hal ini dapat diartikan bahwa BBKK Tanjung Priok telah berhasil mengefisienkan anggaran untuk mencapai 8 target indikator. Efisiensi tersebut berasal dari sisa transport yang dibayarkan sesuai biaya yang sesungguhnya (at cost), sisa biaya penginapan dengan memilih tempat penginapan di bawah harga Standar Biaya Masukan (SBM), serta kegiatan yang dilaksanakan melalui daring.
4. Capaian kinerja BBKK Denpasar dan BBKK Batam (satuan kerja dengan klasifikasi yang sama). Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil nilai rata-rata pencapaian kinerja BBKK Denpasar tercapai sebesar 107.21%, sementara BBKK Batam sebesar 106.88%. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata pencapaian kinerja BBKK Denpasar paling tinggi.

B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun yang akan datang, antara lain: Menindaklanjuti Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka harus segera melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi yang baru. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan atas tugas pokok dan fungsi yang

baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

2. Mengembangkan kapasitas SDM BBKK Tanjung Priok.
3. Mengembangkan inovasi digital untuk semua kegiatan pelayanan. terutama kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BBKK.
4. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing tim kerja tetap dilakukan setiap bulan untuk memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Tanjung Priok

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 30 November 2024

Pihak Pertama

Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0.92 Indeks
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98.5 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	86 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan	Nilai kinerja anggaran	85 Nilai

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
	Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93.5 Nilai
		Kinerja implementasi WBK satker	80.5 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80.5 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan wilayah	30,002,414,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4,390,945,000.00
TOTAL			34,393,359,000.00

Pihak Kedua



dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 30 November 2024

Pihak Pertama



Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.

Lampiran 2

Kertas Kerja Perhitungan Kinerja Tahun 2024

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA
BBKK TANJUNG PRIOK TAHUN 2024**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Capaian	Perhitungan % Capaian	%Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanitan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBD N	$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$ S = score S_{max} = score maksimal S_{min} = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/PLBDN yakni: 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	Pemeriksaan Orang = 991.824 Pemeriksaan Alat Angkut = 37.990 Pemeriksaan Barang = 2 Pemeriksaan Lingkungan = 1.717 Kemudian Hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode <i>Urgency, Seriousness, Growth</i> (USG), dengan menentukan skala nilai 1 – 5 masing masing parameter. Setelah didapat nilai score parameter dibagi dengan nilai score maksimal sehingga didapatkan target sebesar 0.9	Pemeriksaan Orang = 1.309.812 Pemeriksaan Alat Angkut = 45.379 Pemeriksaan Barang = 2 Pemeriksaan Lingkungan = 1.993 Ke empat nilai empir tersebut Kemudian Hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode <i>Urgency, Seriousness, Growth</i> (USG), dengan menentukan skala nilai 1 – 5 masing masing parameter. Setelah didapat nilai score parameter dibagi dengan nilai score maksimal. Hasil yang didapat yaitu sebesar 0.9	= 0,98 0,92	104,35%
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	Pemeriksaan Orang = 98,5% Pemeriksaan Alat Angkut = 98,5% Pemeriksaan Barang = 98,5% Pemeriksaan Lingkungan = 98,5% Total 98,5%	Pemeriksaan Orang = 11.976 Pemeriksaan Alat Angkut = 128 Pemeriksaan Barang = 0 Pemeriksaan Lingkungan = 80 Total 12.184 (100%) semua dikendalikan	=100% 98,50%	101,52%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBD N	$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$ Keterangan : S = skor S_{max} = skor maksimal S_{min} = skor minimal • Skor dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Parameter perhitungan terdiri dari: 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% sebesar 100% b) Indeks Pinjal ≤ 1 sebesar 100% (6 Pelabuhan) c) Tidak Ditemukan Larva Anopheles sebesar 100% (6 Pelabuhan) d) Indeks Populasi Kecoa < 2 sebesar 100% (6 Pelabuhan) e) Indeks Populasi Lalat < 2 sebesar 100% (6 Pelabuhan) f) HI perimeter = 0 sebesar 100% (6 Pelabuhan) g) HI buffer < 1 h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebesar 100% i) Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 100% j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali bakteriologis sebesar 100% Kemudian Hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode <i>Urgency, Seriousness, Growth</i> (USG), dengan menentukan skala nilai 1 – 5 masing masing parameter. Setelah didapat nilai score parameter dibagi dengan nilai score maksimal sehingga didapatkan target sebesar 1	a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% sebesar 100% b) Indeks Pinjal ≤ 1 sebesar 100% (6 Pelabuhan) c) Tidak Ditemukan Larva Anopheles sebesar 100% (6 Pelabuhan) d) Indeks Populasi Kecoa < 2 sebesar 100% (6 Pelabuhan) e) Indeks Populasi Lalat < 2 sebesar 100% (6 Pelabuhan) f) HI perimeter = 0 sebesar 100% (6 Pelabuhan) g) HI buffer < 1 h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebesar 100% i) Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 100% j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali bakteriologis sebesar 100% Kemudian Hasil yang didapat dihitung dengan menggunakan metode <i>Urgency, Seriousness, Growth</i> (USG), dengan menentukan skala nilai 1 – 5 masing masing parameter. Setelah didapat nilai score parameter dibagi dengan nilai score maksimal sehingga didapatkan target sebesar 1	= 1 1	100,00%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Capaian	Perhitungan % Capaian	%Capaian
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	NNKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada dashboard aplikasi SMART Kemenkeu RI. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: a) Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75% b) Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15% c) Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: a) Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10% b) Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15% c) Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20% d) Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10% e) Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10% f) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10% g) Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan h) Dispensasi SPM (sebagai pengurang)	85	95.95	$= \frac{95.95}{85}$	112.88%
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, capaian output	93.00	99.32	$= \frac{99.32}{93.5}$	106.22%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	82.5	89.86	$= \frac{89.86}{82.5}$	108.92%
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	82.5%	$= \frac{123 \text{ orang}}{123 \text{ orang}}$	$= \frac{100\%}{82.5\%}$	121.21%
						100.00%		
		8	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	96%	97.46%	$= \frac{97.46\%}{96\%}$	101.52%
RATA-RATA PERSEN CAPAIAN								107.88%

Kepala Balai Besar Keperawatan Kesehatan
Tanjung Priok


Heni Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP. 196905041992031009

KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA
Rincian Indikator Kinerja Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN Tahun 2024

Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN		0,92	0,96	104,35%
Pemeriksaan penapisan orang		991.824	1.309.612	120,00
a.	Jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal	67760	73067	
b.	Jumlah Kunjungan Poliklinik (Selain Penumpang)	1.644	2.341	
c.	Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri	444.600	445.533	
d.	Jumlah pengawasan penumpang datang dalam negeri	238.260	367.016	
e.	Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam negeri	238.260	420.355	
f.	Jumlah screening TB	600	600	
g.	Jumlah screening HIV AIDS	700	700	
Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina		37.990	45.379	119,45
a.	Certificate Of Pratique	2.904	3.579	
b.	PHQC	35.086	41.800	
Pemeriksaan Barang		2	2	100
a.	Izin Angkut Jenazah	2	2	
Pemeriksaan Lingkungan		1.717	1.993	116,07
a.	Tempat Pengelolaan Pangan	387	489	
b.	Tempat-tempat Umum	200	249	
c.	Inspeksi Sanitasi Penyehatan Air Bersih	500	617	
d.	Pemeriksaan Air	384	392	
e.	Rekap Hasil Survei Vektor	246	246	

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok



Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 196905041992031009

KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA

Nilai Empiris Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120.0	600	100	120	600
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	119,45	119,45	597,249	100	120	600
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	100.00	100.0	300	100	120	360
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	116,07	116,07	580,373	100	120	600
TOTAL					2.077,62			2.160

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)
0,962

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok


Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 196905041992031009

KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA
Rincian Indikator Kinerja Persentase Faktor Risiko Orang, Barang, Alat Angkut, dan
Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2024

No	Faktor Risiko	Jumlah Faktor risiko yang Ditemukan	Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan	%Capaian
A	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	11976	11976	
	Pertolongan gawat darurat	1	1	
	Rujukan	1	1	
	Isolasi	0	0	
	Vaksinasi (tidak termasuk covid)	11956	11956	
	Izin angkut orang sakit	15	15	
	Rekomendasi perjalanan clearance	0	0	
	HIV	2	2	
	TB	1	1	
B	Faktor Risiko Alat Angkut	128	128	
	Jumlah alat angkut yang berisiko kesehatan (SSCC)	117	117	
	Surat Bebas Karantina Kapal	11	11	
	Sailing Permit	0	0	
C	Pemeriksaan Barang	0	0	
	Jenazah Tidak Berangkat	0	0	
D	Pemeriksaan Lingkungan	80	80	
	Tempat Pengelolaan Makanan	5	5	
	Tempat Tempat Umum	0	0	
	Air yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat	27	27	
	Tindakan Pengendalian Vektor	48	48	
	Total	12184	12184	100%

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok


Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
 NIP. 196905041992031009

KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA
Jumlah Pengendalian Faktor Risiko yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

NO	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN	Jumlah Pengendalian yang Dikendalikan	Jumlah Pengendalian yang dilakukan dan Memenuhi Syarat	% Capaian
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	10	10	100%
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	6	6	100%
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva <i>Anopheles sp</i> (<1)	6	6	100%
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	6	6	100%
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	6	6	100%
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	6	6	100%
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	6	6	100%
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	84	84	100%
9	Persentase lokus TPP aik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	133	133	100%
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	32	32	100%

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok



Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 198905041992031009

KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA
Nilai Empiris Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN Tahun 2024

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Mak	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2	4	100	100	400	100	100	400
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400	100	100	400
9	Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500	100	100	500
Total					4.100			4.100

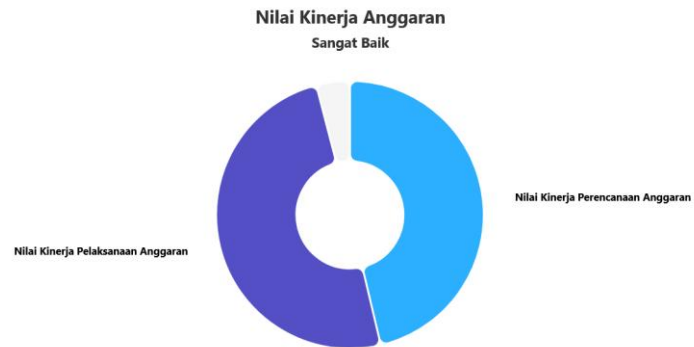
Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)
1,000


Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Tanjung Priok
Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 196905041992031009

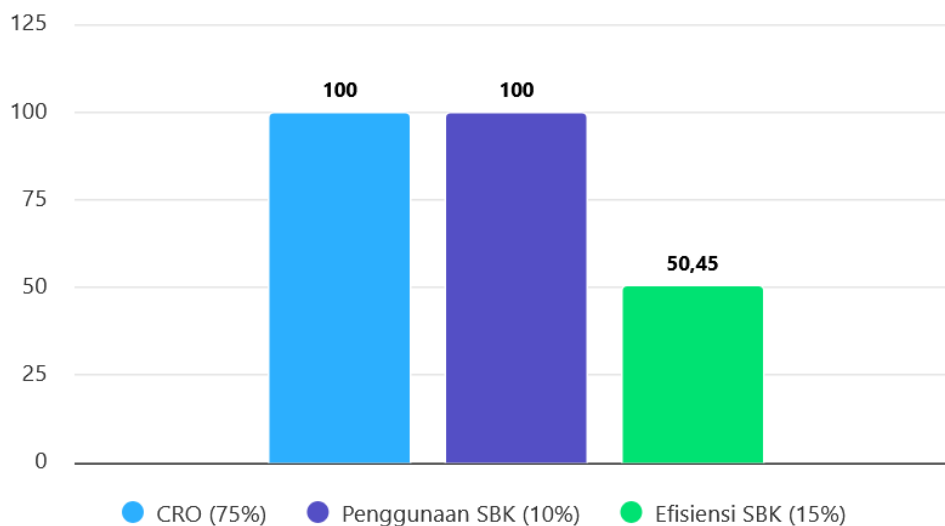
Nilai Kinerja Anggaran

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG
PRIOK

Dash



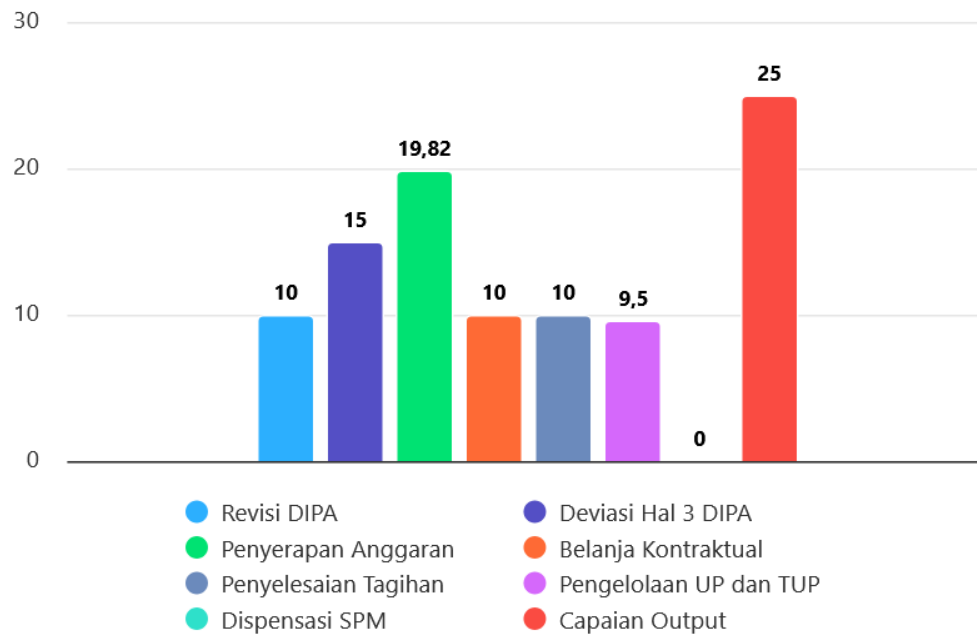
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



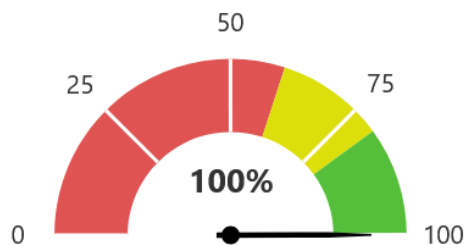
“Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



Jumlah RO sebanyak **30** RO

- 30 RO sudah tercapai (progress = 100%)

- 0 RO dalam proses (0 < progress < 100%)

- 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai besar kekarantinaan kesehatan tanjung priok

Data Anomali

Kondisi ↑↓	Keterangan ↑↓	Jumlah RO ↑↓	Persentase ↑↓
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

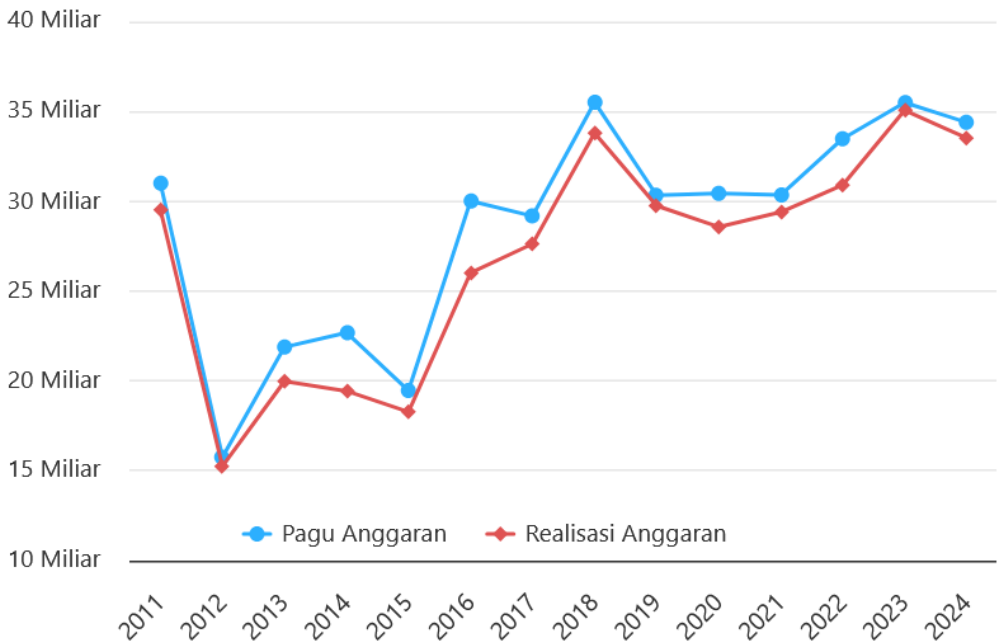
Sebelumnya

1

Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024



Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi Halaman DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	182	024	416108	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK	Nilai	100.00	100.00	99.10	100.00	100.00	95.02	100.00	99.32	100%	0.00	99.32
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.82	10.00	10.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	100.00						98.53				

Kinerja Implementasi WBK Satker

Pada hari ini Selasa, Tanggal 23 Bulan April Tahun 2024 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja Implementasi WBK Satker berikut ini:

Adapun hasil desk disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	60	53
A.	Aspek Pemenuhan	30	25.44
1	Manajemen Perubahan	4	3.49
2	Penataan Tataaksana	3.5	3.13
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.54
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.73
5	Penguatan Pengawasan	7.5	5.72
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3.83
B.	Aspek Reform	30	27.56
1	Manajemen Perubahan	4	4
2	Penataan Tataaksana	3.5	3.33
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.25
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.51
5	Penguatan Pengawasan	7.5	6.88
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4.59
II	KOMPONEN HASIL	40	36.86
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.5	20.27
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.5	16.52
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	3.75
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17.5	16.59
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17.5	16.59
TOTAL NILAI		100	89.86

Peningkatan Kapasitas ASN

PENINGKATAN KAPASITAS ASN MINIMAL 20 JPL TAHUN 2024
UPDATE DATA SAMPAI DENGAN TANGGAL 2 JANUARI 2025

No	Nama	Jumlah Capaian JPL	Kurang/lebih dari target	Keterangan	Bulan tercapai target
1	MUHAMAD FAJAR SUBECHI. SKM. MKM	929 JPL	909 JPL	Tercapai	Maret
2	AMRI PITAYONI. SKM	408 JPL	388 JPL	Tercapai	Maret
3	YULIA DARUTANTRI. SKM	238 JPL	218 JPL	Tercapai	Maret
4	DWI ASIH SUPRIHATIN. SKM	219 JPL	199 JPL	Tercapai	Maret
5	ITA YUNITA. SKM	169 JPL	149 JPL	Tercapai	Februari
6	dr. JULI MARETHA LUSIANA SIAHAAN. M.K.M.	115 JPL	95 JPL	Tercapai	Agustus
7	SITI NURANI. SKM	113 JPL	93 JPL	Tercapai	Maret
8	dr. DWIE MEININGWATI	96 JPL	76 JPL	Tercapai	Februari
9	dr. HESTILIN KARTINI SEILATU	94 JPL	74 JPL	Tercapai	Maret
10	JUNITA MANIK. S.KM. M.Kes	88 JPL	68 JPL	Tercapai	Februari
11	M. EDI HAMDI. SKM	86 JPL	66 JPL	Tercapai	Februari
12	FATMA ZAHARA. A.Md.Kep	81 JPL	61 JPL	Tercapai	Maret
13	dr. THERESIA HERMIN SUTJI WULANSARI	79 JPL	59 JPL	Tercapai	Agustus
14	FIFI NUR AFIFAH. SKM. M.Epid	72 JPL	52 JPL	Tercapai	Maret
15	RUSTAMA SIHITE. SKM	70 JPL	50 JPL	Tercapai	Februari
16	BAYU UMBORO. SKM	64 JPL	44 JPL	Tercapai	Februari
17	GENSIAN KUNCORO YEKTI PUTRA HANGGU MAN	63 JPL	43 JPL	Tercapai	September
18	MONICA RIZQI YANUAR SETYOWATI. SKM	62 JPL	42 JPL	Tercapai	Februari
19	HASMULIATI. A.Md.Kep	55 JPL	35 JPL	Tercapai	September
20	dr. EVVI ROTUA. MKM	54 JPL	34 JPL	Tercapai	Mei
21	SYAFLOVIDA. SKM	52 JPL	32 JPL	Tercapai	Februari
22	NUR ASHRI MAUNAH. SKM	51 JPL	31 JPL	Tercapai	Maret
23	EVI MARIA. S.Farm	51 JPL	31 JPL	Tercapai	April
24	dr. IMELDA NOVIANA PARANNA	50 JPL	30 JPL	Tercapai	Februari
25	FADIAN DESY KRISTINA NATALIA	50 JPL	30 JPL	Tercapai	Februari
26	FREDRIK LONA DJARA. SKM	48 JPL	28 JPL	Tercapai	Februari
27	WIAR BENTARA AGESANG	48 JPL	28 JPL	Tercapai	Februari
28	SETIANA. S.K.M	46 JPL	26 JPL	Tercapai	Februari
29	NANA MULYANA. SKM	46 JPL	26 JPL	Tercapai	Februari
30	ASRI RAHMATIA	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Februari

31	NURUL HANIFAH RACHMAWATI	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Februari
32	SENDI CENDIAWAN. SKM	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Maret
33	NIA ANGGRAENI	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Maret
34	JUNITA MANJASARI MANDANG. SKM	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Februari
35	MUHAMMAD FARDHY NUR WAHID	44 JPL	24 JPL	Tercapai	September
36	ELISABETH BINTANG FEBRINA SIMANJUNTAK. S.K.M	44 JPL	24 JPL	Tercapai	Maret
37	TETI HERAWATI. SKM	43 JPL	23 JPL	Tercapai	Agustus
38	SITI RIANASARI. AMK	43 JPL	23 JPL	Tercapai	September
39	MUTAKIN ZAINAL MUSTOPA	40 JPL	20 JPL	Tercapai	Maret
40	YOGA SASMAYA	40 JPL	20 JPL	Tercapai	Maret
41	MUAYANA	36 JPL	16 JPL	Tercapai	Maret
42	DERY NURRACHMAN	36 JPL	16 JPL	Tercapai	April
43	LA MARWAN	36 JPL	16 JPL	Tercapai	September
44	MICAEL AGUNG KUERA	35 JPL	15 JPL	Tercapai	Juli
45	RUDI SALAM. SE	35 JPL	15 JPL	Tercapai	Juni
46	RISKA SETIA ANATASARI. SE	35 JPL	15 JPL	Tercapai	September
47	dr. DEDDY ARDHIANSYAH. MARS	34 JPL	14 JPL	Tercapai	Maret
48	dr. LIES SETYORINI	33 JPL	13 JPL	Tercapai	September
49	NELLY TODING PADANG. A.Md. Farm.	32 JPL	12 JPL	Tercapai	Februari
50	BAMBANG WICAKSONO	32 JPL	12 JPL	Tercapai	Juli
51	YUFA ZURIYA. SKM	32 JPL	12 JPL	Tercapai	Maret
52	PUTRI NOVI SILABAN	32 JPL	12 JPL	Tercapai	September
53	SUTRI AGUNG HARTANINGSIH. A.Md.Farm	30 JPL	10 JPL	Tercapai	September
54	AGUNG SETIYADI	30 JPL	10 JPL	Tercapai	Juli
55	dr. SANTI KARTIKASARI	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Maret
56	ERLINA NUR ISTIQOMAH	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Februari
57	dr. RIENNY ESTA MARDIANI	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Februari
58	dr. REGINA LISTYARINI ANGWARMASE	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Maret
59	M IRFAN MUNTHE. SKM. M.Kes	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Maret
60	ROBIUR ROSYID. SKM. MKM	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Maret
61	DEBIYANTO WIRASETYA. SKM	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Februari
62	MUHAMAD ZAHRI. SKM. M.Kes	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Februari
63	RESMALENI. S.K.M	28 JPL	8 JPL	Tercapai	April
64	RHANI DESICA	28 JPL	8 JPL	Tercapai	April
65	ANDERSON PANJAITAN. S.Ak	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Juni
66	WAHYUDI	28 JPL	8 JPL	Tercapai	Mei
67	ENIZARTI. SKM. MKM	28 JPL	8 JPL	Tercapai	September

68	dr. I NYOMAN PUTRA. M.Kes	28 JPL	8 JPL	Tercapai	September
69	SANNY MANALU	28 JPL	8 JPL	Tercapai	September
70	YESSI MARIANA GULTOM	28 JPL	8 JPL	Tercapai	September
71	DEDI SUTARDI. SKM	27 JPL	7 JPL	Tercapai	Februari
72	dr. NITA AYU ANI SORMIN	27 JPL	7 JPL	Tercapai	Maret
73	INDRA FELANI. S.K.M.	24 JPL	4 JPL	Tercapai	Februari
74	MUHAMMAD JAMIL. SKM	24 JPL	4 JPL	Tercapai	Februari
75	Dra. ATIK YULIHARTI. M.Kes	24 JPL	4 JPL	Tercapai	Maret
76	ATIM. SKM	24 JPL	4 JPL	Tercapai	Juli
77	ITA AMELIA. S.Kep	24 JPL	4 JPL	Tercapai	Maret
78	HADI NUGRAHA. SKM	24 JPL	4 JPL	Tercapai	September
79	EKAHNINGSIH	24 JPL	4 JPL	Tercapai	September
80	ULI ROHATI SIREGAR. SKM. M.K.M	22 JPL	2 JPL	Tercapai	Februari
81	M. MEIRIYANTO	22 JPL	2 JPL	Tercapai	September
82	AAH NURLIAH. S.Si. Apt. M.K.K.K	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
83	ARKY KRISTIN ELISABET SIAGIAN	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
84	AZIS PERMANA	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
85	BRIYAN SUHEPRI	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
86	DINSI APRILIUS. SKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
87	dr. RICKY ATRIAN	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
88	dr. SAHAT HOLONG PARDOMUAN. M.Kes	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
89	FERI EKA PRASETIO. S.Kom	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
90	HERISNA H.J. TUMBINGO. S. Farm	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
91	INDAH SEPTIYANTI NUR AINI. AMF	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
92	KUSRINI	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
93	SRI WAHYUDI. A.Md.Kep.	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
94	ANI BUDI LESTARI. SKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
95	BASKARA YUDA PRATAMA. A.Md.Kes.	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
96	CUKUP SUGIANTO. SST	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
97	FERY ANTHONY. SKM. MKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
98	JIHAN MUTIARA SARI. S.K.M	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
99	MOHAMMAD AMNUROKHIM MALAHADE. SKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
100	RIRI SAIFUDIN	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
101	SUBARJO. SKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
102	AGI GUNAWAN WIBISONO	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
103	REYNALDO	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
104	TEGUH SUMARGONO. S.Sos. MM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	April
105	AGUS SUDARMAN. SKM. MKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	April
106	CAHYONO EDI NUGROHO. SKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	April

107	LUH AYU KRISDAYANTI	20 JPL	0 JPL	Tercapai	April
108	ROMANIKA. SKM. M.Kes	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Maret
109	HERI SAPUTRA. SKM. M.Kes. QRMA. CFA. CRMO	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Mei
110	AJAT SUDRAJAT	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Juli
111	HANAFI DAULAY	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Agustus
112	SUTRIA E. BAWILING. A.Md TE	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Februari
113	INDRA SYOFENDI. SE. M.Kes	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
114	WAHYU KURNIAWAN. A.Md.KL	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
115	MASYITA. S.Farm. Apt	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
116	BRATA SUGEMA. SKM. M.Si	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
117	dr. TRIO TOUFIK EDWIN T. MKM	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
118	HOLONG J M TANJUNG	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
119	AFRIANI	20 JPL	0 JPL	Tercapai	September
120	IBNU ARLI	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Oktober
121	TASJO RIYANTO	20 JPL	0 JPL	Tercapai	Oktober

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Tanjung Priok



Heri Saputra, S.K.M., M. Kes.
NIP 196905041992031009

Persentase Realisasi Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

LAPORAN PAGU DANA PER JENIS BELANJA

No.	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	51 BELANJA PEGAWAI	20.244.878.000	19.836.872.853	97.00%	0	0	608.305.347
2	52 BELANJA BARANG	14.031.146.000	13.801.693.426	98.36%	0	44.527.000	184.925.574
3	53 BELANJA MODAL	117.235.000	116.807.800	99.72%	0	0	327.200
	Jumlah	34.393.359.000	33.555.273.879	97.56%	0	44.527.000	793.558.121

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Lampiran 3

Analisa Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Anggaran

1. Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran
2. Saat ini digunakan menggunakan rumus dalam PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA
3. Langkah-Langkah menghitung efisiensi
 - a. Identifikasi RO apa saja yang mendukung tercapainya indikator
 - b. Hitung pagu dan realisasi anggaran
 - c. Hitung capaian kinerja, yang dihitung adalah kinerja (realisasi dibagi target)
 - d. Hitung efisiensi
 - e. Hitung Nilai Konversi
 - f. Lakukan analisa terhadap hasil

Interpretasi

- 1 Efisiensi berada pada range -20 sd 20
- 2 Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien
- 3 Nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%

No	Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAKi)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAKi)	Realisasi Anggaran	Capaian Keluaran (CKi)	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1.	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara / PLBDN	2.539.739.000	2.507.693.870	98,74%	1,044	5%	63%	Efisien
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	103.270.000	101.875.450	98,65%	1,015	3%	57%	Efisien
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara / PLBDN	84.979.000	82.954.610	97,62%	1,000	2%	56%	Efisien
4.	Nilai kinerja anggaran	66.865.000	58.358.600	87,28%	1,120	22%	105%	Efisien
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83.816.000	82.336.639	98,23%	1,060	7%	68%	Efisien
6.	Kinerja implementasi WBK satker	186.029.000	165.412.180	88,92%	1,089	18%	96%	Efisien
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	2.502.113.000	2.462.408.633	98,41%	1,210	19%	97%	Efisien
8.	Persentase realisasi anggaran	28.826.548.000	28.094.233.897	97,46%	1,010	4%	59%	Efisien

Lampiran 4







MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

kepada :

Pelabuhan Sunda Kelapa

sebagai :

Pelabuhan Sehat Tahun 2024

Atas Prestasinya dalam Mewujudkan Penyelenggaraan
Pelabuhan dan Bandara Udara Sehat

(Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/1817/2024)

Jakarta, 6 Desember 2024
MENTERI KESEHATAN,



BUDI G. SADIKIN



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

kepada:

**Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman**

sebagai

Pelabuhan Sehat Tahun 2024

atas Prestasinya dalam Mewujudkan Penyelenggaraan
Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

(Kep. Menkes RI Nomor: HK.01.07/Menkes/1817/2024)

Jakarta, 6 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN,



BUDI G. SADIKIN



